



MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH JAMBI

rektorat
lajaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

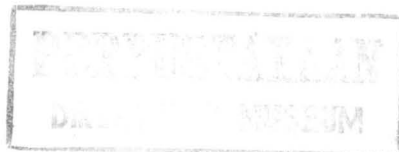
305-90815

RIF

S

**SISTEM
KESATUAN HIDUP
SETEMPAT
DAERAH JAMBI**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA, 1984**



PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Jambi Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

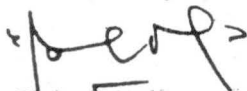
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Rifai Abu dan Dr. S. Budi Santoso dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari: Drs. H. Bambang Suwondo; Drs. Achmad Yunus Drs. Singgih Wibisono.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya,—

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NP. 130 117 589.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Jambi.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

D A F T A R I S I

BABI PENDAHULUAN	1
Masalah	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian	5
BAB II KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA MELAYU JAMBI	
BAGIAN I IDENTIFIKASI	
Lokasi	14
Penduduk	19
Latar Belakang Sosial Budaya	24
BAGIAN II. BENTUK KOMUNITAS	
Ciri-ciri Komunitas	30
Struktur Komunitas Kecil	31
Pemerintahan Dalam Komunitas Kecil	32
Lembaga-lembaga Sosial Komunitas Kecil	34
BAGIAN III SISTEM PELAPISAN SOSIAL	
Dasar-dasar Pelapisan Sosial	36
Bentuk Pelapisan	36
Hubungan Antar Lapisan	38
Perubahan Lapisan	39
BAGIAN IV PIMPINAN MASYARAKAT	
Pimpinan Formal dan Informal	41
Pimpinan Tradisional	42
Pimpinan Masa Kini	44
BAGIAN V SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL	
Mempertebal Keyakinan	47
Memberi Imbalan	52
Mengembangkan Rasa Malu	53
BAGIAN VI BEBERAPA ANALISA	56
BABIII KOMUNITAS KECIL ORANG KERINCI	
BAGIAN I IDENTIFIKASI	
Lokasi	60
Penduduk	64
Latar Belakang Sosial Budaya	67
BAGIAN II BENTUK KOMUNITAS KECIL	
Ciri-ciri Sebuah Komunitas Kecil	70
Struktur Pemerintahan	73
Lembaga-lembaga Sosial Komunitas Kecil	76
BAGIAN III SISTEM PELAPISAN SOSIAL	
Dasar Pelapisan	76
Bentuk Pelapisan	77
Hubungan Antar Lapisan	79
Perubahan Lapisan	81
BAGIAN IV PIMPINAN MASYARAKAT	
Gambaran Umum	83
Pimpinan Masa Kini	88
BAGIAN V SITEM PENGENDALIAN SOSIAL	
Mempertebal Keyakinan	88
Memberi Imbalan	92
Mengembangkan Rasa Malu	93
Mengembangkan Rasa Takut	94
BAGIAN VI BEBERAPA ANALISA	96
KEPUSTAKAAN	100
I N D E K	101

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN

Kesatuan Hidup Setempat adalah kesatuan sosial yang terwujud bukan didasarkan pada ikatan kekerabatan, tetapi oleh karena ikatan tempat kehidupan. Dengan perkataan lain, suatu kesatuan hidup setempat selalu menempati satu wilayah tertentu. Akan tetapi wilayah tertentu saja, walaupun merupakan faktor pokok, tidak cukup untuk menentukan adanya suatu kesatuan hidup setempat, karena masih ada unsur lain yang mengikat kesatuan itu. Orang-orang yang tinggal bersama dalam satu wilayah mempunyai perasaan bangga dan cinta kepada wilayah tersebut. Kesatuan hidup semacam itu lazim juga disebut *Komunitas*.

Komunitas yang tercermin pada berbagai tempat kehidupan suku-suku bangsa di lingkungan pedusunan dalam daerah Jambi, pada hampir setiap segi kehidupan mereka terlihat rasa kesatuan yang amat mendalam. Hal ini disebabkan oleh adanya perasaan di antara para anggotanya, bahwa mereka hidup saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka tempati memberikan kehidupan kepada mereka semuanya. Setiap kelompok dalam masing-masing komunitas dalam hal-hal tertentu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok lain. Mereka bangga akan ciri dari kelompok sendiri dan akibatnya seringkali merendahkan atau menganggap aneh ciri-ciri dalam kehidupan komunitas lain.

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, maka penelitian tematis adat istiadat daerah Jambi mencoba mengadakan perekaman lebih lanjut dengan menempatkannya sebagai tema penelitian "Sistem Kesatuan Hidup Setempat", yang hasilnya sebagaimana tertuang di dalam naskah ini. Kegiatan seperti ini diselenggarakan dalam rangka merealisasikan usaha Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah mengenai komunitas sebagai aspek kehidupan masyarakat di daerah ini.

MASAALAH

Adapun masalah yang menjadi unsur pendorong bagi terselenggaranya kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat atau komunitas ini, dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu masalah umum dan masalah khusus.

Masalah umum. Sebagai masalah umum yang meliputi masalah pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia pada umumnya, ialah bahwa dalam suatu komunitas selalu terdapat wujud kebudayaan yang mengikat penduduknya dengan tempat kediamannya.

Kebudayaan pada suatu komunitas itu ada dalam wujud ideal, wujud sistem

sosial dan wujud fisik. Ketiga wujud kebudayaan itu menjadi unsur pengikat yang melahirkan rasa bangga, rasa cinta, dan rasa kesatuan dari masyarakat pendukungnya. Keadaan seperti itu masih tergambar sekalipun agak samar dalam suasana kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Jambi, yang pada umumnya setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang sama, yaitu bertani dan mereka akan selalu bekerjasama untuk mencapai kepentingan tersebut. Dalam bidang pemerintahan tradisional, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara harmonis. Segala sesuatunya dijalankan atas dasar musyawarah. Demikian pula terhadap segi-segi kehidupan lainnya, acapkali mereka mendambakan prinsip-prinsip gotong royong dan musyawarah. Kesemuanya itu terjadi karena mereka merasa senasib sepenanggungan, serta hidup saling memerlukan. Loyalitas terhadap lingkungan yang demikian itu bahkan secara ekstrim pernah terlukis semacam paham *Chauvinisme* atas wilayah kediaman mereka dengan suatu kalimat perumpamaan yang berbunyi:

"Meskipun terdapat hujan emas di negeri orang, lebih baik menampung hujan batu, asalkan di negeri sendiri."

Akan tetapi sebagai akibat proses pergeseran kebudayaan di Indonesia khususnya di pedesaan telah menyebabkan pergeseran wujud-wujud kebudayaan dalam suatu komunitas. Suasana kehidupan seperti yang telah kita singgung di atas tadi, pada kenyataannya sekarang sudah tidak jelas lagi. Hal itu berarti sedikit atau banyak bentuk dan sifat dari komunitas itu sendiri telah mengalami perubahan.

Dalam pada itu pembangunan yang sedang giat dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses itu dengan sendirinya menuntut pula perubahan-perubahan kebudayaan pada suatu komunitas. Di antara kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh proses pembaharuan itu ialah mengenai bentuk, sistem pelapisan dan pengendalian sosial, serta faktor pimpinan masyarakat dalam komunitas tersebut. Perubahan-perubahan itu baik berjalan secara lambat maupun cepat, selain telah menggeser wujud-wujud kebudayaan yang lama, di lain pihak tidak mustahil pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat pendukungnya.

Masaalah khusus. Sebagai masaalah khusus ialah karena belum adanya data dan informasi yang memadai tentang keadaan sistem kesatuan hidup setempat atau komunitas di lingkungan daerah Jambi. Hal ini merupakan salah satu masalah yang mendorong adanya usaha inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan pada sebuah komunitas, sehingga data dan informasi tersebut akan berguna sebagai bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada umumnya atau komunitas itu sendiri pada khususnya.

TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan usaha Inventarisasi dan Dokumentasi Sistem Kesatuan Hidup Setempat yang terdapat pada lingkungan wilayah

suku-suku bangsa di daerah ini mengandung hal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yang sekaligus dapat menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum; dari sudut tujuan secara umum dan merupakan hal yang akan dicapai dalam jangka panjang, terutama diharapkan agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyediakan data dan informasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai aspek kehidupan dari berbagai suku bangsa di daerah Jambi sebagaimana tercermin di dalam sistem kesatuan hidup masyarakatnya masing-masing, sehingga ia akan dapat berfungsi secara maksimal untuk keperluan bahan kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan, yang meliputi pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa, peningkatan apresiasi budaya dan peningkatan ketahanan nasional.

Tujuan khusus; adapun tujuan khusus yang diharapkan akan terjangkau oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi tahun 1980/1981 dalam bidang Adat Istiadat Daerah, antara lain ialah :

1. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan yang berkenaan dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat yang ada pada suku-suku bangsa asli daerah ini. Hasil kegiatan tersebut diharapkan akan banyak memberikan informasi, terutama mengenai bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial yang dapat diamati dari lokasi, penduduk serta latar belakang sosial budaya dari setiap kesatuan hidup masyarakat pendukungnya, yang kesemuanya itu sangat berguna dalam menyusun dan mengembangkan kebijaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan.
2. Agar dapat menjadi bahan dokumentasi dan obyek studi lanjutan, baik bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi instansi pemerintah atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang membutuhkannya.

RUANG LINGKUP

Seperti telah disinggung pada uraian di muka, bahwa Kesatuan Hidup Setempat, yang seterusnya akan disebut dengan *Komunitas*, adalah suatu kesatuan yang lahir dalam ikatan yang erat antara kelompok sosial sebagai pendukung suatu kebudayaan dengan tempat kediamannya, yang disertai oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan. Rumusan semacam ini pula menjadi dasar dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme dan sebagainya. Maka dari itu "negara" misalnya dapat pula merupakan komunitas, kalau rasa cinta tanah air dan rasa kepribadian bangsa dalam negara itu besar (2, 156). Bentuk seperti ini termasuk dalam kategori komunitas besar. Dari sudut lain ada pula komunitas kecil, seperti desa, kampung, rukun tetangga dan sebagainya. Komunitas kecil semacam itulah yang akan dijadikan pangkal tolak penyajian di dalam naskah laporan ini.

Ruang lingkup materi. Uraian tentang sistem komunitas kecil, ruang lingkungannya mengandung materi: bentuk dan sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial. Dari hal bentuk, uraiannya akan mencakup ciri-ciri, struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam komunitas kecil itu. Selanjutnya setiap suku bangsa atau kelompok sosial dalam suatu komunitas kecil mengenal adanya pelapisan sosial. Hanya saja pelapisan sosial itu ada yang tajam, tetapi pada suku-suku bangsa asli daerah Jambi kebanyakan wujudnya tersamar seperti tidak ada kelihatannya. Sistem pelapisan sosial yang tajam yang ditandai oleh hal-hal yang lebih konkrit dari yang tersamar, akan kita namakan *pelapisan sosial resmi*. Sedangkan yang tersamar dalam arti baru merupakan anggapan yang lahir dalam masyarakat yang bersangkutan, tapi belum diikuti oleh hal-hal yang mewarnai secara jelas lapisan-lapisan yang ada. Lapisan seperti ini kita namakan *pelapisan sosial samar*. Kedua sifat pelapisan tersebut akan ditinjau dalam dua zaman yaitu masa lalu dan masa kini, tinjauan mana akan mengandung uraian mengenai dasar, bentuk hubungan dan perubahan lapisan.

Suatu komunitas kecil baru dapat diamati dan dihayati secara baik, apabila unsur pimpinan masyarakat pendukung komunitas itu turut dibicarakan. Dalam rangka inilah uraian tentang pimpinan masyarakat akan meliputi hal-hal seperti: gambar umum, pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

Dalam pada itu setiap lingkungan suatu komunitas selalu ada sistem pengendalian sosial yang terwujud, agar setiap warga komunitas itu dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun jalannya pengendalian itu ditempuh baik melalui cara-cara mempertebal keyakinan, memberi imbalan mengembangkan rasa malu ataupun mengembangkan rasa takut.

Ruang lingkup operasional. Suatu negara, meskipun terwujud dalam suatu komunitas tidaklah dijadikan sasaran dalam laporan ini, akan tetapi yang menjadi sasaran operasional ialah komunitas yang terlihat dalam scope yang lebih kecil seperti dalam bentuk kampung, dusun atau dalam bentuk gabungan dari beberapa buah dusun yang membentuk komunitas kecil yang lebih luas, di mana sesama warganya masih dapat saling mengenal, tidak ada aneka warna yang besar antara bagian-bagian atau kelompok yang ada di dalamnya, serta sebagian besar dari lapangan-lapangan kehidupan mereka dapat dihayati secara bulat.

Untuk mengungkap segala sesuatu yang erat hubungannya dengan segi-segi kehidupan dalam komunitas kecil tersebut, maka lokasi-lokasi yang dipergunakan sebagai sasaran ialah dalam daerah orang Melayu Jambi dan daerah orang Kerinci, yang masing-masing difokuskan pada dusun Muaro Jambi, marga Maro Sebo, kabupaten Batanghari, serta dusun Koto-Lanang Kemendapoan Depati VIII kabupaten Kerinci. Meskipun hanya satu buah dusun dari tiap-tiap lokasi suku bangsa itu dijadikan sasaran operasional, namun perhatian peneliti tidak terlepas pula pada dusun-dusun lain di sekitar-

nya, oleh karena setiap komunitas kecil yang disebut "marga" bagi orang Melayu Jambi, ataupun "mendapo" bagi orang Kerinci selalu meliputi/membawahi beberapa buah dusun, yang tergabung dalam satu komunitas kecil yang lebih luas.

Dengan berpedoman pada komunitas kecil seperti itulah diharapkan akan mampu mengungkapkan sebanyak mungkin data yang representatif tentang sistem komunitas kecil dalam hubungan suku-suku bangsa tersebut di atas.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Tahap persiapan; penelitian yang diadakan dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi sistem komunitas kecil pada suku-suku bangsa asli daerah ini, telah diselenggarakan oleh sebuah team peneliti yang diorganisir sedemikian rupa agar dapat menjamin kelancaran mekanisme penelitian tersebut. Adapun tenaga-tenaga peneliti itu berjumlah 4 orang, dua orang di antaranya terdiri dari para sarjana ilmu-ilmu sosial, sedangkan lainnya merupakan duplikat tokoh-tokoh adat pada masing-masing komunitas pada lokasi penelitian. Tenaga-tenaga tersebut ialah: Ibrahim Budjang, SH, Drs. A. Murad, Kms. B. Rachman (Melayu Jambi) dan Suhita Sulastri (Kerinci), dengan pengaturan dan pembagian bidang tugas penelitian sebagaimana terlihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut tampak para peneliti menyebar terpisah menjadi dua kelompok. Susunan tiap-tiap kelompok peneliti adalah merupakan perpaduan antara orang yang dianggap menguasai segi-segi teoritis dan orang yang dianggap menguasai segi praktis, yang keduanya itu ditempatkan sesuai menurut lokasi daerah penelitian masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar penghayatan terhadap tema penelitian ini benar-benar dapat dicernakan secara baik, sehingga rekaman tentang wujud kebudayaan pada setiap komunitas kecil yang diteliti itu tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

Sebagai memperkuat team, duduk pula beberapa orang tenaga pembantu khusus yang bertugas memproses hasil-hasil penelitian ke dalam naskah yang terjilid rapi. Mereka itu ialah terdiri dari para karyawan/anggota staf Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jambi. Kepada mereka itulah diharapkan secara selektif dan kreatif dapat giat menyertai pekerjaan sekretariat team peneliti/penulis.

Tahap pengumpulan data. Sebagaimana lazimnya setiap usaha penelitian, baru dapat dipandang mantap dan berhasil apabila penetrapannya dilandasi oleh metoda-metoda tertentu. Demikian pula halnya dengan usaha penelitian Sistem komunitas kecil ini, para peneliti mempergunakan metoda penelitian masyarakat, dalam hubungan antropologi sosial, guna memperoleh gambaran yang lengkap mengenai fakta-fakta adat dan kebudayaan pada komunitas yang bersangkutan. Dari berbagai macam metoda penelitian masyarakat yang dikenal, yang hanya dipakai ialah:

- a. metoda wawancara,
- b. metoda pengamatan (observasi), dan

c. metoda kepustakaan.

Sesungguhnya cara yang paling efektif dipakai oleh para peneliti untuk mendapatkan sejumlah besar bahan keterangan dari para informan, ialah melalui wawancara yang tersusun, di mana peneliti bertindak memimpin pembicaraan.

Di samping itu usaha pengamatan dalam rangkaian kerja lapangan, juga dirasakan amat besar faedahnya sebagai pelengkap dari metoda wawancara. Sebab, meskipun para peneliti masing-masing mempunyai seorang asisten khusus yang banyak tahu tentang sistem komunitas pada suku bangsa yang diteliti, namun kemungkinan perolehan data yang lengkap masih saja diragukan. Oleh sebab itu kekosongan dalam data yang tak dapat dicatat dari wawancara, mungkin bisa diisi dengan data yang diperoleh dari hasil

Dalam pada itu metoda penelitian kepustakaan telah pula menduduki tempat dan peranan yang penting dalam merealisasikan usaha inventarisasi dan dokumentasi aspek kebudayaan tersebut, sebab bahan pustaka itu bukan saja berfungsi mencegah terjadinya duplikasi dalam penulisan, akan tetapi ia juga berfungsi menunjang pemantapan hasil pengamatan dan wawancara. Bahkan melalui penelitian kepustakaan itu pula niscaya akan dijumpai gejala-gejala yang menjadi bahan komparasi terhadap hasil pengamatan.

Penelitian sistem komunitas kecil dalam lingkungan daerah Jambi, seyogyanya diarahkan pada semua sub suku bangsa asli daerah ini, yaitu suku-suku bangsa: Melayu Jambi, Batin, Kerinci, Orang Penghulu, suku Pindah, suku anak Dalam (Kubu) dan suku Bajau (3, 37). Karena pada suku-suku bangsa itulah akan terdapat kebulatan komunitas kecil. Akan tetapi masalahnya akan menjadi sulit sehubungan dengan keterbatasan tenaga maupun keterbatasan waktu yang tersedia bagi pelaksanaan penelitian sistem komunitas tersebut.

Oleh sebab itu dengan tidak mengurangi hakekat dan tujuan penelitian ini maka kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Sistem Komunitas Kecil bagi suku-suku bangsa di daerah ini dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun tidak mencakup seluruh komunitas kecil dari suku-suku bangsa yang ada. Sebagai patokan, bagi daerah Jambi hanya dipilih dan diungkapkan dua di antara tujuh suku bangsa yang dikenal. Pemilihan tersebut didasarkan pada sudut pandangan bahwa jumlah pendukung kebudayaan pada komunitas suku-suku bangsa yang terpilih itu cukup besar dan penyebarannya hampir merata ke segenap penjuru Kabupaten dalam daerah Propinsi Jambi. Dan biasanya jika terdapat suku bangsa yang dipandang dominan dalam suatu daerah, otomatis kebudayaannya juga ikut mempunyai pengaruh yang besar di daerah itu.

Adapun dua suku bangsa yang kita maksudkan ialah :

1. Orang Melayu Jambi, yang tempat pemukimannya tersebar luas mengikuti sepanjang dan sekitar pinggiran sungai Batanghari. Sedangkan

sungai itu mengalir dari Barat ke Timur melewati empat daerah kabupaten dalam Propinsi Jambi, yaitu daerah Kabupaten: Bungo Tebo, Batanghari, Kotamadya Jambi, dan Tanjung Jabung.

Spesifikasi daerah komunitasnya diberi sebutan "*dusun*", dengan jabatan pimpinan komunitas bernama "*penghulu*".

2. Orang Kerinci yang mendiami daerah se Kabupaten Kerinci, dengan spesifikasi daerah komunitasnya disebut "*lurah*", sedangkan pimpinan komunitas bernama "*Depati*".

Bertolak dari dua macam bentuk komunitas kecil yang dikenal oleh masing-masing suku bangsa itulah lalu ditentukan sasaran operasional penelitian, yakni :

1. Dusun Muaro Jambi, Marga Maro Sebo, Kecamatan Sekernan Kabupaten Batanghari.
2. Lurah-lurah dalam Dusun Koto Lanang, Kemendapoan Depati VIII Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Pemilihan dusun dan lurah tersebut sebagai komunitas kecil yang merupakan bagian dari suatu suku bangsa yang disebut di atas, antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dusun Muaro Jambi yang secara geografis adalah merupakan pusat lalu lintas jalan sungai dan fasilitas perhubungan antar lingkungan orang-orang Melayu Jambi. Apabila kita pandang dari sudut ciri-ciri yang melekat pada dusun itu, sesungguhnya masih terlihat gejala-gejala keaslian dari wujud-wujud kebudayaannya, terutama dalam hal bentuk dan unsur pimpinan masyarakat daerah itu sebagai suatu komunitas kecil.

Demikian pula keadaannya dengan lurah-lurah (*luhak*) di lingkungan dusun Koto Lanang sebagai pencerminan tempat kediaman orang-orang Kerinci. Di daerah ini masih dijumpai bangunan rumah-rumah panjang khas Kerinci sebagaimana yang pernah diteliti dan diungkapkan oleh Dr. H.H. Morrison pada tahun 1940 (7, 37). Bahkan sistem pemerintahan tradisional mereka hingga sekarang masih dipengaruhi oleh faktor geneologis, karena keanggotaan dalam komunitas di bawah dusun terdiri dari orang-orang yang secara matrilineal berasal dari keturunan darah yang sama.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut jika dihubungkan dengan materi pokok yang menjadi bahan pembicaraan dalam naskah ini, maka cukup menjadi alasan untuk menempatkan dusun dan lurah tersebut di atas sebagai sampel yang representatif bagi suku-suku bangsa yang bersangkutan.

Suatu pola pelaksanaan kegiatan team Inventarisasi dan Dokumentasi Sistem Komunitas ini telah pula dirancang secara baik, sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota team dalam menentukan tahap-tahap kegiatan yang akan dijalankan secara efektif dan efisien.

Pola kegiatan diatur dalam tahapan sebagai berikut :

Tahap Kegiatan	Uraian
1. Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan organisasi team. b. Menghadiri pertemuan antara segenap anggota team peneliti, dengan team pusat, untuk menerima petunjuk dan pengarahan kerja. c. Mengadakan seleksi lokasi, para informan dan sasaran pengamatan. d. Mempersiapkan daftar wawancara (interview guide), surat-surat izin turun ke lapangan, serta alat perlengkapan lainnya. e. Penelitian kepustakaan.
2. Penelitian lapangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan wawancara dengan para informan. b. Mengadakan pengamatan langsung.
3. Pengolahan data dan penyusunan naskah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensortir data yang relevan dengan masalah yang digarap. b. Penyusunan draft I, dengan berpedoman pada garis-garis yang telah ditentukan di dalam TOR dan JUK-LAK.
4. Evaluasi	Melakukan koreksi, editing dan penyempurnaan naskah oleh Ketua Team daerah.
5. Pengetikan, perbanyak dan penjilidan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengetikan naskah. b. Perbanyak dan penjilidan.

Sejalan dengan tahap-tahap kegiatan di atas, dan dengan menyesuaikan pada ketentuan jangka waktu yang telah digariskan dalam TOR maka ditetapkanlah jadwal kegiatan organisasi team Inventarisasi dan Dokumentasi Sistem Komunitas Kecil bagi suku-suku bangsa asli daerah Jambi, seperti tertera pada tabel 2 di sebelah ini.

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, metoda pengamatan dan wawancara memegang posisi utama bagi terwujudnya usaha inventarisasi dan dokumentasi aspek kebudayaan dalam komunitas kecil yang bersangkutan. Tenaga Asisten yang senantiasa mendampingi sang peneliti sekaligus berperan sebagai pengamat sebab meskipun ia orang biasa, tapi karena faktor pengalaman sebagai "orang dalam" gemar mengamati dengan seksama segala

sesuatu yang terjadi dan dapat dilihat bilamana dikehendaki oleh peneliti. Di samping itu juga Pejabat Bagian Kebudayaan pada Kandep P dan K setempat turut dilibatkan oleh peneliti dalam hal menemukan data semaksimal mungkin. Pejabat tersebut dipandang sebagai pengamat yang baik, karena mereka pasti memerlukan banyak keterangan untuk dapat menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi tugas kewajibannya.

Proses wawancara kelihatannya berjalan tersendat-sendat. Hal ini disebabkan karena para informan yang pernah dijumpai peneliti dalam lingkungan komunitas kecil yang diteliti hampir-hampir tidak menyadari akan seluk beluk dari sistem komunitas dalam masyarakatnya sendiri. Mereka tidak mengenal konsep-konsep yang tepat untuk berdialog secara berarti dengan pihak peneliti. Maka dari itu mereka tidak banyak yang dapat ditanya secara langsung menurut daftar pertanyaan sebagaimana yang telah dipersiapkan, apalagi di dalamnya banyak sekali menampilkan istilah-istilah yang lazim dipakai dalam ilmu antropologi. Kelemahan dan kemacetan dalam wawancara ini lebih terasa lagi terutama bagi diri peneliti. Namun demikian kehadiran asisten dalam hubungan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, sebab ia cukup banyak menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang tak langsung kepada para informan melalui sistem analisa dan abstraksi dari gejala dan peristiwa yang konkrit dalam hubungan antar kelompok-kelompok kecil yang ada dalam lingkungan komunitas tersebut, sehingga kemacetan jalannya wawancara tidak sampai mengalami kegagalan. Meskipun demikian diakui bahwa di sana sini masih tetap dijumpai keruwetan, misalnya dalam hal memperoleh pengertian yang bulat dan utuh mengenai data yang diinginkan.

Tahap pengolahan data. Setelah data selesai dikumpulkan perlu dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian Sistem Komunitas Kecil. Dalam hubungan ini seyogyanya dituntut suatu kemampuan daya imaginasi dan kreatifitas yang tinggi dari peneliti. Akan tetapi keadaan itu tidak dapat berjalan secara mantap, oleh karena amat dipengaruhi oleh faktor ketiadaan tenaga ahli apalagi dibarengi dengan kurangnya bahan bacaan terutama mengenai kebudayaan daerah ini. Padahal bahan tersebut amat diperlukan bagi mematangkan usaha penelitian topik ini. Hal mana menurut pola penelitian dan petunjuk pelaksanaan yang ada, usaha inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan dalam suatu komunitas kecil merupakan masalah yang luas dan mengandung banyak segi.

Maka dari itu dalam proses pengolahannya mungkin saja di sana-sini akan terdapat suatu data yang tercatat benar, tapi dianalisa secara tidak cermat. Akibatnya hasil yang diperoleh pun menjadi kurang memadai. Namun demikian apa yang telah dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka pengolahan data tersebut adalah merupakan suatu kesungguhan yang maksimal dengan segala kemampuan yang ada padanya.

Tahap penulisan laporan. Untuk dapat menyajikan himpunan data yang telah dikumpulkan, serta diolah tersebut, maka dibuatlah laporan ini dalam bentuk karangan yang tersusun menurut sistematika sebagai berikut :

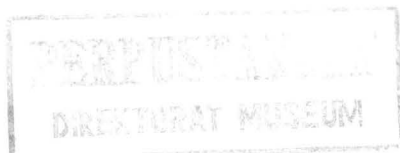
Bab Pertama, Pendahuluan, yang menggambarkan sekitar pelaksanaan penelitian tematis tentang Sistem Komunitas Kecil dari permulaan sampai menghasilkan naskah laporan. Adapun hal-hal pokok yang dikemukakan dalam bab pendahuluan ini ialah tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta prosedur dan pertanggungjawaban ilmiah penelitian.

Bab Kedua dan Bab Ketiga, berturut-turut akan diketengahkan uraian Komunitas Kecil Orang Melayu Jambi dan Komunitas Kecil Orang Kerinci. Di dalam kedua bab tersebut akan terungkap beberapa materi pokok yang seragam yang masing-masing terdiri dari :

Bagian I, Identifikasi, yaitu semacam gambaran umum tentang daerah penelitian sehubungan dengan tema komunitas kecil. Gambaran umum tersebut penguraiannya terbagi ke dalam 3 hal pokok, yaitu lokasi, penduduk dan latar belakang sosial budaya. Oleh karena itu bagian ini akan mengemukakan tentang tempat, gambaran tentang manusianya dan gambaran tentang isi kebudayaan dari manusia itu.

Bagian II, Bentuk komunitas; uraian pada bagian ini akan meliputi beberapa hal, yakni tentang ciri-ciri, struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial komunitas kecil. Dari sudut ciri, akan terlihat tanda-tanda yang menentukan adanya suatu komunitas kecil yang terlukis dalam batas-batas wilayah legitimasi, atribut-atribut, serta ciri-ciri khususnya. Sedangkan tinjauan mengenai struktur dimaksudkan untuk mengetahui apakah daerah itu merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas, ataukah ia sendiri merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas, ataukah ia sendiri merupakan induk daripada beberapa komunitas yang lebih kecil lagi. Selanjutnya kegiatan pemerintahan sudah tentu merupakan perangkat yang harus ada di dalam suatu komunitas kecil yang bertugas mengatur, mengembangkan serta mengawasi masyarakat dalam suatu komunitas, yang kesemuanya itu ikut mewarnai bentuk dari komunitas kecil yang bersangkutan. Gambaran tentang hal ini akan diarahkan pada segi sejarah pertumbuhan pemerintahan, aparat-aparat, hubungan vertikal komunitas itu dengan komunitas yang lebih luas dan hubungan horizontal yang berupa hubungan kerja sama antara aparat-aparat yang ada, maupun hubungan kerja sama antara pemerintahan komunitas kecil yang sederajat.

Suatu bentuk lain yang umumnya ikut mewarnai setiap bentuk komunitas kecil ialah lembaga-lembaga sosial. Oleh sebab itu pada bagian ini akan dicoba pula mengungkapkannya lembaga-lemb-



baga sosial yang terdapat dalam bidang ekonomi, dalam bidang sistem kemasyarakatan dan dalam bidang sistem religi.

Bagian III, Sistem pelapisan sosial; pada bagian ini akan ditinjau dua sifat dari sistem pelapisan sosial yang ada pada komunitas tersebut. Ada pelapisan sosial yang tajam karena didukung oleh hal-hal yang lebih konkrit dan ada pula pelapisan sosial yang tersamar, oleh karena baru merupakan anggapan yang lahir dalam masyarakat, tapi belum diikuti oleh hal-hal yang mewarnai secara jelas lapisan yang ada.

Kedua sifat pelapisan itu melahirkan pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar. Dan keduanya ini akan terurai dalam dua zaman, yaitu masa lalu dan masa kini.

Bagian IV, Pimpinan masyarakat; dalam melukiskan pimpinan masyarakat ini akan diungkapkan beberapa hal, yaitu tentang gambaran umum, pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini.

Uraian tentang *Pimpinan tradisional* maupun pimpinan masa kini lebih bersifat deskriptif dan meliputi baik pimpinan formal maupun pimpinan informal.

Adapun pemakaian istilah tradisional dan masa kini dalam wujud pengertiannya sama saja dengan masa lalu dan masa kini. Akan tetapi karena pimpinan masa lalu itu ada juga yang masih berlangsung sampai saat ini, maka lebih baik dalam hubungan ini dipakai istilah *pimpinan tradisional*. Sedangkan pimpinan masa kini merupakan pimpinan yang lahir dan ada pada masa sekarang.

Bagian V, Sistem pengendalian sosial yang ada di dalam suatu komunitas, agar setiap warga dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pengendalian tersebut ada berbagai cara yang ditempuh, seperti: dengan cara mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut. Kesemuanya itu akan terurai pada bagian ini.

Bagian VI, Beberapa analisa. Dalam bagian ini akan kita jumpai sekedar analisa tentang beberapa hal yang menjadi inti penelitian, ialah tentang bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial.

Organisasi laporan terdiri dari: Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, Komunitas Kecil Orang Melayu Jambi, Komunitas Kecil Orang Kerinci, Indeks, Bibliografi dan Lampiran. Naskah ini ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Pemakaian istilah-istilah daerah setempat dalam penampilannya selalu diikuti oleh arti yang terkandung di dalamnya. Dan segala sesuatu yang ditulis senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah

bahasa serta ejaan tulis yang resmi. Daftar bibliografi disusun di belakang sesudah indeks dan merupakan daftar bibliografi untuk seluruh bab. Daftar tersebut disusun berdasarkan urutan alfabetis pengarang dan setiap publikasi diikuti nama buku, nama penerbit, kota penerbitan dan tahun terbit. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang kutipan-kutipan dan perbandingan informasi yang lebih jelas tentang kutipan-kutipan dan perbandingan dari buku, ditandai di belakang kutipan dan perbandingan itu dengan angka-angka dalam kurung. Angka-angka itu akan berfungsi sebagai nomor urut pada bibliografi beserta nomor halamannya. Kata-kata ataupun istilah-istilah yang terdapat di dalam indeks, adalah merupakan hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan masalah yang digarap. Oleh sebab itu dalam indeks banyak memuat istilah-istilah lokal, nama tempat, nama benda dan lain-lain. Kesemuanya itu disusun sejalan dengan urutan alfabetis pada daftar indeks, serta dibubuhkan pula nomor halaman di mana kata-kata tersebut diketemukan. Di samping itu juga dalam sistem penulisan seberapa perlu mempergunakan ilustrasi berbentuk foto-foto, tabel dan peta. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memperjelas apa-apa yang disebut di dalam teks.

Hasil akhir penelitian. Hasil kerja team peneliti aspek kebudayaan pada komunitas kecil suku bangsa asli daerah Jambi yang terwujud dalam naskah laporan ini baru merupakan kegiatan pertama kali. Selama ini belum pernah diadakan pengumpulan bahan-bahan yang memadai tentang sistem komunitas tersebut yang akan dipergunakan sebagai sumbangsih daerah Jambi dalam rangka ikut membina dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya. Secara ilmiah naskah ini diakui masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya. Salah satu faktor penyebab kelemahan dan kekurangan itu ialah karena ketiadaan tenaga antropolog di daerah ini yang sempat mencurahkan perhatiannya pada pertumbuhan kebudayaan dalam setiap komunitas yang ada. Keadaan seperti itu berakibat bahan keterangan yang lengkap mengenai sistem komunitas dari sesuatu suku bangsa asli daerah Jambi belum pernah diintrodusir kepada para ilmuwan maupun kepada setiap orang yang ingin mengetahuinya.

Mungkin saja para sarjana dan para ilmuwan yang berada di daerah Jambi telah pernah mencoba melakukan penelitian tentang kebudayaan tersebut. Akan tetapi kenyataannya belum dijumpai bahan informasi tertulis yang dipandang cukup berarti mengenai kebudayaan daerah yang bersangkutan. Hal tersebut itu adalah wajar, apabila jika diingat bahwa daerah Propinsi Jambi yang meskipun tidak begitu luas jika dibandingkan dengan daerah-daerah Propinsi lain di Indonesia, tapi di dalamnya cukup banyak suku bangsa dengan aneka ragam kebudayaannya. Di satu pihak kebudayaan mereka itu terancam kepunahan karena aus ditelan masa, sedangkan di pihak lain sulitnya mendapatkan para informan yang sekiranya mampu memberikan keyakinan tentang validitas data yang diberikan. Oleh sebab itu diharapkan pada masa-masa yang akan datang perlu diusahakan pengadaan tenaga-tenaga

antropolog untuk melakukan penelitian mengenai segala aspek kebudayaan pada setiap komunitas yang dikenal di daerah ini. Dengan demikian proses penelitian akan terlaksana secara mantap dan sungguh-sungguh. Kemantapan dan kesungguhan dari pekerjaan tersebut erat sekali hubungannya dengan penyediaan waktu, dana dan fasilitas yang memadai. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut barulah dapat diharapkan bahwa corak kebudayaan pada setiap komunitas kecil daerah Jambi benar-benar menjadi semakin jelas dan selanjutnya akan bermanfaat bagi penyusunan dan penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang kebudayaan.

Berpedoman pada pengalaman kerja penelitian yang pernah diselenggarakan pada tahun-tahun yang lalu, maka pada proses penelitian kali ini juga masih tetap menempatkan faktor-faktor yang ternyata dapat menunjang bagi keberhasilan sesuatu penelitian. Faktor tersebut ialah penunjukan tenaga peneliti yang berasal dari unsur putra daerah Jambi yang tersusun kompak dalam suatu team dengan pembagian kerja yang jelas dan terarah. Pemanfaatan tenaga semacam itu memang terasa banyak menguntungkan dan memperlancar tugas-tugas penelitian, oleh karena sebagian dari sasaran operasional penelitian telah dapat dihayati sehingga dapat mengurangi rintangan dan kemacetan dalam proses pengolahan data dan informasi yang diperoleh. Di samping itu juga perasaan *ethnocentrisme* yang biasanya selalu terbawa-bawa ke dalam cara berpikir seseorang, melalui wadah ini daya imajinasi para peneliti akan terbangkit. Dan pada segi lain ternyata menambah semangat juang mereka untuk menuju ke arah keberhasilan kerja penelitian tersebut.

Harapan kita mudah-mudahan hasil inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan pada komunitas daerah ini akan dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi usaha penelitian lanjutan pada masa-masa yang akan datang.

BAB KEDUA
KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA
MELAYU JAMBI

BAGIAN I
IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan Keadaan Geografis. Daerah Melayu Jambi memiliki dataran rendah yang sangat luas, terbentang dari daerah pedalaman Kabupaten Bungo Tebo sampai ke daerah pantai Kabupaten Tanjung Jabung. Daerah dataran rendah yang luas itu 45% di antaranya merupakan dataran kering, dan 55% lainnya merupakan rawa-rawa, yang ketinggiannya berada antara 1–12,5 meter di atas permukaan laut. Curah hujan per tahunnya berkisar antara 2000 sampai 3000 mm, beriklim tropis, dengan suhu maksimum 30°C. Antara bulan September sampai Maret angin bertiup dari arah barat ke timur. Pada waktu itu terjadilah musim penghujan. Pada bulan April terjadi pergantian musim, dari musim penghujan ke arah musim kemarau. Arah angin dari arah barat ke timur kini terjadi kebalikannya yaitu dari arah timur ke barat. Keadaan semacam ini berlangsung sampai bulan Agustus.

Luas hutan cadangan, iklim dan curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun, serta jalur sungai Batanghari yang membujur dari barat ke timur disertai dengan berpuluh-puluh anak-anak sungai yang menjangkau daerah pedalaman, menjadi ciri khusus dari topografi daerah Melayu Jambi. Kesemua faktor geografi yang strategis itu menguntungkan bagi lalu-lintas perekonomian. Semak-semak belukar, kebun-kebun karet, pohon-pohon rambutan, pohon durian, pohon duku, pohon mangga dan lain-lain merupakan tempat kediaman berjenis-jenis binatang dan margasatwa yang sekaligus merupakan batas antara satu dusun dengan dusun lainnya.

Dusun-dusun dibentuk tidak begitu rapat antara yang satu dengan yang lain. Rumah-rumah sebagai tempat kediaman mereka senantiasa berada di dekat sungai-sungai besar dan kecil. Di antara pinggiran sungai-sungai yang paling ramai didiami orang adalah :

1. *Batanghari*, panjangnya ± 500 km, lebar di daerah Kotamadya Jambi 300 meter, sedangkan di muaranya yaitu di kuala Kampung Laut lebarnya ± 50 meter.
2. *Batang Tembesi*, panjangnya ± 210 km, lebarnya di kota Muara Tembesi ± 250 meter, dalamnya air pada musim penghujan sampai 10 meter, sedangkan pada musim kemarau 5 meter. Sungai ini bermuara ke Batanghari.

3. *Batang Tebo*, panjangnya \pm 100 km, lebarnya di kota Muara Tebo \pm 100 meter, dalamnya antara 5 sampai 7 meter. Sungai ini pun bermuara ke Batanghari.

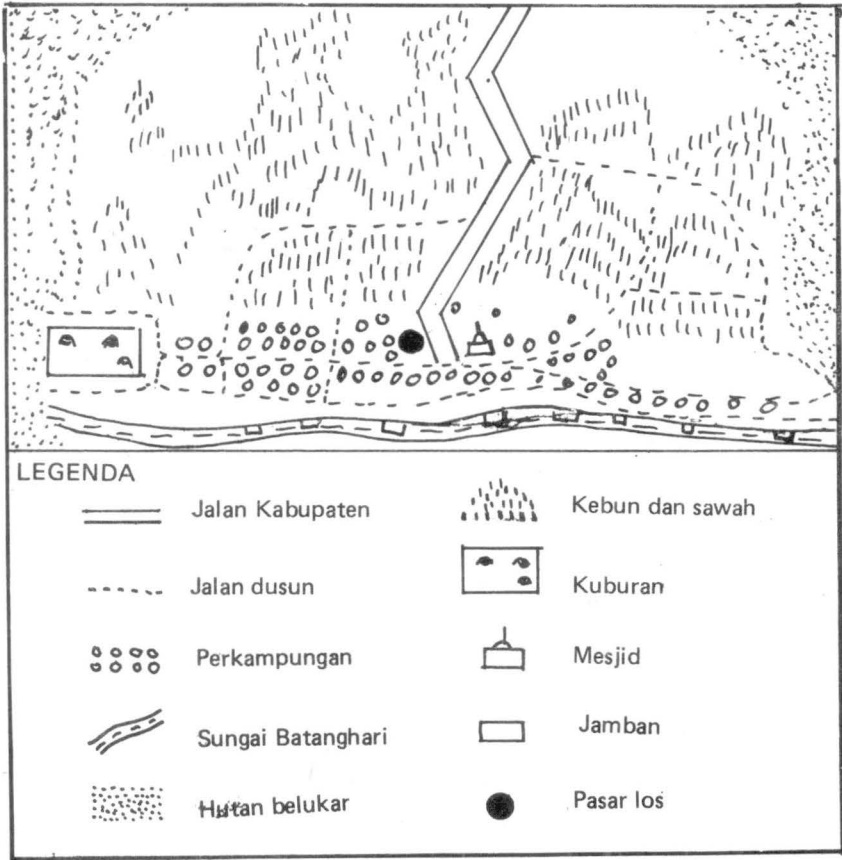
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Batanghari adalah menjadi induk dari semua sungai-sungai yang tersebut di atas, bahkan juga sungai-sungai lainnya dalam daerah ini alirannya bersatu ke sungai Batanghari, kecuali sungai Tungkal dan sungai Mendahara yang langsung bermuara ke Selat Berhala.

Pola perkampungan. Antara dusun-dusun yang bertetangga, komunikasi dilakukan melalui jalan air dan sedikit sekali perhubungan itu yang dapat dilakukan melalui daratan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya daerah-daerah di mana dusun-dusun itu berada, masih dikelilingi oleh hutan, semak belukar atau rawa-rawa lebar. Mesjid ataupun Langgar ditempatkan orang di pertengahan *dusun* di dekat sungai, dengan bentuknya yang khusus memakai pintu yang lebar, berikut menaranya yang tinggi. Mesjid maupun langgar itu selain dipergunakan orang sebagai tempat sembahyang, tidak jarang pula dipakai sebagai tempat mengadakan aktifitas penerangan agama.

Tempat pekuburan biasanya terlihat di sebelah hulu atau di sebelah hilir dusun. Namun demikian pada beberapa tempat ada juga orang membuat pekuburan di belakang dusun. Tapi satu hal yang amat dipentingkan yaitu pekuburan tersebut selalu berada pada lokasi yang agak tinggi dari tempat-tempat lain supaya terhindar dari kemungkinan terendam air apabila terjadi banjir. Kecuali itu terwujudnya tempat pekuburan di pinggir dusun adalah dimaksudkan agar keheningan tempat itu tidak sampai terganggu oleh kebisingan aktifitas dusun. Adapun besar kecilnya areal pekuburan sangat tergantung pada faktor kepadatan penduduk dan angka kematian di dusun tersebut.

Di tengah dusun atau di pinggir sungai ada jalan yang menghubungkan antara pangkal dan ujung dusun. Jalan-jalan itu dibuat oleh warga masyarakat setempat dengan teknik pembuatan yang tradisional, dibangun atas kesepakatan bersama secara kerja bakti yang dipimpin langsung oleh pimpinan adat setempat. Apabila sungai dijadikan prasarana perhubungan, maka orang memerlukan alat angkutan yang bernama *perahu*. Perahu ini terbuat dari sejenis kayu yang bisa diperoleh di hutan-hutan di sekitar pedusunan. Bagi penduduk dusun, perahu tersebut merupakan kebutuhan penting bagi setiap rumah tangga. Oleh karena perahu merupakan jenis alat angkutan kecil, maka ia tidak membutuhkan suatu pangkalan yang besar, tapi cukup menggunakan *jamban kayu* yang dipakai sebagai tempat mandi, mencuci serta membuang kotoran, dengan muatan yang sangat terbatas. Bahkan kadang-kadang jamban itu terwujud dari bangkar kayu yang berderet di tepian sungai di sepanjang dusun. Sungai Batanghari sebagai suatu karunia Tuhan, tidaklah berasal dari buatan manusia dan oleh karenanya siapa saja boleh memanfaatkannya, asal saja hal tersebut tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah membaku ke dalam tata pergaulan hidup setempat.

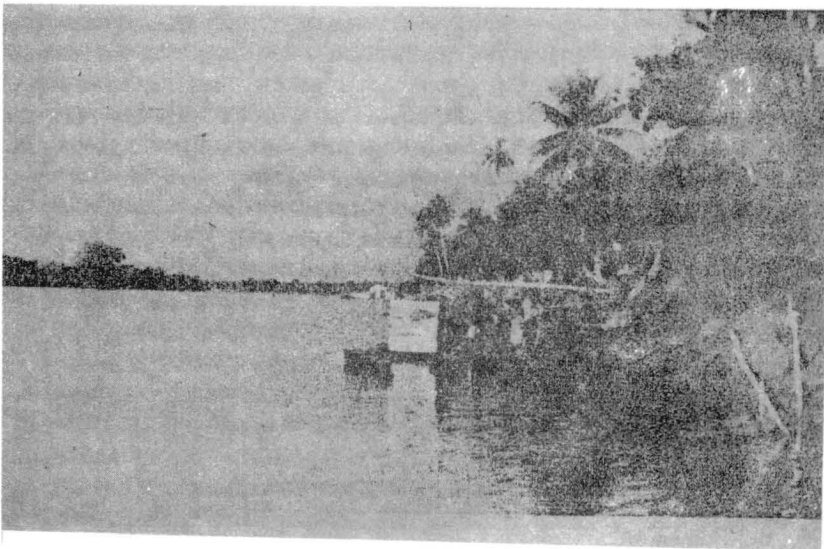
Di daerah pedusunan biasanya selalu terdapat *parit-parit*, yaitu tanah yang digali berukuran antara 40–50 cm dalamnya, atau pagar-pagar yang terbuat dari kayu dan bilah bambu. Parit-parit atau pagar-pagar tersebut punya fungsi yang amat penting, ialah sebagai pelindung bagi berjenis-jenis tanaman yang dilingkari oleh parit atau pagar itu dari gangguan hewan-hewan peliharaan penduduk. Selain daripada itu ia juga berguna sebagai tanda sempadan atau batas tanah hak milik seseorang dengan orang lain. Pada waktu siang hari bila hewan peliharaan seseorang sampai merusak tanaman orang lain padahal tanam-tanaman itu sudah diberi pagar, berarti menurut adat tanam-tanaman itu belum dipagari secara sempurna. Maka dari itu kerugian yang diderita oleh



Gambar 1:
Pola perkampungan orang Melayu Jambi.

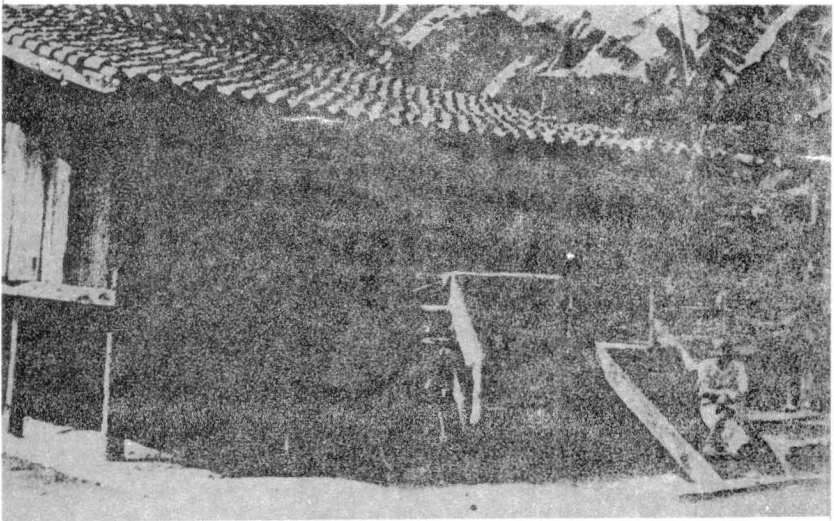
pemilik tanaman tiada dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan adat. Sebaliknya bila tanaman tersebut dimakan atau dirusak oleh hewan peliharaan pada waktu malam hari, maka si empunya hewan peliharaan tersebut oleh adat dituntut untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu dalam kehidupan orang Melayu Jambi sangat dikenal seloka adat yang berbunyi: "Ternak berkandang malam, tanaman berkandang siang." Para *liit* yaitu anggota permusyawaratan adat yang menjadi partner Kepala dusun yang keanggotaannya terdiri unsur-unsur alim ulama cerdik pandai, tua tengganai sekaligus berfungsi sebagai penasehat hukum di dalam komunitas itu. Oleh karena itu mereka tahu betul akan seluk-beluk pelanggaran adat seperti di atas. Adakalanya tanda sempadan dipergunakan orang pohon-pohon pinang atau pohon kapas yang ditanam berbaris teratur dari satu arah ke arah yang lain. Keadaan seperti itu menunjukkan garis pemisah antara tanah hak masing-masing.

Di atas telah disinggung bahwa *perahu* yang digunakan sebagai alat angkutan, berpangkalan di jamban tempat orang mandi. Jamban-jamban yang terdapat di sepanjang tepian sungai itu diberi bersekat tiga. Masing-masing sekat berfungsi sebagai kamar mandi, ruang mencuci dan kamar kecil (WC). Pada dasarnya sebuah jamban adalah milik dari sebuah rumah tangga. Akan tetapi karena sempitnya lokasi yang disebut *tepiian*, maka tidak jarang untuk setiap jamban dimanfaatkan oleh beberapa buah keluarga atau oleh mereka yang bertetangga.



*Gambar 2 :
Jamban orang Melayu Jambi yang berada di sungai Batanghari
yang sekaligus dipergunakan sebagai pangkalan perahu*

Rumah-rumah pedusunan dibangun di tepi sungai, dihadapkan ke tepi-an sungai. Pada bagian lain ada juga rumah-rumah yang dibangun menghadap ke jalan raya atau jalan dusun. Yang disebut belakangan ini hanya terjadi pada rumah-rumah yang kebetulan berada pada lapisan tengah atau lapisan belakang. Pada umumnya rumah orang Melayu Jambi dibangun di atas tiang-tiang yang berukuran tinggi 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Sehingga untuk dapat masuk atau baik ke rumah tersebut orang melengkapinya dengan tangga yang terbuat dari papan/kayu, dipasang di muka pintu rumah dengan bilangan anak tangga antara 5 sampai 9 potong. Konon rumah-rumah itu sengaja dibuat tinggi, guna menghindari gangguan dari binatang-binatang liar, atau menghindari ancaman bahaya banjir yang pasti datang pada setiap musimnya yaitu sekali setahun melanda dusun.



*Gambar 3 :
Bentuk rumah-rumah penduduk asli Melayu Jambi.*

Di daerah pedusunan orang Melayu Jambi hampir tidak terdapat bukit-bukit yang tinggi, kecuali di sana-sini tampak jalan yang agak mendaki. Namun pada tepian sungai tanahnya landai dan datar. Bangunan tanpa dinding yang disebut *pasar los* terdapat di pinggir jalan raya di penghujung atau di tengah dusun dengan ukuran yang cukup besar sehingga dapat menampung antara 50 sampai 100 orang penjual barang-barang dagangan. Pasar tersebut hanya dikunjungi orang sekali dalam seminggu dan pada hari tertentu terjadilah transaksi jual-beli antara pedagang dengan pihak konsumen. Penduduk menyebut hari itu ialah *hari kalangan*, yang oleh orang Minangkabau disebut hari pasar (5, 53).

PENDUDUK

Sebagai daerah yang berpenduduk tipis, tapi wilayahnya cukup luas, serta potensi alam yang besar memberi peluang kepada para pendatang untuk mencari atau memilih mata pencaharian di daerah Melayu Jambi. Adanya kenyataan semacam itu menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk. Bertambah besarnya jumlah penduduk di daerah ini selain karena kelahiran juga melalui transmigrasi. Dari sinilah timbulnya golongan penduduk atau suku bangsa lain dalam lingkungan daerah Melayu Jambi. Maka dari itu selain dari penduduk asli Melayu Jambi, ada pula orang-orang dari suku bangsa lain, di antaranya ialah orang-orang Palembang, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar dan orang Minangkabau. Suku-suku bangsa yang disebut belakangan ini banyak bertempat tinggal atau dijumpai di daerah ibu kota Kabupaten terutama dalam Kotamadya Jambi. Bahkan dalam kota ini ada pula golongan penduduk pendatang *keturunan asing*, seperti Cina, India, Arab dan lain-lain.

Adapun yang menjadi tempat pemukiman orang Melayu Jambi meliputi daerah Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batanghari, Kotamadya Jambi dan Kabupaten Bungo Tebo. Sumber kehidupan dan kebahagiaan mereka adalah dari hasil perkebunan karet, bercocok tanam baik di ladang maupun di sawah, berkebun dan menangkap ikan.

Orang-orang Melayu Jambi yang mendiami daerah tersebut di atas sekaligus adalah menjadi penduduk asli dari kesultanan Jambi pada masa ± 70–80 tahun yang lalu. Pada zaman kesultanan dahulu mereka itu dibagi atas 12 *kalbu*, tapi bukan dalam pengertian etnis, melainkan hanya merupakan pengelompokan atas dasar kategori kedudukan kelompok masing-masing. Maka dari itu nama-nama kalbu tersebut disesuaikan menurut fungsi dari tiap-tiap kalbu dalam posisinya sebagai pendukung dan pembela kehormatan kerajaan. Demikian seperti dusun Muaro Jambi dan sekitarnya memikul tanggung jawab keamanan dan pertahanan, sehingga ia disebut kalbu *Maro Sebo*.

Dusun Lubuk Ruso dan sekitarnya berfungsi sebagai pengayom atau pemaung kerajaan. Oleh karena itu kalbu mereka disebut *Pemayang*.

Secara lengkap urutan dari 12 kalbu tersebut, ialah: Jebus, Penagan, Pemaung, Maro Sebo, Petajin, Tujuh Koto dan Sembilan Koto, Awın, Mestong, Serdadu, Kebalen, Air Hitam dan Pinakawan Tengah (8, 12).

Oleh karena sejak dahulu hingga saat ini belum pernah diadakan cacah jiwa secara khusus terhadap orang-orang Melayu Jambi, maka pada naskah laporan ini tidak dapat ditulis jumlah anggota masyarakat tersebut. Namun demikian sekedar pegangan sementara kita dapat berpedoman pada suatu perkiraan yang didasarkan pada hasil registrasi penduduk tahun 1976, dengan catatan 84%, adalah orang Melayu Jambi, sebagai subyek pendukung kebudayaan yang dimaksud dalam bab ini dan sisanya 16% adalah terdiri dari suku-suku bangsa pendatang, baik orang Indonesia maupun orang asing. Tempat kediaman orang Melayu Jambi tersebar dalam beberapa Kecamatan

di lingkungan 4 buah daerah Tingkat II dan berada di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari, yang pada tahun 1976 berjumlah \pm 391.575 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK ASLI MELAYU JAMBI
MENURUT LOKASINYA TAHUN 1976 (11, 34)

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk seluruhnya (100%)	Jumlah penduduk asli (84%)
1.	Kotamadya Jambi		
1.	Danau Teluk	8.917	7.490
2.	Pelayangan	10.297	8.627
3.	Pasar Jambi	11.597	9.741
	Batanghari		
4.	Sekernan	25.592	21.497
5.	Muara Bulian	40.775	34.251
6.	Muara Tembesi	19.680	16.531
7.	Jambi Luar Kota	64.672	54.324
	Bungo Tebo		
8.	Tebo Ulu	29.137	24.475
9.	Tebo Tengah	23.927	20.009
10.	Tebo Ilir	15.390	12.928
11.	Tanah Tumbuh	45.292	38.045
	Tanjung Jabung		
12.	Nipah Panjang	80.883	67.942
13.	Muara Sahak	90.030	75.625
	Jumlah	466.189	391.575

Sumber : Hasil pengolahan data yang berasal dari Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi 1979.

Dalam hal *mobilitas* penduduk asli dapat dikatakan bahwa *mobilitas* orang Melayu Jambi relatif rendah jika diukur dan dibandingkan dengan *mobilitas* suku bangsa lain dalam daerah Jambi seperti suku Kerinci yang akan diuraikan dalam bab ketiga dari naskah ini. Perwujudan *mobilitas* yang relatif rendah itu antara lain sebagai akibat daripada rendah serta kurangnya mutu dan kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat orang Melayu Jambi pada masa lampau. Kenyataan tersebut memang tidak dapat dimungkiri oleh karena lamanya daerah ini dalam kemelut peperangan membendung kekuatan serdadu-serdadu Belanda yang berusaha mencaplok daerah ini untuk dijadikan daerah jajahan sebagaimana dialami oleh daerah-daerah lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pembangunan pen-

didikan di daerah tersebut. Amat dirasakan bahwa sedikit sekali terjadi perubahan yang berarti bagi masyarakat orang Melayu Jambi yang mengurus ke arah perbaikan nasib ataupun keadaan sosial ekonomi mereka. Beberapa bagian dari mereka, sudah merasa puas dengan apa yang telah mereka punyai, atau sama sekali tidak melihat bagaimana cara untuk merubah keadaan yang demikian itu kepada keadaan yang lebih ideal.

Angka resmi tentang jumlah penduduk pendatang dalam daerah Melayu Jambi yang didasarkan kepada registrasi penduduk tahun 1976 tidak diketemukan, namun demikian angka-angka yang mendekati angka sebenarnya dapat kita peroleh dengan cara merumuskan data yang tercantum dalam tabel 1 di atas secara acentrario, yaitu 16% dari jumlah penduduk daerah Jambi seluruhnya, adalah penduduk asli Melayu Jambi, lebih jauh lihat tabel 4 di sebelah.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK PENDATANG
DI DAERAH MELAYU JAMBI 1976

No.	Kabupaten/Kodya/Kecamatan	Penduduk pendatang
1.	Kotamadya Jambi (Danau Teluk, Pelayanan dan Pasar Jambi)	4.931
2.	Batanghari (Sekernan, Muara Bulian, Muara Tembesi, dan Jambi Luar Kota)	24.116
3.	Bungo Tebo (Tebo Ulu, Tebo Tengah, Tebo Ilir, dan Tanah Tumbuh)	18.119
4.	Tanjung Jabung (Nipah Panjang dan Muara Sabak)	27.345
	J u m l a h	74.511

Sumber : Hasil pengolahan data yang berasal dari Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi 1979.

Secara kasar penduduk pendatang di daerah Melayu Jambi terdiri dari dua bagian besar, masing-masing orang-orang Indonesia dari luar daerah ini, antara lain orang Jawa, orang Sunda, orang Minangkabau, orang Palembang, orang Banjar, dan lain-lain. Yang lainnya adalah penduduk pendatang keturunan asing, seperti Cina, India, dan Arab. Orang-orang pendatang suku Jawa dan suku Bugis pada umumnya bertempat tinggal menyebar di daerah pedusunan atau di pinggiran kota, mengusahakan pertanian secara besar-besaran. Dari hasil kerja keras yang penuh perhitungan itu banyak di antara mereka yang menjadi kaya, dan mengalihkan usahanya dari bercocok tanam kepada

membuka industri kecil seperti penggilingan padi dan membuka usaha niaga di kota-kota kecil. Lain halnya dengan orang Palembang, orang Banjar, dan orang Batak, kebanyakan bertempat tinggal di kota-kota atau di ibukota kabupaten. Mereka hidup dan menjadi kaya dengan jalan berdagang. Orang Minangkabau merupakan pendatang yang paling lengkap, mereka menyebar di seantero tempat, di dusun-dusun di kota-kota kecil, dan di ibukota kabupaten dengan lapangan pekerjaan yang bermacam-macam. Ada yang berdagang, ada yang menjadi tukang bangunan, tukang jahit, tukang cukur rambut, menjadi sopir mobil dan lain-lain. Bagi orang Melayu Jambi sebagai penduduk asli, mungkin sebagai akibat hidup yang dimanja-manjakan oleh pemerintah Hindia Belanda masa lalu, gerak yang mengarah kepada perbaikan nasib, walaupun sudah ada akan tetapi keadaannya masih rendah sekali. Di beberapa dusun sudah terlihat wajah-wajah muda yang telah memiliki seperangkat harta kekayaan seperti punya motor-motor boat, rumah-rumah besar, punya pengergajian papan, punya mobil bahkan ada yang telah mengerjakan haji sampai dua atau tiga kali, di samping yang berhasil mendapat gelar kesjarjanaaan di berbagai perguruan tinggi.

Antara penduduk asli Melayu Jambi, dengan penduduk daerah bertetangga seperti orang Minangkabau, orang Palembang dan orang Riau sejak lama sekali telah terjalin hubungan kebudayaan. Sebagai akibat dari persentuhan tersebut, terjadilah apa yang disebut *akulturasi kebudayaan*. Contoh nyata dari hal tersebut terdapat dalam kehidupan sehari-hari di dalam komunitas-komunitas kecil, apakah itu menyangkut adat istiadat, atau sendi-sendi keagamaan.

Dusun Muara Jambi yang terletak di pertengahan panjangnya sungai Batanghari, merupakan dusun yang dapat mewakili dusun-dusun lain di lokasi orang Melayu Jambi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari informan memberikan gambaran bahwa di dusun ini terdapat beberapa orang penduduk pendatang keturunan Indonesia dan tidak terdapat penduduk pendatang keturunan asing. Jumlah penduduk dusun Muara Jambi seluruhnya \pm 2115 jiwa, dengan pembagian menurut tingkat umur dan pendidikan sebagai berikut : Yang berumur 40 tahun ke atas 495 jiwa, 13—40 tahun 1116 jiwa, dan 0—13 tahun 504 jiwa. Klasifikasi pendidikan adalah tidak pernah bersekolah sama sekali 335 jiwa, berpendidikan Sekolah Dasar 1081 jiwa, Sekolah Lanjutan Pertama 583 jiwa, Sekolah Lanjutan Atas 107 jiwa dan sampai di Perguruan Tinggi 9 orang. Dari 2115 jiwa penduduk dusun tersebut kurang lebih 1850 jiwa adalah penduduk asli, atau yang telah menetap di daerah ini mulai dari nenek moyangnya.

Pekerjaan mereka pada umumnya adalah sebagai petani yang hidup dari hasil cocok tanam, atau sebagai petani yang hidup dari hasil menangkap ikan di sungai atau di danau. Dalam jumlah yang kecil ada juga yang hidup dari hasil perdagangan, terutama mereka yang banyak bergaul dengan pihak lain, seperti dari kotamadya Jambi, cara berpikir mereka ada juga yang dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang kota.

Situasi pendidikan mereka sama sekali belum dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang telah sempurna, karena masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana wajarnya sebagai dusun yang menjadi ibu marga dari komunitas kecil ini. Wadah kerja pendidikan formal yang ada hanya 1 buah SD peninggalan pemerintah Hindia Belanda, dan 1 buah SD Inpres dan 1 buah Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak atau pemuda-pemudi yang telah/akan meneruskan sekolah ke Sekolah Lanjutan Pertama, Lanjutan Atas baik Umum maupun Agama haruslah mengusahakannya di kotamadya Jambi, atau kota-kota lain baik dalam atau di luar Propinsi Jambi.

Penduduk pendatang di dusun ini yang ada hanyalah penduduk yang berkebangsaan Indonesia dari daerah lain, seperti: orang-orang Minangkabau, orang Jawa atau penduduk lokal Propinsi Jambi dari suku lainnya. Jumlah mereka kecil sekali yaitu berkisar antara 50 sampai 100 orang. Penduduk pendatang keturunan Cina, India, Arab atau lain-lainnya tidak dijumpai sama sekali. Kedatangan orang-orang tersebut, kebanyakan adalah untuk mencari nafkah hidup bagi keluarga seperti membuka pertanian, perkebunan pisang, perkebunan jeruk dan bertanam padi. Di samping itu ada juga yang menjadi guru-guru sekolah, pegawai PSK dari Kanwil Departemen P dan K Propinsi Jambi, tukang jahit, dan lain-lain.

Pandangan penduduk asli terhadap pendatang, senantiasa didahului dengan beberapa prasangka. Pada masa lampau prasangka tersebut ada yang negatif, di mana orang pendatang dipandang sebagai saingan dalam beberapa hal yang menyangkut ekonomi, sosial dan politik. Dewasa ini keadaan menentukan lain, antara pendatang dengan penduduk asli sudah bergaul dengan intim satu dan lainnya. Banyak lapangan mata pencaharian yang mereka kerjakan bersama-sama. Salah satu contoh *tukang bangunan* yang sudah berpengalaman dalam membangun/mengerjakan sesuatu pekerjaan bangunan, tidak lagi membawa pembantu-pembantunya dari tempat lain, akan tetapi memanfaatkan tenaga-tenaga yang tersedia di dusun itu. Demikian pula halnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Misalnya laki-laki atau wanita suku Batak sudah terbiasa mencuci pakaian dan mandi bersama-sama pada sebuah *hamban* di tepian mandi kepunyaan orang-orang dusun.

Walau tidak resmi sebenarnya pada orang Melayu Jambi berlaku prinsip *indogami* desa. Rata-rata keluarga menginginkan sesuatu perkawinan berlangsung sama-sama sedusun. Walaupun demikian, terhadap perkawinan yang menyimpang dari yang mereka inginkan seperti terjadi hubungan perkawinan antara pendatang dengan penduduk asli, sering pula menimbulkan kesan-kesan yang kurang puas di hati masyarakat. Lebih-lebih bila pendatang itu berasal dari sesuatu suku yang selama ini mereka nilai berada di bawah martabat mereka. Perasaan kurang puas di hati masyarakat acapkali menjelma dalam bentuk perlakuan yang kurang bersahabat, terkecuali si pendatang itu sendiri memiliki sesuatu yang dapat menutupi rasa kecewa masyarakat, umpamanya seorang kiyai, terpelajar, hartawan, atau bangsawan. Sebagai

akibat dari pandangan masyarakat yang demikian itu maka perkawinan antara penduduk pendatang relatif jarang terjadi. Sebabnya antara lain orang merasa berat untuk melanggar ikatan batin sesama mereka, yang masih diikat oleh tali kekerabatan.

Obyek pekerjaan; antara penduduk asli dan pendatang pada dasarnya tidak ada perbedaan. Penduduk pendatang tahu pasti bahwa harga dirinya sangat ditentukan oleh keberhasilannya di daerah mana ia bermukim. Mereka bekerja lebih tekun, ulet dan tabah, disertai pemakaian taktik dan teknik yang sempurna. Oleh karena itu mereka lebih berhasil. Banyak di antara mereka yang sudah menjadi kaya raya dan hidup bahagia. Lain halnya dengan penduduk asli, sebagian besar bekerja tanpa rencana, terpaku kepada kebiasaan lama, tanpa dukungan kehendak yang keras disertai kekurangan pengetahuan dan teknik, maka mereka jauh tertinggal di belakang barisan para pendatang-pendatang keturunan asing. Mereka masih tetap miskin, bodoh dan statis, seakan-akan menjadi tamu di dalam rumahnya sendiri.

Partisipasi penduduk pendatang dalam *kegiatan sosial* cukup besar. Pada umumnya mereka amat peka dengan masalah sosial. Banyak yang menjadi penganjur dan memelopori berbagai bidang kegiatan sosial, di samping banyak pula yang menyumbangkan bantuan dalam bentuk material dan moral yang berasal dari pribadinya. Banyak di antara mereka yang menjadi Panitia atau Pengurus dari pembangunan perguruan Swasta seperti madrasah-madrasah, taman kanak-kanak, surau-surau, dan memperbaiki sarana perhubungan serta berbagai jenis kegiatan sosial lainnya. Hal ini mereka lakukan biasanya didorong oleh beberapa sebab, di antaranya, merasa terpanggil oleh tuntutan sejarah, bahwa sebagai pendatang yang bermoral luhur ia ingin masyarakat mencatat namanya sebagai salah seorang yang pernah berbakti kepada daerah ini, atau memang atas dasar tulus ikhlas karena Allah taala, dengan mengharapkan pahala dari yang Mahakuasa. Yang lainnya ingin mendapat perhatian atau penghargaan dari pihak penguasa setempat, mungkin juga terdorong melihat keadaan yang sangat memerlukan hal tersebut tanpa apa-apa sama sekali.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah orang Melayu Jambi, belum dapat diketahui secara jelas karena ketiadaan kepustakaan yang dapat menerangkan yang agak jauh ke belakang. Hanya ada beberapa keterangan sekelumit yang menjelaskan apa sebab orang-orang di daerah ini menyebut Komunitasnya "*Marga*" dan pemimpinnya disebut "*Pasirah*". Di muka secara singkat sudah diterangkan bahwa orang Melayu Jambi merupakan inti dari Kesultanan Jambi pada masa sebelum kedatangan penjajahan, yang terbagi ke dalam 12 kalbu, mendiami berbagai teluk dan rantau di sepanjang tepian sungai *Batanghari* yang panjang itu. Setiap dusun mempunyai nama sendiri-sendiri, kalau kebetulan dusun itu terletak di satu teluk yang di dekat itu ada batang kayu yang ber-

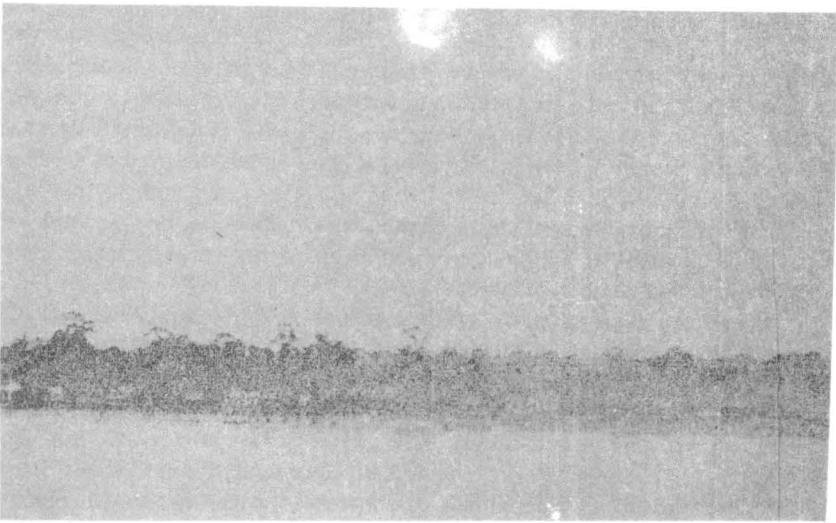
nama leban, maka dusun tersebut oleh mereka yang pertama membangunnya diberi nama "Teluk Leban", dan kalau di dekat dusun itu ada rantau yang panjang serta besar, maka dusun tersebut diberi nama "Rantau Gedang". Masing-masing dusun punya pemimpin sendiri-sendiri. Pemimpin pucuk dari dusun tersebut disebut Penghulu/kepala dusun. Dusun-dusun ini secara administratif berada di bawah perintah pejabat tunggal yang disebut Asisten Demang. Sekitar tahun 1927 terjadi pergeseran status pemerintahan di tingkat yang paling bawah, di mana jabatan Asisten Demang ditiadakan, dengan maksud membuka kesempatan bagi pemimpin-pemimpin adat/kepala dusun secara terbatas mengenal atau mempelajari cara-cara berpemerintahan yang lebih moderen. Untuk kelancaran roda pemerintahan itu sendiri maka diangkatlah salah seorang di antara pemimpin-pemimpin adat atau penghulu itu memikul tugas sebagai badan yang memikul dua tanggung jawab. Di satu pihak ia sebagai koordinator atau pemimpin tertinggi di kalangan kepemimpinan adat di dalam komunitasnya, di lain pihak ia berfungsi membantu menjalankan roda pemerintahan setempat. Administrator baru ini lalu diberi gelar "Pasirah" dengan wilayah kerjanya mencakup beberapa buah dusun yang masih satu suku (kalbu). Setelah Indonesia merdeka, istilah kalbu tersebut, lalu diganti dengan sebutan marga sebagai ganti istilah *distrik* dalam bahasa Belanda. Hingga naskah ini ditulis belum ada kesatuan pendapat mengenai istilah Pasirah. Secara spekulasi banyak yang mencoba-coba memberi arti dari istilah tersebut, tetapi bukannya membantu memperjelas persoalan justru malah sebaliknya tambah mengacaukan.

Berbicara tentang latar belakang sejarah lokasi orang Melayu Jambi, harus dilihat mulai zaman orang belum engenal dunia teknologi masa kini, di mana lalu-lintas perhubungan harus melalui sungai, dengan *alat angkutan* seperti rakit dan perahu-perahu. Konon menurut riwayatnya orang Melayu Jambi berasal dari muara sungai Batanghari di Kampung Laut, atau dari muara sungai Batanghari yang berada di Ujung Jabung dan Kuala Lada. Secara berangsur-angsur penduduk daerah muara sungai ini pindah menuju arah ke hulu sungai, dengan menggunakan alat angkutan perahu atau alat lain yang sangat bersahaja. Dalam perjalanan, mereka menemui sesuatu lokasi yang mereka pandang cocok untuk melanjutkan kehidupan. Lalu mereka bangunlah tempat itu menjadi tempat menetap. Mereka mulai bercocok tanam dengan cara membuka hutan. Sementara itu mereka masih tetap memelihara hubungan dengan keluarga induk mereka secara rutin dan kontinu. Jalur perhubungan yang telah tersedia sebagai kurnia dari Yang Maha Kuasa satu-satunya ialah sungai *Batanghari*. Oleh karena itu mereka selalu berada dan membuat tempat menetap di pinggiran sungai.

Perkembangan penduduk sebagai akibat daripada perkawinan dan adanya pendatang-pendatang baru, mengharuskan mereka memperluas kampung halaman mereka atau membangun *dusun* baru sebagai tambahan. Lama-bat laun ramailah tepian Batanghari dengan dusun-dusun yang senantiasa

berkembang itu. Dusun-dusun yang tadinya hanya terdiri dari 5 atau 6 buah **pondok**, yaitu tempat perlindungan sederhana, secara evolusi **berkembang** menjadi **dusun-dusun** besar dan kota-kota yang berjejer mulai dari Kampung Laut di **Kabupaten** Tanuung Jabung sampai ke Tanjung Samalidu di **Kabupaten** Bungo Tebo.

Mata pencaharian utama bagi daerah ini sangat ditentukan oleh faktor kemampuan atau kesanggupan berusaha. Sebagai daerah yang cukup luas dengan potensi alam yang besar, sudah tentu setiap orang dapat memperoleh sumber mata pencaharian. Bagi *penduduk asli* yang turun-temurun di daerah ini mengutamakan hidup dari hasil usahanya sendiri, atau dari harta pusaka yang mereka warisi dari orang tua mereka, seperti kebun karet, tanah persawahan, ternak-ternak peliharaan dan perdagangan.



*Gambar 4 :
Sungai Batanghari dengan latar belakang rumah-rumah penduduk
yang berjejer di sepanjang tepian*

Bagi *penduduk pendatang*, seperti orang-orang Minangkabau, banyak di antara mereka yang hidup dari berkedai nasi, membuka toko-toko manisan, menjadi tukang jahit pakaian, tukang cukur rambut, mereparasi sepatu dan lain-lain. Orang-orang Jawa banyak yang membuka kebun-kebun kelapa, menanam padi, mengusahakan industri batu bata dan genteng atau menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Orang-orang Bigis

yang terkenal berani memikul resiko, membuka daerah-daerah rawa-rawa atau payo-payo untuk dijadikan kebun-kebun tersebut mereka jual ke pasar. Mereka bekerja sangat ulet dan berani. Banyak rawa-rawa liar yang mereka sunglap menjadi tempat kediaman baru yang ramai, seperti yang terlihat di daerah Kabupaten Tanjung Jabung dan Kabupaten Batanghari. Sedang bagi penduduk pendatang orang asing yang kebanyakan menetap di Kotamadya Jambi, misalnya orang Cina, mempunyai mata pencaharian yang sangat dominan yaitu berdagang. Kecuali itu ada juga di antara mereka yang hanya berusaha membuka kebun sayur-mayur serta memelihara ternak babi.

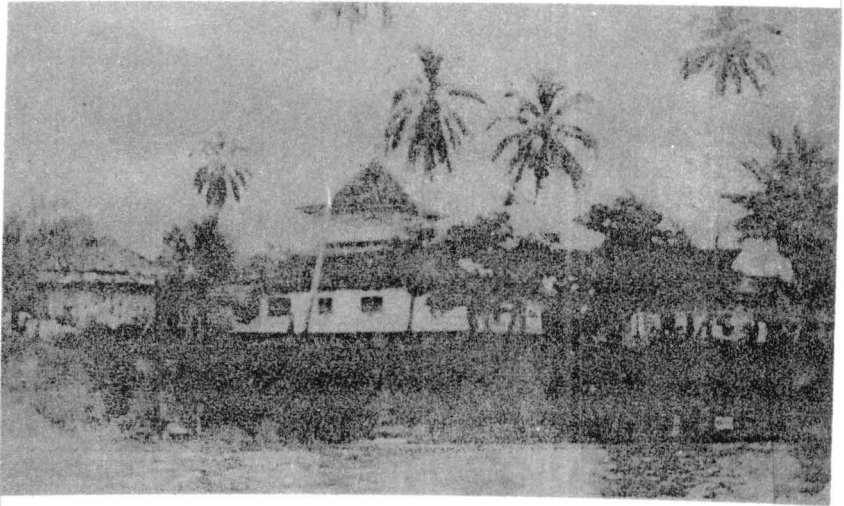
Bentuk keluarga inti bagi orang Melayu Jambi selalu bersendi pada keluarga batih yang berdasarkan *monogami*, oleh karena hanya ada satu orang suami dan satu orang istri sebagai ayah-ibu dari anak-anak. Adapun peranan dari anggota keluarga inti tersebut secara garis besar terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama merupakan kelompok di mana si individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesama mereka, serta adanya keamanan di dalam hidup. Yang kedua merupakan kelompok di mana si individu itu waktu ia sebagai kanak-kanak masih belum berdaya memperoleh pengasuhan dan permulaan dari pendidikannya. Ketiga, menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan, dan keempat, ialah sebagai kesatuan di dalam masyarakat yang melakukan usaha-usaha produktif, seperti bertani di ladang ataupun di sawah.

Pada segi lain ternyata pula bahwa bentuk dan peranan anggota keluarga luas senantiasa didasarkan pada keluarga luas useirilokal dengan menerapkan *adat menetap* secara matrilokal. Oleh sebab itu tidak jarang terlihat dalam sebuah rumah dihuni oleh suatu keluarga batih senior dengan keluarga-keluarga batih dari anak-anak wanita. Mereka merupakan satu kesatuan sosial yang erat, serta mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan.

Orang Melayu Jambi seratus proses memeluk agama Islam. Di dalam faham dan itikad menganut faham ahlussunnah waljamaah dan di dalam syariat/ibadat mereka mengikuti mazhab Imam Syafei. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan agama pada setiap dusun dan bahkan di RT-RT selalu tampak berdiri bangunan mesjid atau surau-surau, di samping madrasah dan tempat-tempat pengajian, lengkap dengan para alim ulama yang bergerak sebagai *Da'i* atau juru dakwah di bidang agama Islam. Konon menurut catatan, pernah ada seorang atau sekelompok ulama yang memberikan fatwa suatu aliran lain dari keyakinan masyarakat Melayu Jambi, yaitu aliran yang bersifat kebathinan. Akan tetapi segera ditolak dan dimusuhi oleh masyarakat setempat oleh karena mereka telah internalized dengan ajaran Islam, sehingga tahu benar akan kekeliruan yang disampaikan oleh *Da'i* tersebut. Juru dakwah senacam itu dipandang oleh masyarakat sebagai telah menempuh jalan sesat dan akibatnya akan menyesatkan orang lain.

Pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat orang Melayu Jambi sudah sedemikian rupa sehingga agak sukar untuk menentukan batas yang

pasti antara norma agama dengan norma adat. Keduanya saling isi mengisi dan saling melengkapi, baik dalam berpikir, dalam berbuat maupun dalam berhubungan dengan sesamanya. Misalnya, dalam cara berpikir, masyarakat dapat mempergunakan pertimbangan akal yang sehat, berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, lapang dada dan senantiasa menyandarkan sesuatu kepada Kemahakuasaan Sang Pencipta yaitu Allah.



Gambar 5 :

Mesjid sebagai lambang kesuburan agama Islam selalu terlihat di setiap dusun-dusun orang Melayu Jambi

Begitu pula dalam berbuat sesuatu, orang akan melakukannya setelah segala sesuatunya itu menurut pendapatnya sudah tidak menyalahi tuntutan agama Islam. Sebagai contoh, sedikit sekali orang Melayu Jambi yang mau meminum minuman keras, meskipun ada sementara orang yang berpendapat bahwa "bir" dan "anggur" mengandung khasiat yang dapat membuat badan menjadi kuat dan sehat. Mereka lebih suka hidup dalam kondisi tubuh yang biasa saja, asalkan tidak melanggar perintah Tuhan, daripada sehat dan kuat, tetapi selalu berada dalam kemurkaan Tuhan.

Selanjutnya di dalam segi yang lain seperti dalam tata cara berhubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, atau antara kelompok yang

satu dengan kelompok yang lainnya nampak sekali pengaruh agama Islam. Hubungan suami dan istri, hubungan antar keluarga, semua sudah berpolakan kepada ajaran agama Islam. Hubungan antar keluarga yang masih sama-sama tinggal dalam satu dusun, tak ubahnya sebagai suatu keluarga luas yang menjalankan kesatuan ekonomi dengan jalan saling tolong menolong atau bergotong royong tanpa ada paksaan dari sesuatu kekuasaan yang berkuasa. Hal itu didasarkan kepada perasaan ikhlas dan semata-mata karena Allah, karena mereka yakin benar bahwa Allah senantiasa mengetahui setiap apa saja yang mereka perbuat, dan setiap amal yang baik itu akan menerima ganjaran yang baik pula.

Jenis kepercayaan lain, selain kepercayaan kepada kekuasaan dan kebenaran Allah yang didasarkan kepada iman dan Islam, tidak terdapat pada masyarakat orang Melayu Jambi, kecuali semacam perbuatan yang seolah-olah mempersekutukan Tuhan dengan makhluk yang dijadikanNya seperti Jin dan Syetan-syetan. Hal itu terlihat dalam bentuk meminta sesuatu kekuatan atau perlindungan, seperti menggunakan ketangguhan seorang dukun untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kemalangan-kemalangan yang dialami oleh seseorang atau beberapa orang. Pasangan suami istri yang sudah lama menikah akan tetapi belum memperoleh keturunan, biasanya berusaha mendapatkan dukun yang kenamaan untuk diminta pertolongannya. Pada umumnya dukun-dukun yang memberi pertolongan dalam bidang ini menggunakan pengaruh atau kebolehan makhluk-makhluk halus yang dijadikan *akuan* (pemujaan yang bersifat pribadi). Jumlah mereka sukar diketahui karena si pelaku perbuatan ini adalah mereka yang juga beragama Islam, hanya secara akidah mereka masih belum seluruhnya mau melepaskan kepercayaan lama sebagai warisan dari keyakinan masa lampau. Walau secara kenyataan belum pernah ada pembuktian, namun masyarakat masih banyak percaya bahwa ada manusia bisa merubah wujud dirinya menjadi harimau baik prosesnya terlebih dahulu melalui kematian (re-inkarnasi), atau tanpa melalui kematian. Di sepanjang aliran sungai Batanghari di seantero dusun orang mengenal nama *Sudagar kitab*, dan *Wak syawal* yang bisa merubah wujud dirinya dari manusia menjadi harimau belang, dan bertabiat harimau dalam jangka waktu yang terbatas. Selain itu ada pula yang bisa membinasakan atau membunuh seseorang dari jarak jauh dengan menggunakan sepotong rantai yang panjangnya tidak lebih dari sejengkal, yang mereka namakan "*Rantai Sekilan*". Benda yang berwujud rantai tersebut, oleh sang dukun dilepaskan dari satu tempat menuju kepada suatu arah yang menjadi sasarannya, melintas pada ketinggian ± 15 m dari permukaan tanah sambil mendatangkan angin ribut, pada kegelapan malam. Rantai sekilan ini terbang dengan kecepatan pantastis sambil mengeluarkan sinar terang beberapa milimeter pada sisinya. Karena ia terbang atas kendali sang dukun, maka ia bisa masuk ke rumah yang ditutup rapat melalui lobang-lobang angin di atas jendela, akhirnya menghantam tubuh orang yang menjadi sasarannya. Tubuh yang menerima hantaman ini

segera berubah warnanya menjadi biru kehitam-hitaman bagaikan orang terkena strom listrik, kemudian mati. Dukun yang mempunyai ilmu hitam semacam ini mempunyai watak jahat dan kejam, membuat orang takut untuk berbuat sesuatu yang dapat membangkitkan kemarahannya. karena merasa takut akan kesaktian sang dukun orang-orang pada segan untuk saling bermusuhan sesama mereka, karena takut kalau-kalau dukun tersebut akan disewa oleh musuhnya membinasakan dirinya, jadilah masyarakat dalam keadaan serta takut dan gelisah dengan perasaan tercekam.

BAGIAN II

BENTUK KOMUNITAS KECIL

CIRI-CIRI KOMUNITAS

Komunitas kecil yang disebut *marga* terdiri daripada sebuah wilayah persekutuan beberapa buah dusun yang masih merasakan atau menganggap diri mereka satu nenek moyang atau sekurang-kurangnya merasakan bahwa diri mereka dipersatukan oleh persamaan nasib dan penanggungan. Umumnya marga-marga itu memiliki batas wilayah tertentu, satu dengan lainnya ditandai oleh tanda-tanda alam seperti sebuah sungai yang sama-sama mereka sepakati, atau gugusan dari beberapa buah bukit, atau sebatang pohon raksasa yang populer di kalangan mereka, baik berupa kayu sialang atau kayu sejenis itu. Pada beberapa hal lainnya komunitas kecil ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan orang Kerinci. Keunikan tersebut, bisa dilihat pada bentuk fisik rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah mereka ditegakkan di atas tiang kayu bulat 1½ sampai 2 meter dari permukaan tanah bubungan berbentuk garis lurus menurut lebar bangunan dengan memakai serambi yang dalam sebutan lokal disebut *lasar*. Serambi itu sengaja dibuat agak rendah beberapa sentimeter, dari ruangan dalam (tengah). Demikian pula bagian belakang sampai ke dapur, pintu masuk/keluar rumah diterpatkan di serambi rumah bagian tengah, sedangkan di bagian belakang juga dibuat pintu di mana dipasang sebuah tangga untuk turun naik. Pintu belakang ini lebih bersifat khusus, karena hanya digunakan untuk keluarga semati-mata. Untuk sampai ke dalam rumah ini harus menaiki anak tangga yang terdiri dari 5 atau 7 takak (tingkatan) yang terbuat dari kayu.

Adat yang dijadikan pedoman hidup mereka dalam berbagai macam pergaulan ialah suatu kebiasaan yang telah turun-temurun dan diintegrasikan dengan hukum-hukum menurut Islam. Adap pada upacara perkawinan, adat pada sistem gotong royong atau tolong-menolong, adat dalam sistem perekonomian atau perkongsian, sampai-sampai kepada masalah politik dan pertahanan sama sekali haruslah didasarkan kepada adat yang telah menjali satu dengan Islam tersebut. Oleh orang Jambi umumnya dua *sumber hukum* yang

telah lebur menjadi satu itu, mereka sebut "Adat nan bersandikan syarak, syarak bersendi kitabullah". Arti yang sebenarnya daripada sebutan tersebut ialah, sesuatu yang harus ditimbang dengan menggunakan pertimbangan hukum (norma-norma adat), baru akan bisa dijalankan bila sudah tidak menyalahi ketentuan kitab suci Al Qu'ran, Hadis Nabi atau qias. atau dalam kata lain adat harus dikorbankan bila tidak sesuai dengan hukum syarak.

Pemimpin adat, yang merupakan pimpinan pucuk oleh mereka diberi gelar *Pasirah*. Pasirah ini memimpin sebuah *komunitas* yang disebut Marga. Pasirah membawahi beberapa kepala komunitas yang lebih kecil, yaitu dusun-dusun-dusun. Kepala-kepala dusun disebut *Penghulu* atau Ngebi.

Pasirah atau Penghulu itu didukung oleh suatu kewibawaan dengan tanda-tanda resmi yang ditetapkan oleh adat. Pada umumnya Pasirah atau Penghulu ini dipilih dari suatu kelompok kekerabatan tertentu, yaitu dari keturunan orang pertama menempati daerah itu akan tetapi semenjak tahun-tahun 50-an hal tersebut sudah langka sekali terjadinya. Orang sudah memilih Pasirah didasarkan kepada kemampuannya dalam bidang pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pemimpin adat yang bergelar Pasirah ini bertugas memimpin kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, disertai tugas sebagai wakil Pemerintah yang lebih atas.

Pasirah ini memakai lambang tertentu, dalam wujud benda-benda pusaka seperti pedang, keris, tombak bahkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda juga diberi bedil. Di samping itu juga memegang tongkat berkepala perak dengan lambang kerajaan negeri Belanda, kancing baju dan peci semuanya diciptakan khusus yang melambangkan kepemimpinannya.

Atas dasar kepemimpinannya itu, ia harus disapa dengan *Datuk* jika berjalan ia ditempatkan di muka. Di dalam perjamuan dan upacara ia ditempatkan pada tempat yang lebih terhormat, jika bermusyawarah ialah yang jadi pimpinan atau Ketua permusyawaratan.

Tanda pengenalan atau lambang dari suatu komunitas yang berwujud bangunan, sejeuh ini belum ada yang dapat diungkapkan, kecuali ada sesuatu kekhususan lain yang merupakan ciri-ciri tersendiri di daerah ini, yaitu sebuah kebiasaan orang Melayu Jambi membariskan pohon-pohon mangga di sepanjang tebing sungai di muka kampung atau dusun mereka. Hal ini membuat dusun-dusun tersebut dalam suasana sejuk dan nyaman baik untuk dipandang mata atau dinikmati dengan jalan berteduh, di bawah rerimbun daun mangga yang hijau dan segar itu.

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Kesatuan hidup masyarakat yang berbentuk komunitas semacam uraian di atas hidup dengan prinsip timbal-balik. Rumah-rumah mereka yang mengelompok padat dan menyebar di dalam rentangan tanah yang satu, merupakan suatu pembuktian bahwa mereka senantiasa hidup saling bantu-membantu, tolong-menolong. Di berbagai lapangan kehidupan mereka selalu melakukan

tukar-menukar kewajiban dan benda, baik dalam lapangan produksi, ekonomi dan pertukaran harta mas kawin antara dua pihak keluarga pada waktu perkawinan. Kesatuan hidup mereka adalah sebagai bagian dari kesatuan hidup yang lebih luas, yaitu marga.

Hubungan antara komunitas kecil yang disebut dusun dengan marga sebagai kesatuan hidup yang lebih besar, merupakan hubungan antara ibu dan anak. Marga sebagai kesatuan yang lebih dekat hubungan dengan pemerintah atasan, menjadi penghubung antara atasan dengan dusun. Semua perintah atau kehendak pemerintah atasan disampaikan kepada marga (Kepala marga). Sebagai pemimpin adat semua perintah itu dimusyawarahkan dengan anggota kelompok adatnya, sebelum diturunkan kepada Kepala dusun. Demikian pula sebaliknya, beberapa hal yang tidak terselesaikan atau memang tidak boleh diselesaikan pada tingkat dusun, disalurkan kepada marga, untuk diputuskan sendiri atau diteruskan kepada pemerintah yang lebih atas. Di sini tampak bahwa marga berkedudukan sebagai ibu, dan dusun-dusun sebagai anak-anaknya. Setiap masalah yang timbul pada masing-masing pihak kesatuan hidup, merupakan masalah bersama, dipecahkan bersama dan diselesaikan bersama.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Bentuk pemerintahan adat pada masa sebelum perang kemerdekaan sampai dengan masa pembangunan sekarang ini pada dasarnya tidak banyak berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi itu berkisar pada tata cara atau menerapkan undang-undang adat itu ke dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pada masa menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, apa yang kita kenal sekarang bernama Marga adalah suatu pemerintahan adat yang di dalam bahasa Belanda disebut adat-Distrik. Pimpinan pucuk dari adat Distrik ini disebut Hoof van adat Distrik (Kepala kelompok adat) dengan gelar "*Pasirah*". Oleh karena tugas dan tanggung jawab Pasirah ini selain membantu penyelenggaraan Pemerintah atasan, ia juga pemimpin dari kalbu atau Marganya secara otonomi, dengan sistem adat. Maka secara vertikal ia dibantu oleh beberapa orang Kepala Dusun yang masing-masing mengepalai sebuah dusun dengan gelar *Penghulu*. Oleh karena Pasirah menjalankan suatu peraturan yang didasarkan kepada undang-undang yang tidak tertulis, maka Pasirah didampingi sebuah lembaga adat lokal yang bernama *liit adat*, yang di daerah Palembang disebut "*Dewan Marga*". Menjelang dekrit Presiden 5 Juli 1959, di samping Pasirah dan Dewan Marga ada lagi sebuah lembaga pembantu pelaksanaan tugas Pasirah secara harian yang bernama Badan Harian Marga (BHM). Sewaktu berkuasanya rezim orde lama, baik Dewan Marga, maupun Badan Harian Marga ditiadakan. Demikian sesudah Pemerintahan orde baru sekarang pembangunan negara diselenggarakan secara keseluruhan. Badan-badan yang telah hilang itu, tak pernah dipersoalkan lagi. Pada masa sekarang sambil menanti diundangkannya peraturan baru oleh Pemerintah, mengenai

kedudukan Pasirah ini, Pasirah-Pasirah bekerja tanpa dibantu oleh sesuatu Badan lain dan status otonomnya telah dibatasi oleh ketentuan yang terkenal dengan sebutan "Paket April". Namun demikian Pasirah, sebagai Pemimpin adat, punya wewenang untuk mengembangkan daerahnya, selama hal tersebut tidak berlawanan dengan kehendak Pemerintah yang lebih atas, atau tidak sesuai dengan kehendak bagian terbanyak dari penduduk setempat. Peridapatnya senantiasa dijadikan bahan pertimbangan yang sangat menentukan. Semua jawatan yang berlokasi di daerahnya haruslah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan belum dapat dijalankan di daerahnya, selama hal tersebut belum mendapat persetujuan/izinnya. Perkara perdata atau pidana yang terjadi di dalam wilayahnya, belum akan bisa diurus tanpa rekomendasi daripadanya. Pada masa lampau katakanlah ± 7 atau 8 tahun yang lalu Pasirah ini menerima penghasilan dari kekayaan daerahnya yaitu dari bunga pasir atau bunga kayu dalam bentuk pancung lalas, atau sewa pasar getah. Akan tetapi sebelah getah-getah rakyat di-poolkan oleh Pemerintah Tingkat I Jambi sumber penerimaan tersebut lalu terhenti. Sementara itu ada petunjuk bahwa status otonomi Marga akan ditiadakan, dan Kepala Marga dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri, dengan menerima penghasilan yang diatur dengan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang itu.

Di atas telah diterangkan bahwa Pasirah dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu keputusan didampingi oleh sebuah liit adat. Anggota liit biasanya tidak lebih dari lima orang, yang terdiri dari golongan ulama, cerdik-pandai, Tuo-tou Tenganai, Pemerintahan dan lain-lainnya. Anggota-anggota liit ini berfungsi membantu pemikiran Kepala Marga dalam memecahkan masalah yang fundamental seperti perkara sengketa perbatasan, masalah perkawinan, harta-harta warisan, peninggalan sejarah, penganiayaan atau pembunuhan dan lain sebagainya.

Antara Marga dan Dusun, katakanlah antara Pemerintah yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang ada di bawahnya bersifat otonom, di mana masing-masing kepala dusun berhak menyelenggarakan pemerintahan di dusunnya secara penuh sebagai sebuah rumah tangga. Marga sebagai induk dari beberapa dusun yang menjadi warga kalbunya senantiasa memelihara jalinan hubungan yang telah ada itu secara ketat dan terkendali. Jalinan tersebut selalu muncul dalam wujud pengawasan teritorial, seperti mempelajari aspirasi atau kehendak dari warga dusun itu, mendengar serta menanggapi sesuatu yang mendatangkan rasa gembira di hati masyarakat, atau sebaliknya yang berupa keluhan atau caci maki masyarakat terhadap kebijaksanaan yang keliru. Semua itu diketahui melalui musyawarah demi musyawarah.

Hubungan kerja sama antara kesatuan-kesatuan hidup yang sederajat, yaitu antara beberapa dusun yang masih menganggap dirinya dari kalbu yang satu (satu marga) secara umum masih terjalin baik, walaupun harus diakui pada masa-masa belakangan ini kekrabannya tidak seperti sedia kala. Dahulu

tatkala jumlah mereka belum seberapa hubungan kerjasama ini, didukung oleh dua faktor penting. Faktor pertama erat kaitannya dengan mata pencaharian. Dengan penghasilan yang lebih dari berkecukupan, orang bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan secara santai, sekaligus memberi peluang baginya untuk mengunjungi sanak-familinya yang terpisah jauh. Faktor kedua, adanya dorongan dari dalam yang mengharuskan orang melakukan perjalanan tersebut. Keadaan ini merupakan manifestasi dari kesadaran hidup berkeluarga dan berkerabat. Dewasa ini kedua faktor tersebut sedang diuji keampuhannya. Dengan penerimaan penghasilan yang minim, jelas akan mempersempit ruang gerak warga masyarakat untuk melakukan perjalanan yang cuma-cuma atau tanpa mendatangkan hasil yang konkrit, apalagi disertai dengan mulai kurangnya kesadaran berkeluarga sebagai akibat mulai menipisnya kepatuhan menjalankan suruhan agama. Maka dengan sendirinya longgar pulalah hubungan kerjasama antar mereka yang hidup dalam dusun-dusun yang berjauhan.

Akan tetapi walaupun demikian, pada peristiwa-peristiwa penting dalam siklus hidup manusia, seperti mengkhitankan anak, perkawinan, ataupun melepaskan keberangkatan anggota kerabat yang akan menunaikan ibadah haji, hubungan kerjasama itu masih nampak dan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Demikian pula pada peristiwa kemalangan, kecelakaan, atau kematian. Tegasnya hubungan kerjasama antar dusun itu selalu nampak pada saat-saat melampaui masa krisis (crisisrites), termasuk malapetaka kebakaran, banjir atau mendapat serangan wabah penyakit.

Adapun perihal hubungan kerjasama antar Marga hanya terdapat pada tingkat daerah propinsi dalam mekanisme kerja yang mencakup bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada saat-saat terakhir berkuasanya rezim orde lama di Jambi, ada wadah kerjasama antar Pamong Marga dan Dusun dalam daerah Jambi yang beranggotakan seluruh pasirah, Kepala Kampung (dusun) dan Kemendapoan dalam Propinsi Jambi. Wadah tersebut diberi nama Persatuan Pamong Marga dan Desa, daerah Propinsi Jambi.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Jenis lembaga-lembaga sosial yang terwujud di daerah Melayu Jambi, ada bermacam-macam dan terjelma baik dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan maupun dalam bidang religi. Salah satu lembaga yang cukup penting kehadirannya dalam suatu komunitas ialah Persatuan Kematian. Sebutan untuk lembaga ini pada tiap-tiap dusun ada juga yang berbeda, namun prinsip dan tujuannya selalu sama. Persatuan tersebut bersifat kemasyarakatan, di mana para anggotanya melakukan kerjasama dan bekerja bersama untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan, diperjuangkan bersama untuk kepentingan semua anggota. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui perkumpulan tersebut, antara lain memberi keringanan kepada para anggotanya dalam hal ditimpa kemalangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota

nya, sambil memelihara jiwa dan semangat persatuan, yang memang sudah merupakan cara hidup orang Melayu Jambi.

Pada dasarnya setiap warga dusun adalah menjadi anggota perkumpulan ini, namun secara administratif yang menjadi anggota resmi adalah pria dan wanita yang sudah berusia 18 tahun ke atas yang mempunyai sumber mata pencaharian hidup, menyetujui dan menerima ketentuan yang menjadi anggaran dasar dan peraturan rumah tangga perkumpulan, disertai dengan sehat jasmani maupun rohani. Pimpinan perkumpulan dipilih dari mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain berjiwa pemimpin, jujur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkumpulan tersebut sempat berperan di daerah ini. Sebagai motivator, mobilisator dan dinamisator pembangunan masyarakat dusun yang bersangkutan untuk kepentingan masa kini dan masa mendatang.

BAGIAN III SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Astrid S. Susanto bahwa kedudukan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat berbeda-beda. Perbedaan itu terjadi sebagai akibat dari faktor kedudukan sosial kecuali itu posisi seseorang sangat ditentukan oleh hubungannya dengan orang-orang lain di dalam masyarakat (14, 91). Oleh sebab itu sejak dahulu hingga sekarang kedudukan manusia tetap saja tidak selalu sama. Yang bernasib baik, segera menjadi orang yang berkuasa, menjadi alim, menjadi kaya dan bagi yang kurang beruntung, hidupnya sengsara, miskin, bodoh, hina dan sebagainya. Keadaan semacam itu pula menjadi alasan bagi manusia untuk mewujudkan sistem pelapisan sosial.

Sistem berlapis di dalam masyarakat, ada yang terlihat secara tajam dan ada pula yang tersamar, dalam arti hanya ada dalam pikiran manusia. Hal tersebut sedikit banyaknya, dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat, atau oleh faham agama yang dianut oleh sesuatu kelompok masyarakat. Sejak masuknya agama Islam di daerah Melayu Jambi, sistem berlapis secara tajam dan resmi itu seolah-olah tidak mendapat tempat untuk berkembang. Salah satu atau mungkin juga satu-satunya yang menjadi faktor penghalangnya, ialah karena pada diri para penguasa adat ketika itu sudah bersemayam ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa pada sisi Allah, manusia itu tidak ada keutamaan seseorang penguasa daripada mereka yang bukan penguasa. Oleh karena itu pula gejala pelapisan sosial tajam hanya sekelumit yang dapat dilukiskan.

Dalam pada itu ternyata pula bahwa dalam kehidupan masyarakat orang Melayu Jambi, agak sukar memisahkan antara pelapisan sosial masa lalu dengan keadaannya pada masa sekarang sebab satu sama lain saling bersang-

kut-paut. Kecuali itu pula amat disesalkan karena perolehan data yang akan mengungkapkan kenyataan itu diakui sebagai sangat minim, sehingga gambaran tentang sistem pelapisan dalam naskah ini hanya dapat diungkapkan secara global, dalam arti secara terpaksa penulis tidak menyesuaikan kehendak seperti yang dimaksud oleh petunjuk Pelaksanaan Penelitian.

DASAR-DASAR PELAPISAN SOSIAL

Orang Melayu Jambi sebelum memeluk agama Islam, pernah menganut agama Hindu. Raja-raja, para pemuka agama dan para hartawan menganggap diri mereka atau dipandang oleh masyarakat sebagai satu kelompok masyarakat yang berada pada *lapisan sosial atas*. Para petani, nelayan dan orang-orang biasa berada pada *lapisan bawah*. Setelah orang Melayu Jambi memeluk agama Islam, sebagian dari kaum bangsawan orang Melayu Jambi, kembali memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Diam-diam mereka juga mengenal pelapisan sosial di dalam masyarakatnya. Orang-orang bangsawan dengan segenap jajarannya melarang anggota keluarga mereka mengadakan hubungan perkawinan dengan orang-orang biasa.

Untuk diangkat Pasirah misalnya, haruslah mereka yang berasal dari keturunan atau keluarga raja-raja, sekurang-kurangnya nenek moyang mereka pernah memegang jabatan penting (sebagai penguasa) dalam pemerintahan. Tegasnya mereka yang akan diangkat/dipilih menjadi Pasirah itu tidak dibolehkan orang-orang yang bukan tergolong keturunan dari mereka yang berada pada lapisan sosial atas pada masa lampau.

Di lain pihak kepandaian dalam hal ilmu juga dianggap sebagai alasan untuk mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga tidak mengherankan apabila golongan orang-orang pandai dalam ilmu menduduki lapisan sosial yang tinggi. Sebagai contoh ialah mereka yang menjadi pemuka-pemuka agama, atau mereka yang menjadi dukun atau pawang. Orang-orang serupa itu memang pandai berbuat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Dari kenyataan tersebut di atas, bagi masyarakat Melayu Jambi mengenal suatu kombinasi dari beberapa alasan pembedaan, yakni mementingkan faktor keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat dan kepandaian sebagai ukuran kedudukan orang.

BENTUK PELAPISAN

Pelapisan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat orang Melayu Jambi, terdiri dari keturunan penguasa, para alim ulama, saudagar, para petani, pemilik tanah dan masyarakat biasa. Tiap-tiap lapisan itu terbagi lagi ke dalam lapisan-lapisan khusus. Demikian seperti anggota lapisan khusus bangsawan, memakai gelar-gelar di depan namanya. Pada umumnya orang Melayu Jambi tahu pasti bahwa gelar yang tertinggi bagi bangsawan laki-laki ialah

Raden, Sayid dan Kemas. *Raden*, ialah orang-orang keturunan raja-raja Jambi yang masih asli dari pihak laki-laki. *Sayid*, ialah orang-orang keturunan bangsawan Arab/Islam yang sudah berasimilasi dengan keluarga raja-raja Jambi. *Kemas*, ialah orang-orang keturunan raja-raja Jambi dari pihak wanita.

Begitu pula halnya dengan lapisan khusus masyarakat biasa yang disebut juga *orang kecil*, mereka terdiri dari berbagai macam golongan, sesuai dengan tugas pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Golongan dimaksud ialah para petani, penggarap, buruh dan nelayan. Untuk jelasnya struktur pelapisan dalam masyarakat Melayu Jambi ialah sebagai berikut :

TABEL 5
STRUKTUR PELAPISAN SOSIAL

1.	Raden (Keturunan raja-raja Jambi yang masih asli dari pihak laki-laki)	Sayid (Keturunan bangsawan Arab/Islam yang sudah berasimilasi dengan keluarga raja-raja Jambi)	Kemas (Keturunan raja-raja Jambi dari pihak wanita)	Ulama (Guru-guru besar dalam agama Islam)
2.	Saudagar (Pedagang besar)	Petani (Pemilik tanah-tanah garapan)		
3.	Orang kecil/kecil (Masyarakat biasa)			

Sampai sekarang gelar-gelar bangsawan seperti tersebut di atas masih dipakai orang di depan namanya. Akan tetapi pemakaian gelar-gelar itu tidak lagi berfungsi sebagai atribut dari pelapisan sosial atas seperti halnya keadaan pada masa sebelum perang kemerdekaan Indonesia. Bahkan di kalangan mereka itu di antaranya ada yang bernasib kurang beruntung, miskin dan tidak memiliki sesuatu kepandaian, lalu berada pada lapisan bawah. Namun demikian gelar-gelar tersebut mereka pergunakan sekedar untuk memelihara hubungan kekerabatan antara mereka yang masih satu keturunan, akan tetapi sudah bertempat tinggal berjauhan satu sama lainnya.

Pada masa lalu hak-hak tertentu bagi mereka yang menempati tiap-tiap lapisan itu berbeda-beda. Bagi mereka yang menempati lapisan yang paling atas, kepadanya diberikan hak oleh masyarakat untuk menempati jabatan-jabatan tertentu di dalam pemerintah yang mereka selenggarakan, seperti jabatan Pasirah, Penghulu dan pemimpin agama, menjadi anggota leed adat, pengatur keamanan dan lain-lain. Khusus bagi mereka yang menempati *lapisan menengah*, seperti saudagar dan petani pemilik tanah-tanah garapan, mereka berhak pula untuk mengajukan saran-saran atau pendapat kepada

pihak penguasa dalam rangka pengambilan langkah-langkah untuk memelihara atau meningkatkan kehidupan ekonomi dan perdagangan di wilayahnya. Sedangkan bagi mereka yang menempati lapisan sosial yang terbawah (masyarakat biasa), maka hak-hak yang ada pada mereka itu seringkali dikalahkan oleh kewajiban. Saran-saran mereka hampir-hampir tidak pernah mendapat perhatian, sementara kewajiban-kewajiban yang dibebankan di atas pundak mereka, senantiasa diawasi secara ketat. Mereka diwajibkan membayar pajak, wajib memelihara dan mencegah terjadinya gangguan keamanan kampung, mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan setempat atau pimpinan yang lebih tinggi kedudukannya.

Dari uraian di atas jelaslah pula peranan tiap-tiap lapisan itu dalam pergaulan masyarakat. Jadi sebagai pemegang peranan terpenting adalah orang-orang yang berada pada lapisan atas yaitu mereka yang berasal dari keluarga dekat penguasa atau keturunan bangsawan, dan orang-orang yang menguasai bidang-bidang pengetahuan tertentu. Golongan mereka itulah yang akan menetapkan segala macam kebijaksanaan dan dijalankan oleh warga masyarakat yang berada di lapisan-lapisan bawahnya. Namun demikian ketiga lapisan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang sekaligus menjadi inti daripada dusun atau marga yang bersangkutan.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan antar setiap lapisan yang terbentuk karena perkawinan ada dijumpai di dalam masyarakat Melayu Jambi meskipun dalam intensitas yang rendah. Apabila terjadi hubungan perkawinan antara dua unsur lapisan yang berbeda secara ekstrim, maka proses terjadinya hubungan tersebut melalui upaya *kawin lari*, di mana sang gadis dilarikan oleh sang pemuda ke rumah *Khadi* yaitu petugas yang akan meresmikan perkawinan itu. Atau ada juga yang lari ke tempat-tempat lain yang jauh dari rumah tangga orang tua mereka. Bagi kaum laki-laki dari mereka yang menempati lapisan atas itu meskipun ia dilarang untuk kawin dengan wanita dari lapisan bawah, namun sanksinya tidak begitu keras. Hal tersebut dapat dipahami, oleh karena orang Melayu Jambi tidak menjalankan prinsip matrilineal, sehingga semua hak yang menjadi kebanggaan dalam lapisan mereka tidak akan hilang dikarenakan penyimpangan adat tersebut.

Para petani yang memiliki tanah garapan atau para saudagar yang menguasai dunia perdagangan, juga tidak akan mudah mengambil menantu dari keluarga petani penggarap atau pekerja kasar, kecuali ada faktor keistimewaan tertentu yang merupakan penyebab terjadinya perkawinan tersebut. Akan tetapi dari kenyataannya menunjukkan bahwa bagi anggota masyarakat biasa yang tahu harga diri, tidak akan merelakan keluarga mereka dikawini oleh lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka merasa malu dengan para kerabat atau tetangga lain yang sederajat. Dan lagi pula sangat tipis kemungkinan orang yang kawin itu akan hidup serasi, karena sikap, kebiasaan atau pengalaman satu sama lain berbeda, sehingga dikhawa-

tirkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang kekal dan abadi.

Secara bertetangga, antara mereka yang berbeda kedudukan sosialnya itu nampak terjalin baik. Hal ini bisa terlihat pada waktu adanya kegiatan kunjung-mengunjungi dalam suasana *hari baik*, bulan mulia seperti hari raya Idul fitri atau hari raya Korban, walaupun dalam kenyataannya ikatan ini lebih banyak terjadi atas inisiatif mereka yang lebih rendah kedudukan sosialnya.

Adapun pengaruh yang ditimbulkan oleh jalinan hubungan tersebut cukup besar, sebab dengan perwujudan hubungan serupa itu, paling tidak akan terhindar suatu ketegangan sosial antara satu lapisan dengan lapisan lain seperti rasa permusuhan yang sering berpangkal dari perasaan iri hati ataupun karena tidak saling kenal-mengenal. Begitu pula mungkin disebabkan kedudukan sosial yang berbeda itu, atau karena lapangan pekerjaan yang berlainan, maka hubungan di dalam pekerjaan sehari-hari boleh dikatakan jarang sekali terjalin. Kalaulah hal itu terjadi pada suatu kesempatan, itupun adakalanya bukan termasuk ke dalam kategori jalinan kerjasama, melainkan tidak lebih dari suatu proses hubungan pamrih belaka, atau dalam bentuk lain yaitu semacam rekreasi seperti pada saat-saat tertentu mereka berburu binatang di hutan-hutan, menjala ikan di sungai atau di danau dan *memuhut* (yaitu memasang getah pohon yang sudah diolah menjadi bahan perekat) burung di pohon-pohon kayu.

PERUBAHAN LAPISAN

Terjadinya perubahan struktur lapisan dalam masyarakat, bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan yang berdiri sendiri. Hal ini banyak kaitannya dengan faktor-faktor tertentu, yang seakan-akan kesemuanya itu berporos kepada akibat perkembangan dunia pendidikan yang demikian pesatnya. Pendidikan telah memberi warna dasar dalam struktur lapisan masyarakat. Lalu kemudian di samping dunia pendidikan, turut pula mendorong terjadinya perubahan tersebut, seperti dengan bertambah majunya teknologi masa kini yang bersamaan waktunya dengan semakin lancarnya arus komunikasi dan pergeseran struktur kekuasaan.

Orang Melayu Jambi baru mengenal bangku sekolah dalam beberapa belas tahun menjelang jatuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Dalam waktu yang relatif muda itu, hanya beberapa prosen saja dari mereka yang sempat menerima pendidikan formal. Tapi itupun terbatas pada keluarga-keluarga yang mampu saja. Dan selama itu pula mereka tetap berada dalam tata hidup menurut kebiasaan lama.

Setelah Indonesia berada dalam alam kemerdekaan kenyataan tersebut di atas secara berangsur-angsur mengalami perubahan yang cukup berarti, karena di mana-mana tampak para putra-putri mereka sudah ada yang menginjak bangku sekolah menengah dan bahkan beberapa orang di antara anggota

warga masyarakat setempat ada yang berhasil lulus atau sampai ke lembaga pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu terjadi pulalah perubahan-perubahan dalam masyarakat. Para pemuda-pemudi yang pada mulanya menjadi petani, atau pedagang kecil sebagaimana tradisi mata pencaharian hidup orang tua mereka, maka sekarang telah bervariasi dengan preferensi pekerjaan sebagai pegawai negeri atau pegawai pada perusahaan swasta. Di lain pihak ada pula orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, pindah ke kota-kota besar. Apalagi bagi orang-orang yang sudah mencapai gelar kesarjanaan telah ada yang memegang jabatan penting dalam bidang pemerintahan. Kesemuanya itu adalah sebagai manifestasi dari kemajuan dunia pendidikan tersebut, di mana kesempatan belajar dan kesempatan menduduki sesuatu jabatan dalam pemerintahan tidak lagi terbatas pada orang kaya dan orang-orang bangsawan saja. Keadaan semacam itu menunjukkan bahwa secara tersamar timbul pelapisan sosial bentuk baru.

Demikian, jika selama ini yang diutamakan menjadi Pasirah atau menjadi Penghulu-penghulu haruslah mereka yang berasal dari keturunan penguasa atau raja-raja atau para cerdik pandai lainnya, maka sekarang yang diutamakan adalah kemampuan seseorang. Mampu dalam arti kata berpendidikan, walaupun di samping itu secara diam-diam asal-usul seseorang itu masih diharapkan sebagai pelengkap dari persyaratan sebagai calon pemimpin masyarakat.

BAGIAN IV PIMPINAN MASYARAKAT

Dipandang dari sudut bentuk pimpinan dan pemerintahan dalam komunitas kecil Melayu Jambi, maka dalam ilmu antropologi dikenal adanya empat bentuk dasar yang terpenting. Dua di antara bentuk-bentuk pimpinan tersebut yang ada relevansinya dengan kondisi masyarakat pedusunan dalam daerah Melayu Jambi, ialah pimpinan mencakup dan pimpinan pucuk. Bagi masyarakat desa menetap, baik yang berdasarkan bercocok tanam di ladang, maupun bercocok tanam menetap, biasanya mempunyai pimpinan yang mencakup tidak hanya dalam lapangan-lapangan yang terbatas saja, tetapi sebagian besar dari lapangan kehidupan masyarakat. Pimpinan serupa ini kita sebut *pimpinan mencakup*. Akan tetapi seorang pemimpin mencakup dapat pula kita sebut *pemimpin pucuk*, apabila wilayah kuasa mereka meliputi lebih dari satu komunitas kecil. Dengan kata lain suatu pimpinan pucuk adalah sebenarnya juga pimpinan mencakup tetapi yang lebih luas dan kompleks. Pemimpin tersebut seringkali menguasai lebih dari satu dusun (2, 202 dan seterusnya).

Pada uraian berikut ini kita memang sengaja tidak memberikan uraian secara terpisah antara pimpinan tradisional dengan pimpinan masa kini ter-

utama yang formal, oleh karena dalam kenyataannya pimpinan tradisional itu masih berlangsung sampai saat ini dan wujud pimpinan semacam itu pula pada hakekatnya dikukuhkan oleh masyarakat Melayu Jambi pada masa sekarang.

PIMPINAN FORMAL DAN INFORMAL

Pimpinan formal dalam komunitas kecil masyarakat Melayu Jambi lebih banyak berorientasi pada bentuk pimpinan pucuk, di mana Pasirah selaku kepala Marga jelas kepemimpinannya didukung oleh beberapa Penghulu yang berfungsi sebagai komunikator dua arah antara Pasar dan warga dusun. Sebagai Pasirah ia memiliki kekuasaan yang cukup besar terhadap warga masyarakat dalam lingkungan, marga yang bersangkutan. Padanya melekat kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai peraturan adat setempat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah atau penguasa yang lebih tinggi. Misalnya saja peraturan tentang penetapan waktu turun ke sawah, tentang pengembalaan ternak, tentang cara-cara penangkapan ikan (bekarang), tentang pembukaan hutan dan sebagainya. Selaku pimpinan pucuk, maka Pasirah juga mempunyai wewenang tidak resmi untuk memutuskan sesuatu perkara adat yang terjadi di dalam wilayahnya. Pengaruh atas segala sesuatu yang diputuskan oleh Pasirah juga cukup besar, karena ternyata setiap warganya selalu taat dan patuh melaksanakan keputusan, maupun perintah-perintahnya. Selain ia dapat meyakinkan orang banyak, serta dapat mendorong aktifitas masyarakat ke arah dan tujuan yang hendak dicapai, maka ia juga berperan sebagai penegak hukum dan pengendali sosial di wilayahnya.

Adapun pimpinan informal, seperti halnya guru-guru negeri atau guru-guru agama yang bertugas di dusun, maka di luar tugasnya selaku pegawai negeri yang diangkat dengan Surat Keputusan resmi, mereka sering pula diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin, oleh karena tindak-tanduk, serta pengabdianya terhadap masyarakat dan lingkungannya tampak menonjol. Akan tetapi oleh karena kepemimpinan serupa ini tidak dikuatkan oleh sesuatu pengakuan resmi, misalnya dengan surat penetapan dari pihak penguasa maka bentuk atau ruang lingkup kepemimpinan tersebut serba terbatas. Salah satu contohnya ia tidak dibolehkan menetapkan sesuatu peraturan macam apa saja. Padahal dari kelebihan-kelebihan yang ada padanya, membuat dirinya ditakuti serta disegani orang. Kondisi yang seperti itu membuat orang akan senantiasa rela berkorban, demi untuk menjalankan kehendaknya. Guru-guru tersebut, mempunyai peranan yang cukup berarti bagi kehidupan masyarakat, terutama sebagai pembantu pimpinan formal dalam rangka turut membina dan mengembangkan sikap serta cita-cita masyarakat, misalnya turut membangun proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan dan keagamaan.

PIMPINAN TRADISIONAL

Yang dapat kita golongan sebagai pimpinan tradisional orang Melayu Jambi seperti orang yang menjadi pimpinan Marga atau kalbu yang diberi gelar *pasirah*, dan yang menjadi pimpinan dusun diberi gelar *penghulu*. Kepada pimpinan tersebut orang senantiasa menunjukkan sikap penuh rasa hormat. Sebagai tanda bersungkannya masyarakat terhadap kedudukan pimpinan tradisional itu, ia disapa dengan istilah *Datuk*. *Datuk*, bagi orang Melayu Jambi sama sekali tidak ada persamaannya dengan istilah *datuk-datuk* yang dipakai sebagai gelar pada masyarakat suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat, seperti *Datuk Perpatih Nan Sebatang* atau *Datuk Peduko Sati*. Bagi orang Melayu Jambi istilah "Datuk" itu berarti orang yang harus dihormati, disegani, dan dihargai. Maka dari itu suku bangsa ini seringkali juga mempergunakan istilah menyapa untuk ayah dari ibu atau ayah dari ayah ialah *datuk*. Demikian pula halnya dengan saudara kandung, saudara sepupu tingkat kesatu, kedua dan seterusnya dari *datuk* (kakek).

Gelar *Pasirah* atau *Penghulu* itu dikenal orang sejak pada waktu permulaan sekali dibentuknya lembaga adat resmi itu di daerah Jambi. Konon pada tahun 1927 di daerah Jambi diadakan rapat yang pesertanya terdiri dari seluruh kepala-kepala dusun yang berada di dalam wilayah kekuasaan Residen Jambi. Semua pimpinan dari setiap suku bangsa di daerah Jambi pada waktu itu hadir, kecuali suku Kerinci. Suku bangsa yang disebut terakhir ini tak dapat hadir disebabkan sulitnya perhubungan pada masa itu. Salah satu keputusan rapat tersebut ialah menetapkan sebuah wilayah kecil yang diberi nama *adat distrik*, sebagai pengganti istilah *kalbu*. Baru kemudian sejak tahun 1950-an nama tersebut berubah menjadi "marga" dengan *pasirah* sebagai kepala marga tersebut. Sedangkan nama untuk kepala dusun diserahkan kepada kelompok persukuan masing-masing. Tapi perkembangan lebih lanjut menunjukkan keseragaman dalam menyebut kepala dusun, dengan sebutan *penghulu*.

Gelar-gelar yang diberikan kepada pimpinan tradisional tersebut di atas, diresmikan pemakaiannya melalui suatu upacara khusus pada waktu pelantikannya. Upacara itu dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat wilayah tersebut. Yaitu para cerdik pandai, alim-ulama, nenek mamak, tuo tanganai, pria wanita, muda-mudi, dan lain sebagainya. Kata peresmian pemakaian gelar tersebut biasanya disampaikan oleh pemerintah setingkat lebih atas.

Gelar *Pasirah* teruntuk atau diberikan kepada mereka yang menjabat jabatan Kepala Marga, sedangkan gelar *Penghulu* diberikan kepada mereka yang memegang jabatan Kepala Dusun. Wilayah kekuasaan *Pasirah* sebagai kepala marga, meliputi beberapa buah dusun tergantung dengan banyaknya dusun-dusun yang merupakan satu kalbu/marga dari marga yang bersangkutan. *Pasirah* sebagai kepala marga, meliputi beberapa buah dusun tergantung dengan banyaknya dusun-dusun yang merupakan satu kalbu/marga dari marga yang bersangkutan. *Penghulu* sebagai kepala dusun, wilayahnya hanya satu

buah dusun atau beberapa buah dusun-dusun kecil, yang merupakan kelompok-kelompok tersebar dengan menetapkan salah satu dusun sebagai induk kelompoknya. Baik pasirah, maupun penghulu pada dasarnya adalah pemimpin kelompok *kalbu* atau *marganya*, yang menjalankan kehidupan rumah tangga dalam bentuk yang multi kompleks menurut adat kebiasaan yang telah merupakan sistem hidup bersama, dan dijunjung tinggi, di samping melaksanakan segala perintah yang diturunkan oleh pemerintah atasan seperti Camat, Bupati atau Gubernur pada masa sekarang.

Antara Pimpinan masa kini dengan Pemimpin masa lampau, tidak terdapat sesuatu perbedaan yang berarti. Dan, walaupun terjadi hanya pada hal-hal yang bersifat teknis saja, seperti asal-usul pemberian gelar atau pemakaiannya, sedangkan jabatan dan hal-hal yang dipimpin, begitu pula wilayah kekuasaannya tidak mengalami sesuatu perubahan. Kesemuanya itu masih utuh sebagai sediakala.

Untuk diangkat atau dipilih menjadi Pasirah atau Penghulu pada masa sebelum tahun 1950 tidaklah sembarang orang. Si individu tersebut haruslah memiliki beberapa persyaratan pokok dan persyaratan pelengkap yang ideal bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Persyaratan pertama, ia haruslah keturunan dari salah seorang pemimpin pada masa-masa sebelum masa mereka, umpamanya anak atau cucu pasirah, atau kemenakan dari penghulu dulu dan sebagainya. Selain itu usianya juga sudah cukup tua (dewasa), dan haruslah orang asli dari kelompok yang bersangkutan. Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya yang merupakan suatu faktor yang cukup ideal, ialah mengenai sikap atau tingkah laku seseorang yang akan dicalonkan itu, antara lain, haruslah seseorang yang jujur berani mengambil sesuatu keputusan secara cepat, setia kepada cita-cita bersama, taat menjalani suruhan agama, mau mengabdikan diri kepada kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas lagi, sifatnya tidak kikir dan tidak pula pemboros. Maka dari itu di dalam peribahasa orang Melayu Jambi ada yang berbunyi, "Bertungku cakak Berlapik cabik". Maksud peribahasa ini seseorang pemimpin itu hendaklah menyediakan diri pribadinya bersama keluarga batihnya terutama untuk melayani tamu yang datang berkunjung. Untuk itu periuk nasinya harus besar, karena periuk nasi yang besar, maka tungkunya harus besar (*cakak*), sehingga tamu-tamu yang datang dapat diberi minum dan makan. Tamu-tamu tersebut hampir-hampir tidak dapat dipastikan kapan datang dan perginya. Berlapik atau bertikar *cabik* atau koyak-koyak maknanya sama juga dengan tungku cakak, artinya banyak tamu, tamu yang datang bertandang entah siang, entah malam, entah pagi, entah petang, yang memungkinkan tikar segera menjadi lusuh dan cabik-cabik.

Sebagai pemimpin, pada mereka-mereka melekat beberapa hak tertentu. Hak-hak tersebut berupa hak untuk menjalankan atau melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, mengawasi pelaksanaan serta menilai hasil-hasil yang diperoleh dari segala putusannya itu. Hal-hal tersebut bisa kita

lihat contohnya, pada sistem, perlindungan terhadap kelestarian hutan dan pengelolaan ikan di sungai dan di danau. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau membuka hutan untuk dijadikan tempat perladangan, tidak bisa langsung memulai kegiatannya, sebelum mereka memperoleh izin dari penghulu dusun dimana ia bertempat tinggal (berbuku jiwa). Sesuatu danau yang telah ditetapkan sebagai tempat yang diawasi oleh adat, tidak seorang pun boleh mengambil ikannya sebelum penghulu sendiri mengajak semua masyarakat membuka/mengkarang danau tersebut secara resmi. Penghulu karena jabatannya biasanya mendapat bagian dari hasil penangkapan ikan secara kolektif dan gotong royong tersebut. Di samping pemimpin adat pasirah atau penghulu itu bertugas pula sebagai bawahan dari pemerintah yang lebih atas, yaitu Camat, untuk memungut pajak dari rakyatnya. Dalam hal ini, pasirah ataupun penghulu tersebut mendapat upah pungut secara persentase dari hasil pungutan yang diperolehnya.

PIMPINAN MASA KINI

Pada masa kini pimpinan adat tersebut masih terikat kepada tata cara yang telah dipraktekkan sejak lama. Hanya saja pada beberapa faktor persyaratannya sudah mulai diperlonggar. Persyaratan keturunan walau masih dijadikan dasar, akan tetapi tidak mutlak harus keturunan orang-orang tertentu seperti keluarga pasirah atau penghulu, namun demikian keturunan jahat seperti pencuri, pemabok, pembunuh dan lain sejenisnya tetap ditolak untuk dijadikan calon pemimpin. Demikian pula unsur keaslian walau tidak diperlukan seketat dulu, namun seseorang yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan penduduk setempat masih belum bisa diterima sebagai calon penghulu atau pasirah. Persyaratan lain yang ideal seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, pengabdian, dan kesetiaan, harus ditambah lagi dengan kesehatan, dan kepandaian. Hak-hak seperti menjalankan keputusan, melakukan pengawasan, dan menilai sesuatu tetap utuh di samping hak-hak lainnya. Ia punya hak untuk memimpin upacara-upacara adat. Adat yang berhubungan dengan nikah-kawin, penyambutan/penghormatan terhadap tamu-tamu yang datang atau perpisahan/pelepasan pejabat-pejabat atasan yang meninggalkan wilayah kekuasaannya. Ada berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka dalam memimpin masyarakatnya. Tanggung jawab tersebut di antaranya memelihara keamanan, baik yang timbul disebabkan oleh tangan manusia seperti perkelahian, perjudian, pencurian, perkosaan dan sebagainya, maupun yang timbul disebabkan gangguan alam seperti, bahaya kebakaran, kebanjiran, kekeringan, atau amukan binatang buas. Memelihara kesehatan masyarakat melalui kebersihan lingkungan, mempertinggi hasil produksi masyarakat dengan jalan memberantas hama dan penyakit tanaman serempak, pemupukan, pengairan dan sebagainya. Meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan, penerangan, dan rekreasi di samping memelihara serta menyimpan benda-benda bersejarah dan barang-barang pusaka seperti pakaian adat,

alat-alat senjata perang yaitu pedang, keris, tombak, dan lainnya, juga alat-alat kesenian yang terdiri daripada gong, tawok-tawok, kelintang dan lain-lainnya.

Untuk membedakan antara mereka yang memimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya ada seperangkat simbol yang menjadi ciri-ciri bagi si pemimpin. Ciri-ciri tersebut terletak atau berbentuk pakaian, dan juga rumah tempat kediaman. Pada pakaian; celana panjang terbuat dari sutera halus, gunting Melayu, di pinggir bawah ujung celana memakai les dari benang emas, baju gunting belah buluh memakai sulaman benang emas pada bagian dada, leher, belakang, dan pinggir bawah dan ujung lengan, peci hitam, memakai les pada sisinya, warna kuning pakaian Pasirah sedangkan warna putih perak pakaian Penghulu, memakai tongkat kebesaran berhulu emas bagi Pasirah, berhulu perak bagi Penghulu. Memakai sabuk dari kain merah atau kuning, dengan keris dirusuk kiri, serta alas kaki dari sandal jepit. Rumah kediaman mereka walau bukan rumah dinas, biasanya jauh lebih besar dan lebih bagus buatannya dari rumah-rumah penduduk. Pada masa lampau ada yang memakai tempat peranganin, yang terletak pada ketinggian antara 4–6 meter dari permukaan tanah. Orang Melayu Jambi menyebutnya *rumah berjagan*.

Buat memilih mereka yang akan dijadikan Penghulu atau Pasirah, dipakai sistem pemilihan bertingkat, di mana anggota pemilih hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja, antara lain cerdik pandai, alim ulama, tuo tengganai dan nenek mamak. Semua anggota pemilih adalah laki-laki. Mereka yang ditunjuk menjadi anggota pemilih itu adalah kepercayaan dari beberapa kelompok kecil dalam masyarakat yang merupakan semacam klan kecil di dalam satu dusun. Biasanya dalam bahasa Melayu Jambi disebut "*tobo*". Pada prinsipnya mereka yang melakukan pemilihan itu sendiri adalah calon untuk jabatan yang lowong itu. Artinya mereka yang melakukan pemilihan itu kalau dalam istilah populer dapatlah kita katakan *formatur*, yang berhak memilih dan dipilih. Pada masa lampau karena orang masih belum seberapa yang bisa baca tulis, maka alat yang dipakai adalah pertama tunjuk langsung, atau cara kedua memakai kotak suara dengan tanda gambar tertentu, umpamanya buah kelapa, padi, tebu, atau benda-benda lainnya.

Hubungan antara sesama unsur pimpinan terjalin rapat. satu sama lain dikarenakan adanya kesadaran fihak yang satu terhadap yang lainnya. Banyak masalah kenegaraan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan formal masa kini misalnya urusan tentang peningkatan kecerdasan masyarakat atau untuk kesejahteraan yang bersifat umum di antaranya seperti membuka atau mengadakan tempat-tempat pendidikan, koperasi, tempat-tempat peribadatan, olahraga dan lain-lain, tidak atau belum sempat dilaksanakan selama hal tersebut belum merupakan keputusan bersama. Di fihak lain banyak pula program atau rencana dari pimpinan informal yang baru terlaksana setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan fihak pemimpin adat, baik pasirah maupun penghulu.

Hubungan pasirah atau penghulu dengan masyarakat, hubungan para guru-guru, atau pemuka-pemuka masyarakat, satu dan lainnya punya cara dan bentuk senantiasa berpedoman kepada sesuatu yang bersumber dari kaedah-kaedah yang ada. Masyarakat diminta untuk memelihara keamanan seperti mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat menjadi sumber pertengkaran/perkelahian umpamanya perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, ataupun pegunjingan yang melampaui batas. Biasanya hal tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk instruksi atau pengumuman liwat media massa yang mereka miliki dan kuasai. Anggota masyarakat yang tidak mentaati ketentuan tersebut senantiasa diminta pertanggungjawabannya. Tidak jarang anggota masyarakat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya itu menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan atau pelanggaran yang diperbuatnya.

Lain pula halnya dengan pemimpin informal. Hubungan mereka dengan masyarakat lebih akrab dan betul-betul dilandasi oleh suatu kesadaran yang tinggi bahwa masyarakat harus dipandang sebagai teman atau kawan yang perlu dibela kepentingannya. Hampir setiap bentuk perhubungan sosial yang mereka lakukan adalah atas dasar saling memerlukan, bukan atas dasar takut atau dipaksa oleh sesuatu kekuatan yang melebihi kekuatan mereka sendiri.



*Gambar 6 :
Seorang Ulama sebagai pemimpin informal
sedang berada di tengah-tengah masyarakat biasa*

Jika sesuatu urusan atau kepentingan dari seorang guru agama yang dikerjakan oleh masyarakat, baik secara gotong royong maupun secara perorangan, biasanya didasarkan atas rasa simpati mereka kepada pribadi sang guru yang mereka bantu. Jadi sama sekali tidak disertai dengan perasaan terpaksa. Begitu pula sesuatu petunjuk yang dianjurkan oleh sang guru tersebut, selalu mereka turuti, oleh karena mereka yakin akan kebenaran kata-kata pemimpin itu.

Adapun perwujudan antara pemimpin masa kini seperti Pasirah, Penghulu dan sebagainya, dengan pemimpin informal seperti guru-guru agama atau *tuo-tuo kampung* (dusun) banyak sekali dipengaruhi oleh perubahan struktur kekuasaan. Pada masa lampau yaitu sebelum Indonesia merdeka, para pasirah dan penghulu itu berasal dari kerabat penguasa pada waktu itu. Dan tatkala itu masyarakat masih ada yang secara terpaksa menerima kepemimpinan mereka. Akan tetapi lain halnya dengan keadaan pada masa sekarang. Biasanya yang dipilih menjadi pasirah atau penghulu itu ialah, mereka yang disenangi masyarakat. Dengan demikian berarti pada diri seorang pemimpin harus melekat dua unsur. Pertama unsur pemimpin masa kini sebagai pasirah atau penghulu, kedua unsur pemimpin informal tak ubahnya seperti guru agama atau *tuo-tuo kampung*. Maka dari itu agak sukar untuk menetapkan besar atau kecilnya pengaruh dari masing-masing pemimpin tersebut.

BAGIAN V

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial yang terurai di dalam naskah ini adalah dimaksudkan sebagai sistem pengendalian yang ada di dalam suatu *komunitas kecil* seperti dusun dan marga yang terlaksana agar setiap warga masyarakat setempat dapat berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam komunitas tersebut. Untuk mengendalikan itu maka di dalam komunitas kecil orang Melayu Jambi mengenal beberapa macam cara yang ditempuh. Caranya ialah dengan mempertebal keyakinan, mengembangkan rasa malu dan mengembangkan rasa takut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Jalur utama untuk mempertebal keyakinan setiap warga masyarakat ialah melalui jalan pendidikan. Di pedusunan orang Melayu Jambi pada akhir-akhir ini telah dipenuhi oleh sekolah-sekolah Dasar. Bagi dusun-dusun yang berpenduduk padat ada yang telah berdiri lebih dari satu buah Sekolah Dasar. Bahkan ada satu dusun yang telah agak berkembang, berdiri pula SMP dan SMA, seperti di dusun Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Bungo Tebo. Selain pendidikan umum tersebut, di mana-mana terdapat pula tempat-

tempat pendidikan agama, seperti madrasah-madrasah dan tempat-tempat pengajian di rumah-rumah, di surau dan di mesjid-mesjid. Pendidikan non formal juga terdapat di daerah ini antara lain dalam bentuk kursus-kursus, atau latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan pelbagai macam ketrampilan serta pengetahuan kejuruan kepada pemuda-pemuda serta ibu-ibu rumah tangga. Maka dari itu pada dusun-dusun tertentu terlihat adanya papan-papan nama: Kursus PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), kursus menjahit pakaian, kursus pengetahuan dasar dan lain-lain.

Pada sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dan kursus-kursus tersebut di atas, diberikan berbagai macam mata pelajaran yang masing-masing diselenggarakan dengan program dan tujuan institusional dari setiap lembaga pendidikan tersebut. Adapun mata pelajaran pokok yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan itu adalah: Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Berhitung/Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Kecakapan Khusus, dan Ushuluddin dan Fiqih.

Melalui macam-macam pendidikan itulah diharapkan kesejahteraan umum masyarakat akan bertambah baik dan sekaligus berarti adanya usaha peningkatan kecerdasan warga masyarakat secara keseluruhan. Pada hakekatnya yang menerima pendidikan tersebut di atas dipersiapkan untuk :

1. Menjadi calon pemimpin
2. Menjadi manusia bermental membangun
3. Dapat menjadi pelopor terciptanya lingkungan yang sehat dan serasi
4. Pelopor terciptanya makanan yang sehat dan bergizi.

Di samping jalur pendidikan, maka sugesti sosial adalah juga memegang peranan dalam usaha mempertebal keyakinan setiap warga masyarakat. Perwujudan sugesti sosial itu bagi masyarakat orang Melayu Jambi kebanyakan bersumber dari dongeng-dongeng, cerita rakyat dan pepatah petiti. Di dalamnya selalu terlukis hal-hal yang diinginkan tentang tingkah laku dari setiap orang.

Berikut ini akan kita ungkapkan beberapa contohnya :

1. *Dongeng Orang Dewasa, yang berjudul "Bayan Budiman"*.

Dongeng ini mengisahkan seorang isteri yang mau melakukan perbuatan serong dengan laki-laki lain, sementara sang suami pergi melakukan perjalanannya jauh mencari nafkah buat keluarga. Si burung bangau yang cerdik lagi pandai membalas budi baik tuannya yang laki-laki. Ia berhasil mengalihkan perhatian si isteri tuannya itu dengan bercerita tentang sesuatu kejadian di tanah seberang yang sempat membuat si isteri tuannya jadi terpukau, sehingga tidak disadari batas perjanjiannya untuk bertemu dengan kekasih gelapnya itu. Karena hari keburu siang dan suaminya pun pulang dari perjalanan jauh. **Makna cerita itu adalah sebagai berikut: Bahwa orang harus berterima kasih atas sesuatu pertolongan yang pernah diterimanya, dan mengabdikan kepada**

kebenaran serta menolak perbuatan maksiat yang dimurkai Allah, dan dimusuhi masyarakat.

2. *Cerita Rakyat, yang berjudul "Rangkayo Hitam"*

Di daerah Jambi, terutama di daerah sepanjang Batanghari sangat populer nama *Rangkayo Hitam*, yaitu nama seorang Pahlawan Kerajaan Jambi yang gagah perkasa, serta berani mengambil resiko yang amat besar demi kebebasan negerinya dari kekuasaan lain.

Ceritanya: Kurang lebih 300—400 tahun yang lalu raja Jambi yang memerintah pada waktu itu, sudah menukar keyakinan agamanya dari agama Hindu kepada agama Islam. Tetapi kerajaannya masih berada di bawah kekuasaan raja di Jawa yang masih memeluk agama Hindu. Untuk melepaskan diri dari tindasan raja yang beragama Hindu itu Rangkayo Hitam anak laki-laki termuda dari raja Jambi tersebut memohon restu ayahnya, agar dirinya diperkenankan untuk memerangi raja di Jawa tersebut. Dengan kesaktian dan kemahirannya dalam bersilat lidah dan memainkan senjata ia berhasil merebut senjata yang maha ampuh dari salah seorang Empu di kerajaan Jawa tersebut yang bernama "Keris Siginjel". Maka berjatuhlah para punggawa, para panglima, dan hulubalang kerajaan Jawa tersebut oleh amukan Rangkayo Hitam. Akhirnya raja Jawa mengajak Rangkayo Hitam berunding. Hasil perundingan Kerajaan Jambi dibebaskan dari penjajahan raja Jawa tersebut, kemudian menjadi dua kerajaan yang bersahabat, tukar menukar kebudayaan, dan saling bantu membantu.

Karena jasanya, maka beberapa tahun kemudian kerajaan Jambi diserahkan ayahnya kepada Rangkayo Hitam. Demikian pula setelah mangkatnya bertahun-tahun kemudian, ia dipandang sebagai orang keramat. Sampai sekarang makamnya ramai diziarahi orang.

Makna cerita ini adalah sebagai berikut: Bahwa perjuangan yang suci, demi tanah air dan agama yang diyakini, akan menemui kemenangan yang gemilang. Ajakan yang baik, meskipun bersumber daripada lawan, patut diterima, demikianlah sikap dari seorang ksatria sejati.

3. *Pepatah*

Pada orang Melayu Jambi cukup banyak pepatah-petitih yang digunakan orang untuk sandaran atau landasan hukum terhadap sesuatu masalah yang perlu dicari penyelesaiannya, atau digunakan untuk menjinakkan hati seseorang daripada petualangannya. Buat mendorong orang supaya mau berbuat sesuatu, kendati harus menerima resiko yang bermacam-macam.

Umpamanya :

- a. Sebiduk ada selantai idak
Indonesianya : Sama-sama satu perahu, berlainan tempat duduk.

- Maknanya : Sama-sama dalam sebuah kampung, akan tetapi tidak pernah sejalan pendapat dan keinginannya dengan kepentingan masyarakat.
- b. Bagaikan panas di dalam rimbo (hutan)
 Indonesianya : Laksana sinar matahari di dalam hutan, yaitu ada yang terang, dan ada yang lembab, karena dihilangi daun-daunan.
 Maknanya : Hukum itu tidak sama rata pelaksanaannya, terhadap mereka yang dimalui/ditakuti, hukum itu dientengkan, sedang bagi mereka yang tidak ada apa-apanya, hukum itu dijalankan menurut yang sebenarnya.
- c. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri awak, lebih baik di negeri awak
 Maknanya : Walau bagaimanapun sulitnya kehidupan di kampung halaman sendiri, akan lebih baik daripada beberapa kesenangan/kemakmuran tetapi di tanah perantauan.
- d. Terbujur lalu, terlintang patah
 Maknanya : Sesuatu tujuan itu harus dicapai, kendati jiwa dan raga menjadi taruhannya.
- e. Diagak dulu, baru dibagi
 Maknanya : Segala sesuatu yang hendak dilaksanakan itu haruslah dibuat perhitungannya terlebih dahulu. Bila sudah rampung, baru dijalankan.
- f. Biar lambat, asal selamat
 Maknanya : Siap segala sesuatunya itu terlebih dahulu, baru dimulai sesuatu pekerjaan. Lambat di sini berarti mempersiapkan, bukan kerjanya yang harus lambat.

Dalam pada itu untuk meyakinkan setiap warga masyarakat, dapat pula melalui propaganda. Pada waktu-waktu tertentu adakalanya, sebagai usaha untuk memelihara serta memperbaiki tingkah laku sekelompok lapisan atau golongan masyarakat, seringkali diusahakan berbagai bentuk pertemuan di dalam kalangannya. Ada yang diselenggarakan dalam rangka pesta kawin, memperingati hari-hari besar Islam pada saat-saat menjelang atau sesudah selesainya suatu peribadatan, seperti menjelang tibanya waktu sembahyang Tarawih di dalam bulan puasa dan sebagainya.



Gambar 7:

Pertemuan antara para anggota masyarakat untuk membina kesejahteraan hidup di dalam dusunnya

Di dalam pertemuan yang lebih bersifat adat istiadat serupa itu biasanya yang menjadi fokus dari pembicaraan adalah masalah kekeluargaan. Pada pesta kawin umpamanya, salah seorang dari keluarga yang mengadakan pesta itu, tentunya yang terpendang di dalam keluarga itu, memberi nasehat kepada sepasang mempelai baru. Walau tujuan pembicaraan dialamatkan kepada sepasang mempelai, namun di balik itu semua senantiasa diselipkan kata-kata dalam bentuk sindiran, kiasan yang bersifat umum, dialamatkan kepada semua orang yang berada di situ.

Sebagai contoh, "Tunjuk ajar, tegur sapa" dari salah seorang sesepuh kepada mempelai yang berbunyi "TAHU BEKATI SAMO BERAT, TAHU DIAGAK DENGAN KALU" kata-kata ini sangat umum sifatnya, karena arti yang terkandung di dalam susunan kata-kata tersebut menganjurkan kepada siapa saja supaya berlaku adil dan bijaksana, memiliki rasa malu dan takut. Malu dan takut membuat sesuatu kesalahan,

Demikian pula kalau pertemuan tersebut diadakan dalam bentuk pertemuan keagamaan, maka materi dari pembicaraan adalah masalah peningkatan amal dan ibadat kepada Allah Swt yang dikaitkan dengan kepentingan kemasyarakatan. Bagaimana supaya masyarakat selalu hidup penuh tenggang rasa, rajin melakukan kerja bakti, meningkatkan pengetahuan, memperlipatgandakan hasil produksi, dan banyak lagi.

Masyarakat orang Melayu Jambi, sebagai pemeluk agama Islam yang patuh, jika tidak dapat dikatakan fanatik, sejak semula sudah selalu berhadap-

an dengan obyek berupa benda-benda, orang-orang, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, norma-norma, dan nilai-nilai yang bercorak dan berbau Islam. Sebagai akibat daripada seringkalinya dihadapkan kepada obyek-boyek serupa itu, pastilah timbul di dalam hati sanubari orang seorang atau masyarakat untuk menerima norma-norma dan nilai-nilai yang bercorak Islam tersebut, sebagai pedoman baginya untuk meningkatkan kesempurnaan tingkah lakunya. Dipandang dari sudut kenyataan yang ada, masyarakat orang Melayu Jambi sesungguhnya telah sejak lama mengambil alih tingkah laku yang didasarkan kepada norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Sebagai pribadi muslim atau masyarakat Islam, orang Melayu Jambi dengan keras memantangkan untuk memakan daging babi. Akan tetapi pada suatu ketika kepadanya dikatakan bahwa ia sedang memakan daging babi, pastilah makanan yang telah dimakannya itu akan dimuntahkannya. Atau seseorang yang sedang berjalan-jalan kemudian datang anjing menyenggolnya, pastilah anjing itu akan dipukul atau dilemparinya, disertai maki dan serapahnya. Bagi mereka babi dan anjing itu adalah binatang bernajis, wajib dijauhi. Demikian jauhnya agama Islam sudah meningkatkan kesempurnaan tingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat.

MEMBERI IMBALAN

Usaha untuk pengendalian sosial, biasanya pula diberikan dalam bentuk pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini biasanya diberikan kepada mereka yang dipandang berjasa atau diharapkan akan berbuat jasa kepada kepentingan bersama, yaitu mereka yang dengan tenaga dan fikirannya secara sukarela memberikan dharma bhaktinya seperti guru-guru mengaji, para pemberani yang berhasil menyelamatkan harta dan nyawa manusia, jenis imbalan itu tidak selalu sama karena erat hubungannya dengan tujuan dari pemberian imbalan itu sendiri. Seandainya yang akan diberi imbalan itu seorang pendidik, seringkali imbalan itu diberikan dalam bentuk imbalan yang konkrit, berupa bantuan mengerjakan perbaikan rumah tempat tinggalnya, membantu mengerjakan sawah/ladanganya, atau uang tunai dan emas perak. Akan tetapi imbalan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa karena keberaniannya sering dalam bentuk yang tidak konkrit seperti pujian atau sanjungan. Kecuali itu, mereka paling-paling diberikan seperangkat alat-alat senjata, yang lazim dipakai untuk melawan musuh atau membela diri. Ini terjadi pada masa lampau. Pada masa kini seseorang yang sempat menunjukkan sesuatu kebbaikannya kepada sesamanya, paling-paling dipilih jadi Ketua Lembaga Sosial di dusun atau dijadikan Kepala Dusun atau dijadikan pegawai mesjid.

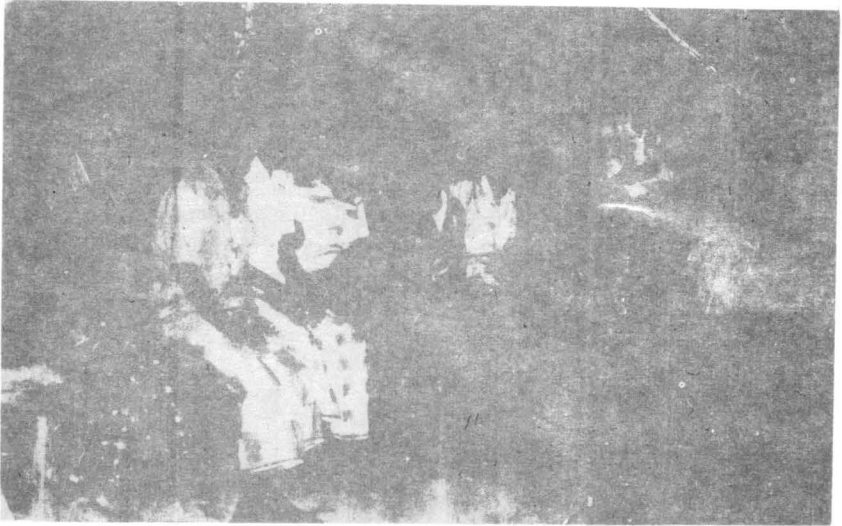
Imbalan serupa ini biasanya disebabkan adanya dorongan perasaan pengakuan akan kebenaran, maupun kebaikan yang diperlihatkan secara nyata kepada mereka yang meyakini prestasi seseorang itu, tak ubahnya sebagai pelunas hutang budi masyarakat atas jasa-jasanya.

Di balik itu semua, pemberian imbalan semacam itu juga mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Maksud tersebut adakalanya mengandung motivasi agar kebiasaan yang baik itu dapat menjadi suri teladan bagi yang lain-lainnya. Manakala di dalam suatu masyarakat ada manusia-manusia yang dapat menjadi pedoman bagi segala bentuk tingkah laku manusia, lambat laun masyarakat akan mengambil alih tingkah laku yang terpuji itu. Dan jika suasana semacam itu telah menjadi kenyataan, maka semua masalah atau peristiwa sosial yang timbul akan mudah sekali dikendalikan. Gambaran masyarakat serupa itu oleh orang Melayu Jambi dikiaskan dalam peribahasannya: Tebing lurus rantau selesai, air jernih ikannya jinak, rumput muda kerbaunya gemuk.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Suatu kebiasaan yang terdapat hampir di setiap dusun dalam daerah Jambi, baik orang Melayu Jambi maupun orang Kerinci, ialah suka usil atau iseng untuk membicarakan, mencela atau mentertawakan keburukan sifat seseorang. Adapun tempat yang paling banyak digunakan untuk mengadakan perbuatan tersebut, di antaranya adalah di bangku-bangku panjang yang terdapat di pekarangan mesjid, di muka halaman rumah orang, di tepian mandi, di jembatan-jembatan yang berada di tengah atau di ujung dusun. Begitu pula pada saat-saat orang berkelompok-kelompok menunggu saat menjelang dimulainya sesuatu sembahyang berjemaah atau upacara sesuatu perayaan di mesjid atau di bangunan-bangunan lain, adalah merupakan saat yang paling banyak terpakai untuk keperluan tersebut.

Adapun bahan pembicaraan yang seringkali dibicarakan berkisar perihal tingkah laku atau perangai seseorang yang menyimpang dan berada di luar pola yang umum bagi masyarakat setempat, seperti tentang orang yang rakus, pemalas, pembohong, penipu, pencuri, pengkhianat, pemabuk, suka bertengkar dan sebagainya. Pembicaraan semacam itu banyak juga memberi pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tampak pada beberapa hal tertentu, umpamanya malu atau takut akan dirinya menjadi bahan pergunjangan atau celaan orang banyak. Akibatnya ada juga orang yang berusaha menjauhkan dirinya dari pekerjaan tersebut. Maka dari itu adalah tidak menguntungkan bilamana seseorang yang terlanjur memperbuat sesuatu pekerjaan tercela, karena ia pasti akan menerima cemooh, dan cacian orang banyak, karena saking malunya pelaku perbuatan tersebut, lalu menjadi nekad umpamanya, pergi dari kampung halamannya, tanpa pamit, berjalan ke rantau orang tanpa sesuatu persiapan yang sempurna dan menjadi pe-tualang.



Gambar 8 :

Warga masyarakat sedang duduk di bangku-bangku panjang dengan topik pembicaraan sesenang mereka

Sebagai penduduk yang memegang teguh adat istiadat warisan sosial masa lalu, dan pemeluk agama Islam, orang Melayu Jambi, memiliki tabiat pemalu. Tabiat pemalu tersebut, tercermin dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Mereka merasa malu bila sengaja atau terpaksa serta terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan norma-norma adat dan agama yang mereka peluk. Rasa malu tersebut meliputi beberapa perbuatan yang memalukan seperti, mencuri, menipu, memperkosa, berzina, perbuatan sombong mendurhakai kepada orang yang dihormati/ditakuti, berkelahi, mabuk-mabuk, jadi peminta-minta melalaikan suruhan agama (sembahyang), dan banyak lagi.

Bagi mereka rasa malu tersebut perlu dimiliki oleh setiap individu, baik ia orang biasa atau orang terpandang. Manusia yang kurang memiliki rasa malu, berarti kurang keimanannya, dan mudah sekali tergelincir ke jurang kehinaan dan kenistaan. Untuk tidak sampai terperosok ke jurang kehinaan atau kenistaan tersebut, ada beberapa cara untuk mempertebal rasa malu di kalangan anggota masyarakat. Cara-cara yang lazim dipakai ialah kepada mereka ditanamkan pengetahuan keagamaan dan pengetahuan kemasyarakatan (adat-istiadat) setempat, mengutuk serta menindak setiap perbuatan individu/kelompok yang tidak bermoral secara tegas dan tanpa pandang bulu. **Menyisihkan** mereka dari pergaulan orang banyak.

Pengaruh agama dalam mempertebal rasa malu cukup besar. Di muka telah dikatakan, bahwa rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Pada

umumnya masyarakat Melayu Jambi, amat malu dan akan marah sekali, kalau dirinya dikatakan tidak beriman. Dalam Islam ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang memalukan itu adalah dosa. Sebagai penganut agama Islam, orang berusaha menghindari diri daripada berbuat sesuatu yang dapat membuatnya jadi berdosa kepada Tuhan. Menghindari dosa kepada Allah Swt identik sekali dengan perbuatan yang mempertebal rasa malu. Bahkan sulit untuk menetapkan mana yang lebih besar pengaruh agama Islam atau adat istiadat setempat, karena yang satu dengan yang lain hampir tidak ada garis pemisah yang tegas.

Sebagai suku bangsa yang memiliki peradaban, orang Melayu Jambi, menetapkan aturan-aturan tertentu di dalam pergaulan hidup masyarakatnya. Ada seperangkat aturan yang membolehkan orang melakukan hal-hal tertentu, bahkan kadangkala dianjurkan, dan didorongkan. Sebaliknya ada pula seperangkat aturan yang melarang setiap orang memperbuatnya. Aturan-aturan seperti itu mereka sebut larangan, dan terhadap mereka yang melawan aturan-aturan tersebut dikenakan sanksi hukum tertentu. Sesuatu yang tidak boleh diperbuat/dilarang itu cukup banyak macamnya, namun dalam naskah ini kami cukupi dengan menuliskan beberapa hal saja, yaitu: mencuri, menipu, membunuh orang atau hewan peliharaan, berzina, berkelahi, berjudi, mabuk-mabukan, menganiaya, membongkar harta benda orang lain dan lain sebagainya.

Terhadap mereka yang terbukti melakukan perbuatan terlarang itu, dijatuhi bermacam-macam hukuman, ada yang dijatuhi hukuman berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, ada yang dijatuhi hukuman adat, ada yang dijatuhi hukuman syarak Islam, atau hukuman masyarakat. Perbuatan yang melawan hukum syarak Islam seperti berzina dengan isteri atau anak seseorang biasanya perkaranya diselesaikan menurut hukum Islam, yaitu antara kedua pelaku perbuatan tercela tersebut harus dikawinkan secepat-cepatnya. Terhadap pelaku yang melakukan perbuatan penganiayaan/pembunuhan, pada masa lampau biasanya diselesaikan secara hukum adat, dengan jalan memampas/membangun, yaitu: pihak yang dipersalahkan diwajibkan mengaku kesalahannya kepada pihak yang mendakwa, disertai membayar kerugian yang diderita pihak pendakwa, ada yang harus memotong ayam, kambing, dan kerbau, dilengkapi dengan beberapa meter kain putih, beras, kelapa selemak manis, sesam garam. Belakangan ini pelaksanaan hukuman seperti ini sudah jarang sekali terjadinya. Di dalam adat orang Melayu Jambi, ada dimuat pasal yang mengatur tentang itu yang berbunyi, "Luko memampas, mati membangun"

Akan tetapi bagi mereka yang melakukan pencurian, penipuan, perjudian, dan sejenisnya hal tersebut diselesaikan oleh pihak Pemerintah yang berkuasa, didasarkan kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan hukuman, sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, maka hukuman tersebut, dilaksanakan oleh mereka yang berwenang untuk mengu-

rus/menindak pelaku perbuatan tersebut. Hukum Islam biasanya dilaksanakan oleh *Pegawai Syarak* setempat, seperti Hakim, Khatib, Bilal dan stafnya. Hukum adat dilaksanakan oleh pasirah, penghulu bersama-sama dengan *leed* adatnya, sedangkan perkara pidana diselesaikan/dijalankan oleh fihak pemerintah dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan secara adat adalah sebagai berikut: Setelah beras, kambing dan semua selemak semanis sesam segaram; yaitu kelapa, gula, bumbu-bumbu, garam dan sebagainya itu terkumpul di rumah fihak terdakwa, segera dimasak, dan dipanggil beberapa orang tertentu (kerabat kedua belah fihak) yang bersengketa itu ke rumah fihak terdakwa pada waktu tertentu. Nasi dan daging kambing yang sudah dimasak itu dimakan bersama-sama setelah didahului dengan pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan saling maaf-memaafkan antara anggota keluarga kedua belah fihak yang bersengketa itu dengan bersalam-salaman. Biasanya hal itu didahului oleh pidato atau fatwa dari kepala dusun atau kepala marga, yang inti sari dari fatwanya mengarahkan agar masing-masing fihak berusaha melupakan semua peristiwa sedih yang telah terlanjur terjadi, serta menghilangkan rasa permusuhan dan dendam. Di dalam seloka adat Jambi disebutkan, "Api padam, puntung jangan lagi berasap", "Rumah sudah, pukul pahat jangan berbunyi lagi", atau "Yang ditijaklah lapuk, yang dilangkah lah lalu".

Pengaruh hukuman tersebut di dalam kehidupan masyarakat besar sekali, sebab dengan diberi hukuman tersebut berarti semua kesalahan yang pernah dilakukannya itu, telah membangkitkan kemarahan, kebencian, atau kekecewaan orang banyak. Bila hal tersebut telah disadarinya, pastilah ia tidak ingin untuk mengulangi perbuatan yang sama.

Di samping itu masyarakat merasa ngeri dan takut untuk melakukan perbuatan serupa itu, karena takut untuk menerima hukuman atas kesalahan yang diperbuat, yang jelas mendatangkan beberapa kerugian bagi dirinya, rugi moral, dan rugi pula material. Ia bisa kehilangan harga diri di dalam kelompoknya sendiri, sekaligus kehilangan kesempatan untuk berkarya.

BAGIAN VI

BEBERAPA ANALISA

Dari apa yang telah kita ungkapkan sebelum ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa baik struktur sosial maupun proses sosial yang terdapat dalam kehidupan komunitas kecil orang Melayu Jambi, boleh dikatakan hampir tidak tampak hal-hal yang istimewa yang sekiranya akan perlu mendapat perhatian secara khusus dari para antropolog. Sebab apabila hasil penelitian ini dikomparasikan dengan sistem komunitas yang dikenal di daerah-daerah lain di Indonesia, mungkin tidak ada perbedaan fundamental. Dan kalau pun ada perbedaan, hal itu hanyalah nampak, dalam wujud variasinya.

Secara administratif suatu komunitas kecil di daerah orang Melayu Jambi disebut *dusun* dan dikepalai oleh seorang *penghulu*. Sekelompok dari empat sampai delapan buah *dusun* merupakan suatu kesatuan teritorial yang disebut *marga* dan dikepalai oleh seorang tokoh adat yang disebut *pasirah*. Di dalam melakukan pekerjaan yang bersifat prinsipil, *penghulu* kepala *dusun* didampingi oleh pembantu atau penasehatnya yang disebut *leed adat*. Organisasi pemerintahan *dusun* sekaligus menjadi pimpinan mencakup dari rakyat *dusun*. Maka dari itu para *leed adat* beranggotakan unsur-unsur alim ulama, cerdik pandai dan tuo tunganai (*pemuka adat*). Pimpinan serupa ini pada dasarnya mengemban tugas pokok, yaitu: memelihara ketertiban dan kesejahteraan *dusun*. *Penghulu* dipilih oleh dan dari penduduk *dusun* itu sendiri dengan berpedoman pada ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

Dalam kenyataan hidup masyarakat orang Melayu Jambi pada mulanya mereka membedakan antara orang-orang bangsawan yang terdiri dari Raden, Sayid, Kemas, dan para Alim Ulama, dengan orang-orang kebanyakan yang disebut *orang kecil*, seperti petani penggarap, nelayan dan para pekerja kasar lainnya. Kerangka susunan masyarakat tersebut secara bertingkat ialah kaum bangsawan dan para alim ulama merupakan lapisan atas sedangkan orang-orang kebanyakan menjadi lapisan masyarakat bawah. Akan tetapi satu-satunya perubahan lapisan yang agak menonjol pada masa kini ialah bahwa akibat dari pengaruh kemajuan di bidang pendidikan dan persaingan bebas dalam bidang ekonomi, maka orang telah menempatkan para ilmuwan yaitu orang-orang pandai dan bahkan orang-orang kaya berada pada lapisan atas, di samping para alim ulama. Sedangkan para keturunan bangsawan tidak lagi menjadi ukuran penghargaan bagi masyarakat.

Sistem pengendalian sosial bagi masyarakat orang Melayu Jambi telah ditempuh dalam beraneka macam jalur, baik yang bersifat mendidik, mengajak, ataupun mempengaruhi warga masyarakat agar mereka bisa berbuat sesuai menurut kaedah-kaedah yang berlaku. Pendidikan agama misalnya, adalah merupakan salah satu jalur penting dalam rangka mempertebal keyakinan masyarakat. Maka dari itu lembaga ini diadakan secara universal untuk hampir setiap sejak berumur tujuh tahun. Walaupun pada pokoknya mereka hanya mendapat pengetahuan dasar di dalam pengajian Al Qu'an, tapi Al Qur'an itu sesungguhnya, memang berisi petunjuk-petunjuk yang lengkap tentang bagaimana orang harus bertingkah laku dan berbuat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pada waktu sekarang lembaga pendidikan agama pada umumnya telah diasuh oleh pemerintah melalui Departemen Agama.

Di samping lembaga pendidikan agama, ada pula lembaga pendidikan umum, yaitu pendidikan yang berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan umum tersebut telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi orang-orang yang menikmati pendidikan umum pada masa itu hanya terbatas pada segelintir lapisan masyarakat ter-

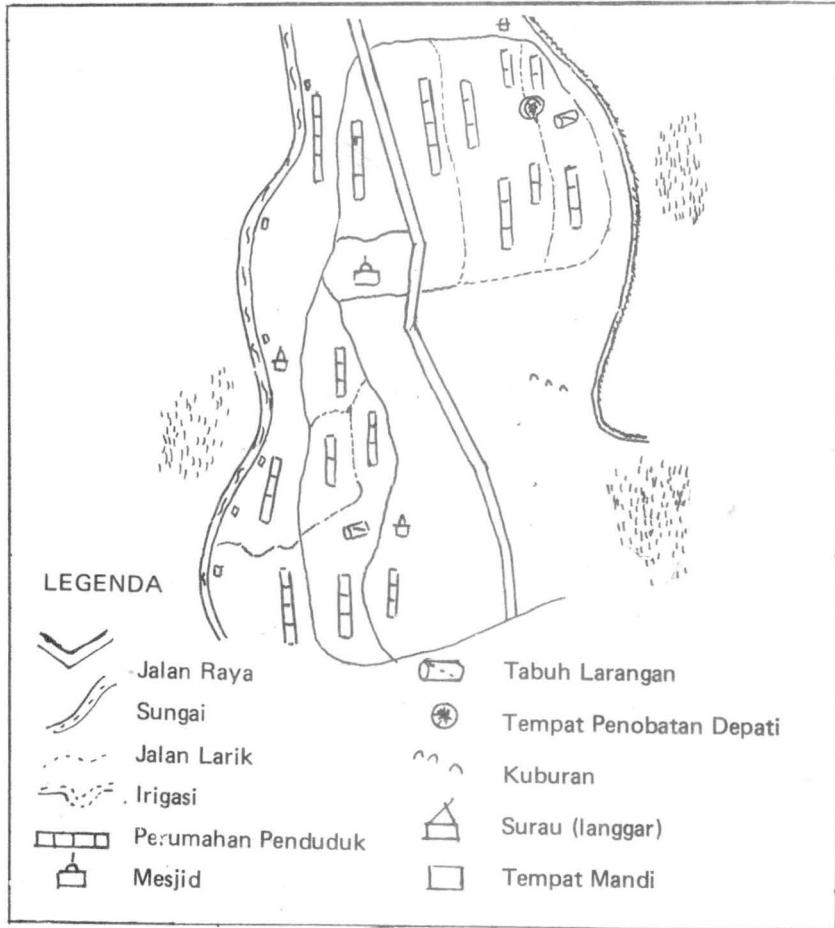
tentu, seperti anak-anak para bangsawan yang erat hubungan kerjanya dengan pihak pemerintah. Kemudian lembaga pendidikan umum tersebut mulai meningkat kuantitasnya semenjak kemerdekaan Indonesia, apalagi sejak zaman pemerintahan orde baru yang mengenal pemerataan dalam bidang pembangunan. Sejak saat itu banyaklah didirikan sekolah-sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Untuk melanjutkan studi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan ke Perguruan Tinggi ada juga di antara warga dusun, terutama anak-anak orang yang mampu pergi ke Ibukota Propinsi, baik di dalam maupun di luar daerah, seperti di Padang, Medan, Jakarta, Bandung dan sebagainya.

Alat pengendalian sosial yang juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, ialah hukum. Melalui peraturan-peraturan hukum adat, orang dicegah ataupun ditindak sehubungan dengan perbuatan penyelewengan dari kaidah-kaidah yang berlaku di daerah itu. *Hukum adat* Melayu Jambi adalah hukum yang tidak tertulis. Sanksi dari hukum adat, selalu berwujud pemberian ganti rugi. Penggantian mana akan dinikmati bersama warga setempat atau diserahkan langsung kepada pihak-pihak, yang merasa dirugikan. Jadi maksud pembayaran ganti kerugian tersebut ialah untuk mengembalikan keseimbangan dan ketenangan masyarakat yang digoncangkan oleh kejahatan yang diperbuat oleh si pelaku.

Keputusan adat tidak pernah dijatuhkan oleh seseorang, melainkan oleh suatu sidang yang terdiri dari para anggota leed adat di bawah penghulu sebagai ketua. Jika sidang hukum adat tidak dapat mengambil keputusan mengenai sesuatu perkara yang rumit, maka perkara tersebut seringkali diajukan kepada pihak yang berwajib berdasarkan hukum negara. Dengan demikian berarti di daerah Melayu Jambi selain berlaku hukum adat, berlaku juga hukum negara. Dalam menempuh sesuatu proses hukum, adakalanya terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum negara, tapi kebanyakan adalah saling isi mengisi. Namun satu hal yang sudah mutlak terlepas dari hukum adat, ialah setiap perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa serupa ini mutlak ditangani oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi atau jaksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari uraian di atas wajar apabila kita mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu media yang ampuh untuk membawa perubahan ke arah mentalitas pembangunan. Sebenarnya potensi untuk membangun di daerah ini cukup besar, asalkan kita tahu bagaimana caranya menggerakkan potensi itu. Dalam hubungan ini pemimpin formal dan pemimpin informal serta tuo-tuo tengganai dusun, adalah merupakan unsur penggerakannya. Sampai saat ini pembangunan dalam bidang pemerintahan secara administratif formal belum banyak membawa efek-efek yang positif bagi masyarakat. Malahan adakalanya menimbulkan birokrasi dalam arti buruk. Hal ini disebabkan kurangnya korelasi antara peraturan-peraturan dan pelaksanaannya. Di pihak lain tampak juga adat istiadat lama yang dinilai masyarakat sebagai penghalang kemajuan. Oleh

sebab itu pada beberapa tempat sudah mulai timbul kesadaran bahwa adat istiadat dan sistem upacara yang banyak mengandung pemborosan perlu disederhanakan. Akan tetapi patut juga disadari serta dipertimbangkan bahwa orang Melayu Jambi sebagaimana suku-suku bangsa lain biasanya masih bangga dengan identitas adat istiadatnya. Oleh sebab itu hendaknya penyesuaian dari adat itu dengan alam pembangunan dewasa ini harus dilakukan berhati-hati, sebab jika tidak, kemungkinan akan terjadi suatu kesalahan prinsip, sehingga dikhawatirkan akan mematikan intisari hidup dari penduduk serta menimbulkan apatisme di kalangan mereka.



Gambar 9 :
Pola perkampungan orang Kerinci

BAB KETIGA

KOMUNITAS KECIL ORANG KERINCI

BAGIAN I

IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan Keadaan Geografis. Kabupaten Kerinci yang hampir keseluruhan daerahnya menjadi tempat pemukiman orang-orang Kerinci, adalah salah satu dari enam Kabupaten dalam daerah Propinsi Jambi. Di sebelah barat dan utara Kabupaten ini berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi. Sebelum tahun 1957 daerah Kabupaten Kerinci masih merupakan satu Kawedanan dalam lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci Propinsi Sumatera Tengah. Tapi kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 19/1957 tanggal 9 Agustus 1957 yang telah diperbarui menjadi Undang-undang No. 81 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Jambi, maka Kerinci termasuk ke dalam wilayah pengembangan daerah Tingkat II dalam Propinsi Jambi.

Kabupaten Kerinci terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Gunung Raya. Tiap-tiap wilayah Kecamatan itu membawahi dua atau lebih Kemendapoan, di mana masing-masing Kemendapoan mengkoordinir beberapa buah dusun yang berdekatan. Sedangkan daerah Kemendapoan Depati VIII yang dijadikan lokasi penelitian berada di dalam wilayah Kecamatan Air Hangat. Daerah ini terletak di bagian timur Kabupaten yang diapit oleh Kecamatan Gunung Kerinci, Sitinjau Laut dan Kecamatan Sungai Penuh.

Alam Kerinci terkenal sangat subur, tanahnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung, di samping mempunyai hutan rimba yang lebat. Daerah pegunungan di Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan mencapai ketinggian antara 500 meter sampai 1.600 meter dari permukaan laut. Adapun nama gunung-gunung yang terdapat di sini, ialah antara lain Gunung Raya, Gunung Patah Sembilan, Gunung Kuniyit dan Gunung Kerinci. Gunung Kerinci adalah merupakan gunung berapi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian \pm 3.805 meter.

Di antara gunung-gunung itu terdapat beberapa buah danau dan yang terbesar di antaranya ialah Danau Kerinci, kemudian menyusul danau-danau kecil lainnya, seperti: Danau Bento, Danau Lalo dan lain-lain. Air dari danau

ini mengalir menjadi sungai Merangin. Adapun sumbernya berasal dari beberapa buah sungai kecil, di antaranya ialah sungai si Ulah, sungai Penawar dan sungai Jujun. Sungai-sungai ini boleh dikatakan tidak berfungsi sebagai sarana perhubungan karena arusnya deras, dangkal serta dipenuhi oleh batu-batu besar. *Hutan lindung* yang lazim pula disebut hutan Kerinci terletak di perbatasan, di lereng gunung Kerinci sebelah barat. Di dalam hutan itulah terdapat sejumlah besar kekayaan alam, seperti berjenis-jenis kayu, rotan, damar dan aneka macam jenis binatang seperti: harimau, ular, gajah, rusa, kancil, kera dan kiang.

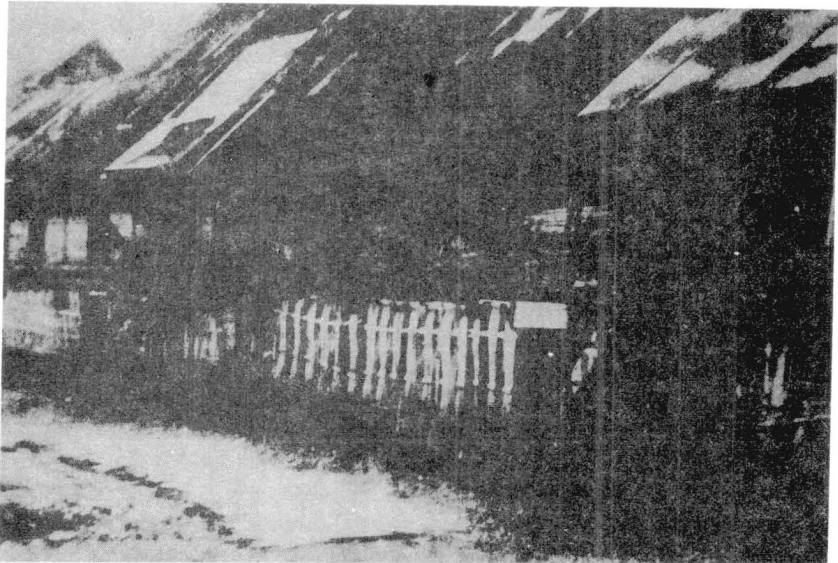
Kesuburan dan kemudahan pengolahan tanah Kerinci menyebabkan orang Kerinci menjadi petani yang rajin. Selain dari sawah-sawah yang terbentang luas di lereng-lereng gunung, mereka juga banyak mengolah berbagai macam jenis tanaman lain seperti: tomat, kentang, kopi, kulit kayu manis (*caseavera*), cengek dan sebagainya.

Pola Perkampungan. Dusun sebagai tempat kediaman yang tepat pada masyarakat orang Kerinci dipenuhi oleh perumahan yang mengelompok padat dan terletak berdekatan satu sama lain. Dusun tersebut merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat territorial genealogis. Dikatakan demikian oleh karena secara territorial dusun di Kerinci terbagi atas dua atau lebih larik-larik. Sedangkan secara genealogis setiap dusun terbagi atas beberapa lurah. *Lurah* terdiri atas beberapa *kelebu* dan tiap-tiap kelebu terbagi lagi atas beberapa kesatuan kecil yang disebut *perut*. Perut, Kelebu dan Lurah terdiri dari orang-orang yang berasal dari keturunan yang sama menurut garis ibu. Masing-masing lurah menempati suatu *larik* tertentu yang berwujud kumpulan dari rumah panjang - rumah panjang beserta dengan pekarangannya dan segala apa yang ada di atasnya. Beberapa tempat terlihat rumah-rumah tersebut sampai berpuluh-puluh buah, sehingga larik menjadi sangat panjang.

Dusun-dusun di Kerinci biasanya merupakan sekelompok rumah yang didirikan di sepanjang dan di sekitar jalan utama. Rumah-rumah itu didirikan orang secara amat berdekatan dan hanya dibatasi oleh jalan-larik yang berfungsi sebagai jalan dalam dusun. Antara satu dusun dengan dusun yang lain biasanya dibatasi oleh tanah-tanah pertanian, sawah dan ladang milik warga masyarakat dusun yang berdekatan.

Bangunan tempat tinggal penduduk berwujud rumah panjang. Sebuah *rumah panjang* yang merupakan bagian daripada larik, secara membujur dapat dibagi atas dua bagian yang dinamakan orang rumah luar dan rumah dalam. Ruang luar dipergunakan orang untuk tempat tamu, tempat mengadakan kenduri ataupun tempat tidur anggota laki-laki dari keluarga yang belum kawin. Sedangkan ruang dalam terbagi pula atas bilik-bilik. Bilik-bilik ini berfungsi sebagai tempat tidur terutama sekali tempat tidur dari keluarga yang mendiami rumah itu, yang dinamakan *tumbi*. (7, 37).

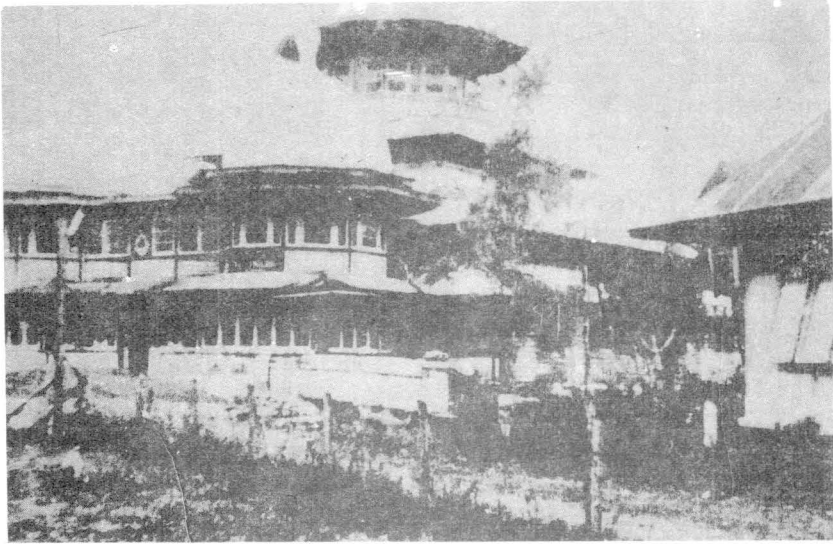
Secara membelintang rumah panjang itu terbagi atas beberapa ruang. Satu rumah panjang biasanya sekurang-kurangnya terdiri atas empat ruang, bahkan kebanyakan lebih dari itu. Tiap-tiap ruang didiami oleh satu *tumbi* (keluarga) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Ruang-ruang yang paling depan satu sama lain dihubungkan oleh pintu-pintu, sehingga menyebabkan ruangan satu dengan yang lain tidak menjadi terpisah, malahan menimbulkan satu kesatuan yang disebut rumah panjang tadi.



Gambar 10 :
Bangunan rumah panjang

Ruang inilah yang disebut *rumah luar*. Sedangkan ruang-ruang belakang tidak dihubungkan oleh pintu dan ruang-ruang ini semuanya disebut *rumah dalam*.

Dalam setiap dusun di Kerinci selalu terdapat sebuah mesjid. Mesjid itu bagi masyarakat merupakan lambang keagungan agama Islam dan lambang persatuan, karena bangunan itu di samping dipergunakan sebagai tempat menyembah dan memuja Tuhan dengan cara sholat dan membaca kitab suci Al Qur'an, ia berfungsi juga sebagai tempat mengadakan pertemuan-pertemuan musyawarah dusun. Jika dusun agak besar, maka di samping mesjid dijumpai pula Surau atau Langgar. Bangunan mesjid itu biasanya terletak di tengah-tengah dusun, sedangkan surau atau langgar terletak di pinggir dusun dekat sungai dengan tepian pemandian umum.



Gambar 11 :
Bangunan mesjid di daerah orang Kerinci

Pola dusun di daerah penelitian mengandung aspek bentuk memanjang dan melebar mengikuti jalan raya kabupaten. Sebelah menyebelah jalan raya di hubungkan dengan jalan-jalan yang disebut *jalan Larik*, di mana pada kiri kanan jalan larik itu berbaris sekumpulan rumah-rumah panjang beserta dengan pekarangannya. Bangunan rumah panjang terbuat dari bahan-bahan kayu, bambu, kulit kayu dan rotan. Sedangkan untuk atapnya dipergunakan daun nipah danalang atau ijuk. Dari bahan-bahan tersebut penduduk setempat dapat membuat rumah tempat tinggal yang kuat dan kokoh, walaupun mempergunakan bahan dan teknologi serta peralatan sederhana. Untuk menghubungkan balok-balok kayu tiang, dipergunakan sistem membelah atau melobang pada bagian ujung kayu, agar mudah mempertautkannya. Untuk memasang dinding, lantai, atap dan sebagainya dipakai sistem mengikat dengan rotan.

Menurut adat kebiasaan, untuk mendirikan sebuah rumah terlebih dahulu dilakukan berbagai upacara suci yang diselenggarakan di bawah pimpinan dukun dan Kepala Adat, guna mengamankan bahan-bahan dan lokasi bangunan dari gangguan makhluk-makhluk halus dan agar supaya direstui oleh roh-roh nenek moyang. Pembangunan rumah-rumah tersebut pada umumnya dilaksanakan secara bergotong royong dari para keluarga, baik dari pihak keluarga ibu mau pun keluarga dari pihak ayah.

Bangunan-bangunan sebagai pusat aktifitas dusun, seperti Surau, dan warung-warung tidak terletak pada suatu deretan sepanjang jalan raya, tetapi tersebar. Namun demikian suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa beberapa tempat-tempat tertentu seperti mesjid, tabuh larangan dan tanah-tanah pekuburan selalu berada tidak terlalu berjauhan dan letaknya pada posisi batas pangkal atau ujung kumpulan rumah panjang. Mesjid berfungsi sebagai tempat beribadat, atau bahkan sekali-sekali dipergunakan orang untuk tempat pertemuan. Dan tanah pekuburan sengaja disediakan secara khusus terutama untuk menampung keperluan warga masyarakat dusun yang bersangkutan. Adapun yang disebut dengan *tabuh larang*, ialah sebuah beduk yang berfungsi untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada segenap warga dusun tentang suatu kejadian penting. Hal itu antara lain ialah kebakaran, perkelahian, atau untuk mengikuti upacara-upacara tertentu seperti upacara adat menyambut tamu kehormatan. Beduk tersebut terbuat dari kayu berlobang. Pada ujung dan pangkalnya diberi penutup yang berasal dari kulit binatang seperti kulit kerbau, harimau dan sebagainya, sehingga apabila dipukul akan mengeluarkan suara mengema ke segenap pelosok dusun. Jika dusun itu sangat luas, maka akan diadakan orang lebih dari satu buah beduk.

Pada beberapa tempat tertentu di pedusunan daerah ini dijumpai pula parit-parit dan pagar. Pembuatan parit dan pagar tersebut dimaksudkan sebagai batas hak milik seseorang atau tanah yang dihargai oleh segenap warga masyarakat, sehingga dengan cara demikian diharapkan orang tidak mengganggu hak milik masing-masing.

Tempat-tempat mandi atau tepian mandi biasanya dibedakan antara tempat-tempat mandi umum bagi laki-laki dan tempat mandi umum bagi wanita. Namun demikian ada juga beberapa orang penduduk kampung biasanya orang-orang kaya membuat tempat mandi khusus bagi keluarganya sendiri. Tempat-tempat mandi tersebut apabila berada di tepian sungai, maka ia berwujud *jamban* yang terbuat dari kayu. Jika tempat mandi itu berada di daratan, sumur itu diberi dinding, agar supaya terlindung dari penglihatan orang banyak.

PENDUDUK

Ditilik dari luas wilayah dan jumlah kepadatan penduduk, maka orang Kerinci yang mendiami daerah Kabupaten Kerinci termasuk yang paling padat penduduknya bila dibandingkan dengan daerah-daerah tingkat II lainnya dalam Propinsi Jambi. Dengan ukuran luas wilayah $\pm 4200 \text{ m}^2$, tercatat jumlah penduduk seluruhnya 216.760 jiwa. Hal ini berarti bahwa kepadatan penduduk per kilometer rata-rata 52 orang. Untuk jelasnya perincian jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 1
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN
DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 1976

No.	Kecamatan	Jumlah	Luas Km ²	Kepadatan per Km
1.	Gunung Kerinci	52.684	1.000	53
2.	Air Hangat	38.991	722	54
3.	Sungai Penuh	13.750	520	264
4.	Sitinjau Laut	18.802	355	53
5.	Danau Kerinci	31.048	768	40
6.	Gunung Raya	27.575	835	33
	Kabupaten	216.760	4.200	52

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi, 1980.

Bagi daerah ini dapat kita katakan bahwa seluruh pelosok pedusunan dalam tiap-tiap Kecamatan adalah merupakan tempat-tempat pemukiman orang-orang Kerinci. Oleh karena mereka bermukim di sana secara turun-temurun dan dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan dialek Kerinci.

Adapun kadar mobilitas orang-orang Kerinci tampak sangat tinggi bila dibandingkan dengan kadar mobilitas penduduk asli lainnya dalam Propinsi Jambi. Sejalan dengan itu juga terlihat bahwa penyebarannya demikian meluas sehingga melampaui batas-batas daerah kabupaten tersebut ke daerah-daerah lain di luar Kabupaten Kerinci. Meskipun orang-orang Kerinci terkenal sebagai petani yang rajin, apalagi karena kesuburan dan kemudahan dalam pengolahan tanahnya, namun banyak di antara mereka menjadikan hasil pertaniannya sebagai sarana penunjang bagi usaha peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi. Misalnya saja dari petani penggarap, lalu meningkat menjadi petani pengusaha, atau pedagang. Bahkan dengan modal keuletan orang-orang Kerinci itu, mereka dijumpai baik di daerah sendiri maupun di daerah-daerah lain yang bekerja sebagai petani, sebagai pengajar, ataupun sebagai pegawai negeri. Jadi jelaslah bahwa mobilitas orang Kerinci bervariasi secara vertikal dan horizontal. Terwujudnya keadaan semacam ini menurut informan adalah wajar, oleh karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Kebanyakan pemuda-pemuda dari daerah Kerinci melanjutkan sekolah ke Sumatera Barat dan ke Pulau Jawa. Kesadaran dari para orang tua itu terpupuk sejak zaman Belanda, di mana pada saat itu mereka telah mulai mengenyam manfaat pendidikan formal, baik umum maupun agama. Sebagai akibat dari kadar mobilitas tersebut, maka sangat populer sebutan di daerah Jambi, bahwa orang-orang Kerinci sangat gigih dalam berusaha, cerdas dalam menggunakan pikiran, dan penuh kesungguhan dalam menjalankan profesinya.

Menurut data dan hasil pengamatan di lokasi penelitian yakni dusun Koto Lanang, ternyata bahwa penduduk di dusun ini keseluruhannya berjumlah 1.556 jiwa. Dari jumlah ini lebih kurang 2/3 di antaranya berusia 13 tahun ke atas. Sedangkan yang selebihnya terdiri dari anak-anak. Jika ditinjau dari sudut tingkat pendidikan warga masyarakat di dusun ini tampak masih banyak yang menempati kualifikasi Sekolah Dasar. Namun demikian tercatat sejumlah 15 orang penduduk telah berhasil menikmati pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di daerah lain. Untuk jelasnya pada tabel 2 berikut ini akan tergambar secara jelas keadaan penduduk baik dilihat dari segi umur maupun menurut kualifikasi pendidikan mereka.

TABEL 2
PERINCIAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR
DAN MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN
DI DUSUN KOTO LANANG, TAHUN 1979

Umur	Kualifikasi pendidikan					Jumlah
	Tidak sekolah	SD	SLP	SLA	Perguruan Tinggi	
0 – 13 tahun	247	249	89	–	–	585
13 – 40 tahun	15	25	272	220	12	544
40 – ke atas	48	192	101	83	3	427
Jumlah	310	466	462	303	15	1.556

Sumber : Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Kemendapoan Depati VIII, Kecamatan Air Hangat Kerinci, 1980.

Dari tabel di atas terlihat 247 orang anak-anak berumur antara 0 – 13 tahun yang tidak bersekolah. Sesungguhnya dari jumlah tersebut yang benar-benar tidak sempat menikmati sekolah padahal seharusnya mereka bersekolah, hanya berjumlah sekitar 30 orang. Sedangkan yang selainnya masih terdiri dari anak-anak yang memang belum memenuhi persyaratan untuk masuk sekolah (5 tahun ke bawah).

Adapun jumlah penduduk pendatang di dusun ini diperkirakan hanya berjumlah 30 orang. Jadi jika diukur menurut persentasinya hanya $\pm 2\%$ dari jumlah penduduk keseluruhannya. Sebab-sebab yang mendorong kedatangan mereka ke dusun ini, tiada lain hanya untuk mencari nafkah. Orang-orang pendatang ini kebanyakan berasal dari suku bangsa Minangkabau dan sebagian lainnya terdiri dari orang-orang Jawa. Orang Minangkabau bergerak di lapangan perdagangan sedangkan suku bangsa Jawa terutama sebagai karyawan perkebunan teh di Kayu Aro.

Penduduk asli memandang orang-orang pendatang itu tak ubahnya seperti orang kalangan sendiri. *Ethnocentrisme* dalam hubungan ini tidak menonjol, terutama selama pendatang itu dapat menyesuaikan diri serta tidak bertingkah laku yang menyimpang dari ketentuan dan norma-norma adat Kerinci. Dengan demikian pergaulan antara mereka dapat terjalin dengan baik. Keadaan ini terlukis di dalam seloka adat Kerinci yang jika diterjemahkan berbunyi: Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung; di mana periuk pecah, di situ tungku tinggal, di mana tembilang patah, di situ ubi berisi.

Perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang agak jarang terjadi, oleh karena perkawinan serupa itu bukanlah merupakan sesuatu yang ideal bagi penduduk asli Kerinci. Kalau pun ada yang melakukan hubungan perkawinan tersebut, maka orang pendatang itu terlebih dahulu disaring oleh berbagai pertimbangan, seperti adanya keinginan untuk menetap secara mantap, budi pekerti yang luhur dan sebagainya. Akan tetapi tidaklah berarti bahwa orang Kerinci menutup kemungkinan untuk berkerabat dengan orang-orang pendatang, sebab menurut kenyataannya asalkan pendatang itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan komunitasnya pasti mendapat sambutan dengan baik.

Partisipasi penduduk pendatang terhadap kegiatan sosial di daerah ini agaknya tidak begitu besar. Mereka bergaul hanya untuk menunjukkan solidaritasnya, tapi hampir-hampir tidak punya inisiatif, dan mereka seakan-akan bekerjasama hanya untuk menghindari keragu-raguan masyarakat dusun terhadap loyalitas serta keinginannya untuk menjadi satu dengan warga masyarakat setempat. Keadaan semacam itu tiada lain disebabkan karena pada umumnya penduduk pendatang selalu mengutamakan pembinaan ekonomi. Mereka berusaha meningkatkan pendapatan sehingga jika pada suatu hal harus kembali ke negerinya masing-masing, mereka tidak akan merasa malu.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Orang Kerinci yang mendiami dataran tinggi Kerinci adalah termasuk induk Proto Melayu. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari India Belakang (Indo-China). Dalam perpindahannya mencari tempat pemukiman baru di selatan yang merupakan gugusan pulau-pulau dari Madagaskar sampai ke kumpulan pulau Melanesia, terjadi dua kali masa gelombang perpindahan. Gelombang perpindahan pertama adalah induk dentro Melayu. Semula yaitu Proto Melayu menemukan gugusan kepulauan Nusantara, mereka menetap maupun dalam berhubungan dengan orang lain.

Di dalam pepatah adat Kerinci disebutkan: Syarak mengato, adat me-makai. Pepatah ini mengandung arti, apa yang terlukis dalam hukum Islam, itulah yang diturut oleh adat. Oleh karena itu Al Qur'an adalah sumber utama dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Sebagai contoh ayat-ayat suci dari Al Qur'an selalu ditempatkan pada bagian kepala seseorang yang sedang

sakit terbaring, agar ia terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Lebih jauh lagi terlihat pengaruh ajaran Islam dalam pandangan masyarakat untuk berbuat hal-hal tertentu. Demikian misalnya pada tempat-tempat yang dianggap suci, seperti Mesjid, Langgar, Surau dan sebagainya, orang tidak pernah mengadakan bunyi-bunyian, kecuali beduk, dan juga orang tidak akan melakukan upacara sekuler lainnya. Apalagi jika hal itu akan membawa hal-hal yang kotor dan najis.

Di dalam ajaran agama Islam yang berkembang, orang tidak dibenarkan menggambar atau membuat ukiran atas sesuatu yang menyerupai hewan atau manusia. Sebab gambar hewan atau gambar manusia yang tertera pada ukiran, di akhirat akan meminta nyawa kepada orang yang menciptakannya. Begitu kuatnya pengaruh ajaran tersebut di kalangan seniman di daerah ini, maka ukiran-ukiran yang menyerupai hewan atau ukiran yang menyerupai manusia boleh dikatakan tidak pernah dijumpai.

Di samping agama Islam, dikenal juga adanya kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Kerinci, yakni kepercayaan terhadap alam gaib dan makhluk-mahluk gaib yang supernatural dan dapat mempengaruhi hidup manusia. Kepercayaan tersebut terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Manifestasi hal itu dapat ditemukan dalam upacara pengobatan orang yang sakit, upacara penghormatan yang sangat istimewa terhadap benda-benda pusaka, serta adanya berbagai istilah lokal seperti Totampo yang artinya ditampar hantu dan lain-lain. Kesemuanya itu dijalankan orang dengan maksud untuk mengatasi segala akibat dari tindakan makhluk-mahluk yang supernatural itu. Upacara adat selalu dipimpin oleh seorang atau lebih dukun (9, 430).

Kepercayaan terhadap makhluk-mahluk gaib seperti terurai di atas, tidak sedikit membawa pengaruh dalam sikap dan perbuatan masyarakat. Sebagai contoh adanya jimat-jimat, baik yang dibawa maupun yang ditinggalkan orang di rumahnya, pada hakekatnya merupakan penangkal gangguan dari orang-orang ataupun roh-roh jahat. Begitu pula adanya tapak sepatu kuda, atau tulang ikan hiu yang ditaruh di atas pintu depan rumah penduduk, dimaksudkan sebagai penangkal atau penghalang masuknya roh-roh jahat.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari orang Kerinci memakai bahasa dialek Kerinci. Pada umumnya dialek Kerinci, berbeda dengan dialek Melayu Jambi atau dialek Minangkabau sebagai suku bangsa tetangga dari sudut letak daerahnya. Tapi namun demikian dialek orang Kerinci itu menurut informan ada yang menggolongkan masuk ke dalam dialek Minangkabau dan ada pula yang berpendapat termasuk sejenis dialek Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Suatu keistimewaan yang terdapat di daerah ini ialah bahwa sejak di daerah pantai dan di pinggir sungai bagian timur Pulau Sumatera. Beberapa ratus tahun kemudian menyusul perpindahan gelombang kedua dari dataran Asia, yaitu Melayu Muda.

Oleh karena kedatangan yang terakhir ini, maka proto Melayu yang telah menetap di pantai-pantai Nusantara terdesak. Lalu mereka mencari

tempat pemukiman baru dengan menyusui sungai ke udik, hingga sampai mereka menemukan lembah-lembah subur di tengah-tengah bukit barisan di pulau Sumatera. Mereka inilah di antaranya yang menurunkan induk suku bangsa Kerinci (II, 120).

Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia masuklah pengaruh Jawa dalam masyarakat Kerinci. Hal itu terlihat dengan kita jumpai istilah *Depati* untuk gelar Kepala Dusun. Begitu juga istilah "mendopo" yang menjadi lembaga pemerintahan adat di Kerinci, sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata: Pendapo.

Sebagai masyarakat petani, orang Kerinci bergerak dalam bidang bercocok tanam padi di sawah sebagai mata pencaharian pokok. Kebun-kebun ditanami dengan tanaman muda, seperti kentang, cabe, bawang, tomat dan saur-sayuran. Daerah persawahan yang luas terdapat dalam Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Sungai Penuh. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Danau Kerinci Dan Kecamatan Gunung Kerinci, mereka mengutamakan berkebun kpoi, cengek dan kulit manis, karena sesuai dengan keadaan tanahnya yang berbukit-bukit. Perkebunan *teh Kayu Aro* yang terkenal itu terletak di kaki gunung Kerinci. Dahulu perkebunan ini diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, perkebunan tersebut diambil alih sehingga menjadi Perusahaan Negara.

Keluarga batih yang ada pada masyarakat Kerinci disebut *Tumbi* (kelamin). Ia merupakan satu rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Suami sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial-ekonomi rumah tangganya. Jumlah keluarga boleh dihitung berdasarkan banyaknya isteri. Dengan demikian seorang suami adakalanya mengepalai dua atau lebih keluarga batih. Keluarga tersebut sekaligus merupakan anggota dari persekutuan genealogis yang disebut *perut*.

Di samping itu terdapat pula satu bentuk kesatuan hidup yang mendiami satu rumah besar yang terdiri dari beberapa keluarga batih. Masing-masing keluarga di rumah itu, tinggal di dalam ruang atap petak-petak rumah besar, dengan dapurnya sendiri-sendiri. Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa rumah besar itu dikenal dengan sebutan *rumah panjang*. Setiap rumah panjang paling tidak didiami oleh empat keluarga batih dengan dapurnya sendiri-sendiri.

Orang-orang Kerinci boleh dikatakan 100% menganut agama Islam. Agama Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, pengaruh itu terlihat baik dalam cara berpikir, berbuat, dahulu dalam segi tulis baca, orang Kerinci mengenal huruf. Huruf Kerinci itu dikenal dengan sebutan *Rencong Kerinci*. Akan tetapi sejak masyarakat setempat mengenal huruf latin dan huruf Arab, maka huruf Rencong mulai jarang dipakai orang. Bahkan pada saat ini huruf tersebut tak pernah dipakai

lagi. Sebabnya adalah karena hanya tinggal beberapa orang saja lagi yang bisa menulis atau membaca huruf Rencong Kerinci. Tetapi huruf ini masih terpelihara baik, disimpan di rumah-rumah adat sebagai benda pusaka. Huruf Rencong itu tertulis di atas gading, pada tanduk, pada tulang dan pada kain sutera.

BAGIAN II BENTUK KOMUNITAS KECIL

CIRI-CIRI SEBUAH KOMUNITAS KECIL

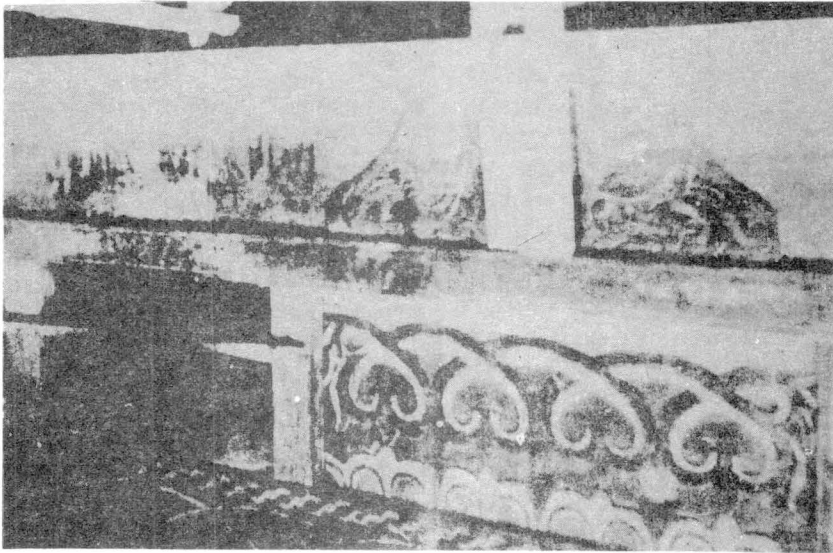
Dusun-dusun yang menjadi tempat pemukiman orang Kerinci juga mempunyai batas wilayah yang disebut batas alamiah dan batas kepemimpinan adat. Batas-batas yang disebut pertama seringkali berbentuk sebuah sungai, sebuah gugusan bukit-bukit, batas pohon kayu tertentu, serumpun bambu yang diperkirakan abadi atau sekurang-kurangnya selama berpuluh-puluh tahun masih terpelihara kelestariannya. Umpamanya saja masyarakat sering menyebut bahwa batas dusun X, ialah di sebelah hulu dengan rimbo anu, di sebelah darat dengan pematang (bukit) anu, di sebelah baruh (bagian yang rendah) dengan sungai anu, dan di sebelah hilir dengan pohon anu dan sebagainya. Sedangkan batas yang disebut kedua tadi, biasanya ditentukan berdasarkan ketetapan Pemimpin Adat. Ketetapan itu dibunyikan dalam sebuah piagam dan senantiasa diikuti oleh sebuah tanda khusus.

Adapun tanda-tanda pengenalan dusun sebagai komunitas kecil yang terdapat dalam alam Kerinci cukup banyak, namun dalam naskah ini hanya ditulis beberapa tanda-tanda pengenalan yang cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu :

- bangunan,
- hukum adat, dan
- kepemimpinan adat.

Bangunan-bangunan rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal berbentuk deretan rumah-rumah panjang yang adakalanya pada satu tempat sampai berpuluh-puluh buah dan berlapis-lapis dari *baruh* (tempat yang rendah) sampai ke darat yaitu tempat yang tertinggi atau sering juga disebut *larik*. Masing-masing rumah panjang itu terdiri dari dua bagian besar yang disebut rumah luar dan rumah dalam. Rumah luar khusus dipergunakan untuk tempat menerima tamu pada hari-hari biasa, ataupun tempat kegiatan sesuatu pesta (kenduri) pada hari-hari tertentu, dan sebagai tempat beristirahat bagi anggota keluarga yang laki-laki yang masih jejaka. Rumah dalam dibagi atau disekat menjadi beberapa bilik-bilik. Di antara bilik-bilik itu beberapa di antaranya dipergunakan sebagai kamar keluarga batih (tumbi) dari rumah yang bersangkutan.

Selain daripada larik dan rumah-rumah panjang, ada lagi bangunan lain yang melambangkan kekhususan Kerinci, yaitu bangunan yang diberi nama Rumah Gedang. Dialek Kerinci menyebutnya *umeh gedea*. Rumah ini disebut umeh gedea karena selain bangunan dan bahan-bahan ramuannya memang besar-besar, juga fungsinya amat besar. Dalam bentuk aslinya rumah gedang itu konstruksinya terbuat daripada papan, balok-balok kayu, ijuk, bambu dan benda-benda alam lainnya. Balok-balok kayu yang besar-besar dipergunakan sebagai tiang, gelegar, rasuk, alang panjang, alang melintang dan papan dipergunakan sebagai lantai dan dinding. Sedangkan ijuk dipergunakan untuk atap. Berbeda dengan rumah-rumah tempat tinggal, maka rumah gedang mempunyai keunikan tersendiri pula. Pada dinding rumah diberi ukiran-ukiran yang bermotif pohon kembang, layar lingkaran kecil dan sebagainya.



Gambar 12 :
Umah Gedea yang dindingnya penuh ukiran

Hukum adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Kerinci sesungguhnya telah ada bersama pertumbuhan kebudayaan penduduk di sini. Karena itu sendiri mencakup beberapa aspek kehidupan seperti cara-cara memilih atau menunjuk ninik mamak, yang terkenal dengan sebutan "Gilir Ganti", pemilihan Lurah dan Depati. Adat yang mengatur tentang perkawinan, adat yang mengatur tentang bagi hasil menambang emas, menanam padi, beternak kerbau atau sapi. Adat tentang memampas dan membangun dan lain-lain.

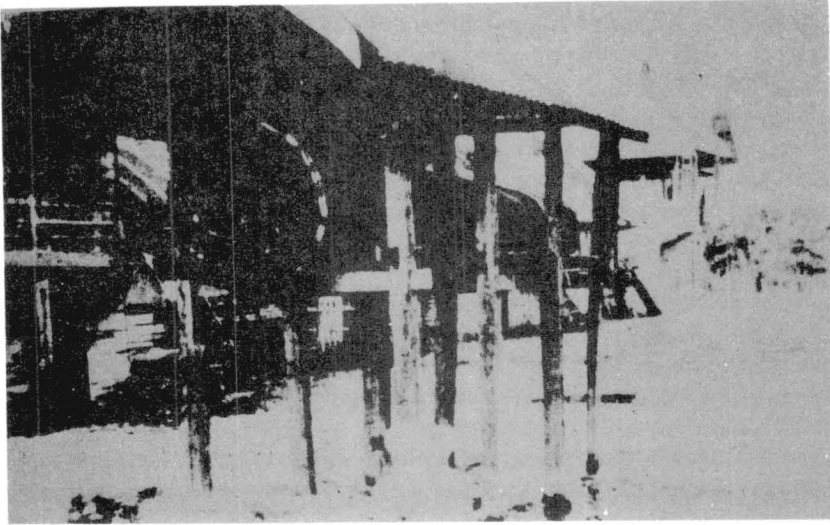
Sesuatu perkara yang timbul di dalam sebuah dusun terlebih dahulu diselesaikan oleh ninik mamak. Bila ninik mamak tidak berhasil menyelesaikan perkara tersebut, maka perkara itu harus ia teruskan kepada *Balai Sanggerahan Agung*, yaitu merupakan majelis yang berintikan *Depati* empat helai kain. Masing-masing ialah Depati Muaro Langkap yang tinggal di Temio, Depati Rencong Telang yang tinggal di Pulau Sangkar, Depati Biang Arit tinggal di Pengasih dan Depati Batu Ampar Atur Bumi. Apabila pada persidangan ini yang berperkara tidak mau menerima keputusan maka wajib bagi Depati-depati tersebut *melantak tajuk ilir ke Jambi*, membawa orang yang berperkara kepada Pangeran Temenggung di Muaro Sumail. Upaya yang tersebut terakhir ini sekarang hanya tinggal dalam ingatan saja.

Dari dua macam kepemimpinan adat, pada sebuah dusun ada seseorang yang merupakan pimpinan pucuk. Dikatakan demikian karena padanya terletak hak-hak untuk menentukan beberapa kebijaksanaan dan memutuskan beberapa pertimbangan. Untuk sebuah komunitas yang disebut dusun, pimpinannya ialah seorang Kepala Dusun yang bergelar Depati, didampingi kerapatan adat yang beranggotakan para tokoh-tokoh masyarakat, seperti para ninik mamak, tua tanganai, alim ulama, cerdik pandai yang merupakan wakil-wakil dari beberapa kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan. Kelompok di sini berarti sejumlah orang yang berasal dari satu *kalbu*.

Ada dua macam pemimpin adat yang berfungsi dalam memelihara kerukunan antar masyarakat. Satu di antaranya bersifat formal. Dikatakan formal karena kedudukannya dikokohkan dengan surat keputusan resmi, dan padanya melekat pula hak atau kekuasaan tertentu, di antaranya hak memelihara keamanan, ketertiban serta kehidupan sosial budaya. Lain pula halnya dengan pemimpin adat yang informal. Pada mereka tidak berhak untuk memerintah atau menetapkan sesuatu dengan kekerasan. Padanya hanya terdapat hak yang diberikan oleh anggota kelompoknya untuk mempelajari, mengusut sesuatu perkara yang timbul di dalam kelompoknya, atau perselesihan yang terjadi antara mereka yang berlainan kelompok (perut atau kalbu), sepanjang hal tersebut dibenarkan oleh peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Biasanya keputusan itu mendorong orang yang bersengketa itu supaya memilih jalan perdamaian secara kekeluargaan.

Identitas dusun-dusun itu satu dan lainnya tidak selalu sama, namun jelas menunjukkan kekhususannya. Seperti dusun dalam Kecamatan Air Hangat, tanda pengenalnya yang paling populer ialah *tabuh larang*, yaitu sebuah bedug yang luar biasa panjang dan besarnya. Bedug ini ditempatkan di muka rumah, diberi tempat khusus, yang diletakkan pada sebuah bangunan berbentuk rumah yang tidak memakai dinding, beratap seng, tiang kayu sebanyak delapan batang dengan ketinggian sejangkau tangan manusia. Orang dusun menamakannya *tabuh larang*, karena fungsinya tidak sama dengan bedug biasa. Ia ditabuh atau dibunyikan pada waktu-waktu yang tertentu saja, yakni pada saat-saat dusun dalam keadaan kesusahan atau dalam ber-

sukaria. Kalau ada bahaya kebakaran, perkelahian dan amukan dari binatang buas atau mencari orang yang hilang, tamu-tamu agung yang harus dihormati, pesta-pesta kampung, atau sebaliknya pada hari raya, dan sebagainya barulah bedug itu dibunyikan.



Gambar 13 :

Tabuh larang yang mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat dusun

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Dusun pada orang Kerinci merupakan sebuah Komunitas Kecil. Ia merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari seperangkatan adat yang mengatur tentang norma-norma hukum yang berlaku menjadi pedoman bagi semua warga dusun. Dusun menjadi bagian dari sebuah Marga atau Kemendapoan.

Antara dusun dan Kemendapoan terjalin hubungan kerja secara vertikal. Beberapa urusan dan masalah yang datang dari Pemerintah yang lebih atas, untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai warga dusun, haruslah berjenjang naik bertangga turun. Artinya bilamana Pemerintah Kecamatan menghendaki segala sesuatu dari salah satu dusun, ia terlebih dahulu harus memintanya kepada Kemendapoan, di mana dusun tersebut menjadi bawahannya. Demikian pula sebaliknya jika dusun-dusun ingin memperoleh sesuatu atau melaporkan sesuatu kepada Kecamatan, ia harus melalui Kemendapoan terlebih dahulu, baru kemudian sampai pada pemerintah tingkat Kecamatan.

Pertumbuhan dusun seperti Komunitas kecil, dimulai dari zaman sebelum perang kemerdekaan, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi, yaitu

sebelum datangnya penjajahan Belanda. Akan tetapi oleh karena ketiadaan data yang dapat menerangkan secara jelas, maka dalam tulisan ini hanya diungkapkan semasa penjajahan Belanda, zaman Jepang dan zaman Kemerdekaan.

Menjelang tahun 1926 daerah Kerinci masih merupakan bagian dari Keresidenan Jambi. Semua peraturan-peraturan yang diterapkan pada masa itu bersumber dari Keresidenan Jambi. Pada tahun 1926 itu di kota Jambi diadakan musyawarah antar Kepala-kepala Marga se Keresidenan Jambi. Hampir semua peserta dari alam yang bernama *pucuk jambi sembilan lurah*, datang menghadiri musyawarah tersebut tepat pada waktunya. Kecuali utusan dari alam Kerinci yang terlambat atau tidak dapat datang sama sekali, karena sulitnya perhubungan dan angkutan pada masa itu. Dari kenyataan itu maka sejak tahun itu juga alam Kerinci yang sekarang telah menjadi Kabupaten Kerinci dipisahkan dari Keresidenan Jambi, dan masuk ke dalam Keresidenan Sumatera Barat, oleh sebab hubungan dan angkutan ke daerah ini boleh dikatakan agak lancar. Tetapi meskipun pemerintah keresidenan yang menjadi induk dari dusun-dusun dalam alam Kerinci sudah beralih dari Keresidenan Jambi ke Keresidenan Sumatera Barat, namun bentuk Pemerintahan di dusun-dusun tidak banyak mengalami perubahan.

Kedudukan pemimpin adat, lembaga-lembaga yang menjadi penyangga atau pendukungnya yaitu Rio atau Depati, tetap sebagaimana biasa. Pada zaman Jepang bentuk pemerintahan dusun-dusun sama sekali tidak mengalami perubahan. Dan walaupun ada hanyalah perubahan cara-cara bekerja, yaitu dari cara-cara lemah-lembut, sopan santun dan penuh tenggang rasa, beralih kepada cara-cara yang keras, main paksa, main pukul tiada kenal musyawarah dan mupakat.

Setelah Indonesia merdeka, bentuk-bentuk pemerintahan dusun masih tetap sebagaimana sebelum kedatangan Jepang, atau semasa Jepang. Hanya saja oleh beberapa pertimbangan yang ditambah dengan perlengkapan-perengkapan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu.

Aparat yang merupakan pembantu dari *Mendapo* sebagai Kepala Kemandapaoan (Marga) terdiri daripada Kepala Dusun yang bergelar Depati. Sebagai Kepala Dusun, Depati dibantu pula oleh ninik mamak yang merupakan anggota dewan Kerapatan. Pada periode 1950–1968 Kemandapaoan mengalami perubahan yang fundamental, di mana kekuasaan Mendapo yang selama ini sebagai administrator dari sebuah daerah administratif semu, karena kekuasaan sang mendapo, kini berubah menjadi sebuah daerah otonom. Ikatan daerah administratif semu selain sebagai alat pemerintah pusat, ia juga merupakan pemimpin adat yang diberi wewenang untuk menetapkan sesuatu peraturan adat bersama-sama dengan ninik mamak yang disebut *kerapatan*. Sebaliknya dikatakan daerah otonom, oleh karena sampai tahun 1968 itu Kemandapaoan berubah menjadi sebuah daerah yang mempunyai perwakilan

rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Kemendapoan (setingkat dengan Marga) yang pada rezim orde lama dengan demokrasi terpimpinnya diubah menjadi Badan Harian Marga.

Di samping itu Mendapo juga dibantu oleh sebuah staf yang beranggotakan kelompok Tata Usaha dan Kelompok Keamanan. Kelompok-kelompok tersebut masing-masing menangani urusan surat menyurat, serta menindak para pelaku pengganggu keamanan. Para petugas yang bertanggung jawab dalam hal keamanan itu disebut *debalang* (opas). Adapun Badan Harian Marga beranggotakan 5 orang termasuk ketuanya yaitu Mendapo sendiri. Sebagai badan legislatif, lembaga ini berfungsi membuat kebijaksanaan serta mengawasi pelaksanaannya.

Hubungan vertikal antara dusun dengan Kemendapoan atau antara Kemendapoan dengan Kecamatan, merupakan jalinan antara tiga kesatuan yang berurutan sebagai anak tangga. Jika kita umpamakan dusun merupakan anak tangga terbawah, maka Kemendapoan merupakan anak tangga pertengahan, dan Kecamatan merupakan anak tangga yang berada di atasnya.

Dusun sebagai tempat bermukimnya anggota-anggota masyarakat dari suatu kesatuan hidup terkecil, seringkali menjadi sasaran dari berbagai rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah yang lebih atas memikul tugas dan tanggung jawab yang terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemendapoan yang berada di anak tangga yang pertengahan, adalah merupakan alat penghubung antara Camat dengan rakyat, atau antara pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi walaupun demikian tidak semua yang datang dari bawah kepada pihak atasan atau sebaliknya dari atas ke pihak bawahan disampaikan demikian saja. Sesuatu itu bisanya dijabarkan lebih dahulu baru diteruskan kepada sasarannya. Banyak yang datang dari atas disampaikan ke bawah, bukan berwujud perintah, akan tetapi telah diolah menjadi suatu kebijaksanaan yang ditempuh melalui musyawarah dan mufakat dengan para ninik mamak. Demikian pula sebaliknya banyak masalah yang bersifat perorangan disampaikan kepada atasan dalam bentuk keputusan, saran-saran atau usul-usul yang resmi.

Adapun hubungan horizontal antara Kemendapoan yang satu dengan Kemendapoan yang lain lebih banyak bersifat politis. Dikatakan demikian, oleh karena alat yang dipergunakan untuk memelihara dan meningkatkan perjuangan komunitas yang bersangkutan adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan para pamong Marga/Desa yang resmi, seperti yang meliputi Kemendapoan-kemendapoan dari alam Kerinci, Marga-marga dari Kabupaten Batanghari, Bungo Tebo, Sarolangun Bangko dan dari Tanjung Jabung, serta para Kepala Kampung dalam daerah Kotamadya Jambi. Begitu pula program kerjanya banyak mengarah kepada penilaian politis yang dijalankan oleh pihak Pemerintah Pusat, seperti masalah daerah Tingkat III. Bahkan pernah ketua atau pimpinan dari Persatuan Pamong Marga/Desa se Propinsi Jambi itu karena fungsinya duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jambi.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Di dalam suatu Kemendapoan atau di dalam dusun-dusun dijumpai adanya organisasi sosial yang bermacam-macam bentuk dan tujuan perjuangannya. Dalam bidang ekonomi misalnya, ada perkumpulan Koperasi Tani, Koperasi Simpan Pinjam dan sebagainya. Begitu pula dalam bidang agama, ada perkumpulan pengajian yang beranggotakan kaum ibu khusus dan ada pula yang beranggotakan kaum pria khusus atau merupakan gabungan di antara keduanya. Untuk perkumpulan kemasyarakatan, ada yang bergerak pada bidang kesejahteraan keluarga, atau perkumpulan yang menyelenggarakan masalah kematian, arisan, pemuda, dan sebagainya.

Pada umumnya perkumpulan-perkumpulan semacam itu bertujuan untuk menggalang kesatuan dan persatuan, memperdalam rasa kekeluargaan, membiasakan hidup tolong-menolong dan bergotong royong, menghilangkan siat hidup individualistis dan pamrih dan menggantikannya dengan kehidupan yang penuh rasa paguyuban. Hidup yang demikian itu dilambangkan oleh masyarakat Kerinci dengan semboyan "*sedencing bak besi, seciap bak ayam*".

Adapun anggota dari perkumpulan tersebut terdiri dari warga dari tiap-tiap dusun, baik laki-laki maupun wanita, dengan mengencualikan mereka yang belum atau tidak memenuhi persyaratan, seperti usia yang relatif masih muda, atau orang yang sudah terlalu tua. Seringkali orang yang beruntung terpilih menjadi pimpinan organisasi sosial serupa itu, adalah mereka yang memiliki sesuatu kelebihan jika dibandingkan dengan anggota lainnya. Umpamanya luas pengetahuannya, jujur dalam berbuat, berani memikul sesuatu tanggung jawab dan sebagainya.

Oleh karena perkumpulan-perkumpulan itu merupakan wadah dari berbagai aktivitas masyarakat, maka peranannya di dalam masyarakat tersebut amat penting. Melalui perkumpulan-perkumpulan itu dapat digelorakan semangat dan kemauan masyarakat menuju ke arah yang ingin dicapai. Melalui organisasi sosial tersebut dapat pula dititipkan pesan-pesan yang berguna bagi perbaikan terhadap berbagai bidang hidup dan kehidupan masyarakat setempat.

BAGIAN III SISTEM PELAPISAN SOSIAL

DASAR PELAPISAN

Wujud pelapisan sosial yang dipraktekkan pada masyarakat Kerinci, tidak sebanyak pada roang Melayu Jambi. Jika pada orang Melayu Jambi ada orang bergelar Raden, Sayid dan Kemas, kemudian bila di antara mereka diangkat menjadi penguasa negeri ditambah lagi dengan gelar yang diberikan

oleh negeri. Dan biasanya gelar tersebut dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Umpamanya gelar "Tumenggung kabul di bukit". Gelar semacam ini diberikan kepadanya karena jasanya menaklukkan orang gagah dari alam Kerinci yang bernama "Tiang Bungkuk". Sedangkan kegagahan atau kesaktian ilmu yang digunakan dalam merontokkan kegagahan atau kesaktian Tiang Bungkuk itu adalah sebagai hasil pertapaannya di sepanjang Bukit Barisan selama bertahun-tahun. Akan tetapi gelar-gelar yang disandang oleh masyarakat Kerinci, adalah gelar yang diberikan oleh anggota-anggota kalbu mereka. Gelar itu baru diberikan manakala yang bersangkutan sudah menduduki tanggung jawab sebagai pemimpin dari kelompoknya. Gelar tersebut banyak persamaan dengan gelar-gelar yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau.

Orang Kerinci mendasarkan sistem berlapis hanya dari dua sektor. Pertama berdasarkan keaslian dan kedua senioritas. Seseorang yang sudah menjadi penduduk di daerah ini, akan tetapi belum memiliki sesuatu hak dan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat asli di daerah yang bersangkutan, misalnya tidak diikutsertakan dalam kerapatan ninik mamak dan sebagainya dinilai belum menjadi penduduk inti. Oleh karenanya ia dikategorikan berada pada lapisan bawah. Demikian pula apabila seseorang yang sudah menjadi penduduk asli turun-temurun dari nenek moyang mereka, atau telah termasuk ke dalam salah satu kalbu, atau Lurah dan sudah dipandang "tegak sama tinggi duduk sama rendah" dengan yang lainnya, akan tetapi usianya masih muda, meskipun ia memiliki kepandaian serta luas pengetahuannya, belum akan dipandang sama dengan mereka yang telah diberi gelar-gelar tadi. "Suaranya akan belum didengar rupanya belum akan dilihat". Artinya ia belum dibolehkan mencampuri urusan kepemimpinan masyarakat setempat.

BENTUK PELAPISAN

Pelapisan sosial pada masyarakat Kerinci meskipun tidak setajam yang dipraktekkan oleh para bangsawan pada orang Melayu Jambi masa Lampau, namun sistem berlapis itu cukup jelas untuk dilihat. Para Depati, Lurah dan ninik mamak menempatkan golongan mereka sebagai orang yang patut dihormati, disegani atau disanjung. Para alim ulama, cerdik pandai dan tuo-tuo tengganai, orang-orang kaya secara diam-diam mempraktekkan sistem berlapis dengan golongan awam, atau sebaliknya para golongan awam memandang diri mereka bukan layaknya untuk bergaul secara intim dengan golongan menengah atau golongan atas.

Para Depati, Lurah dan ninik mamak yang menempati lapisan atas, akan mudah dikenal melalui beberapa kekhususan. Kekhususan itu seringkali menjelma dalam wujud penghormatan yang diberikan kepada mereka, cara-cara membawa dan menyandang senjata, pakaian yang mereka pergunakan dan mendudukkan mereka pada tempat yang terhormat pada setiap upacara.

TABEL 3
STRUKTUR PELAPISAN SOSIAL
MASYARAKAT KERINCI

Lapisan	Kelompok (golongan)	Kelompok (golongan)	Kelompok (golongan)
Teratas	Depati, Rio Lurah, Ninik-mamak.	Alim ulama, cerdik pandai, tuo tengganai, dan orang-orang kaya.	Petani penggarap, tukang-tukang, pemuda/penda-tang baru.
Menengah			
Bawah			

Bilamana mereka membuka pembicaraan, maka orang lain tidak akan menyela jika tidak diminta. Setiap kali jalan beriring, mereka selalu ditempatkan di muka. Selanjutnya yang menjadi pantangan mereka tidak boleh dibuat di hadapan mereka. Tegasnya semua perintahnya seakan-akan menjadi undang-undang dan semua larangannya menjadi kutukan.

Ada juga jenis pakaian yang khusus bagi mereka yang orang lain tidak boleh mempergunakannya. Kalau memakai keris, hulunya menghadap ke depan tapi sebaliknya bagi orang biasa jika memakai keris hulunya harus membelakang. Baju, celana, dan kopiah mereka biasanya ditatah dengan benang bersulam emas, perak atau tembaga. Mereka juga mempunyai tanda pengenalan lain yang sifatnya abstrak, seperti gelar-gelar kehormatan. Gelar-gelar tersebut bermacam-macam yang pada dasarnya gelar itu diselaraskan dengan fungsi dan asal-usul pemberiannya kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh, di antaranya ada yang bergelar *Rio Terlago*, yaitu Kepala Dusun Sungai Aur, Depati Sandang Gong, bagi Kepala Dusun Sandaran Agung, Depati Rencong Telang, bagi Kepala Dusun Pulau Sangkar dan lain-lain.

Di lain pihak, mereka yang menempati lapisan atas ini ada juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak memakai gelar serta hak mengurus sesuatu. Hak yang disebut terakhir ini acapkali berupa pedoman atau pegangan orang banyak. Misalnya keputusan mengenai larangan bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melawan adat kebiasaan yang berlaku pada tepian mandi, atau pada tempat-tempat tertentu lainnya. Hak untuk me-

nindak segala sesuatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya.

Sebaliknya pada mereka juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi sebagaimana mestinya. Seperti mereka yang berada pada lapisan atas, mereka berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebagai akibat daripada ketetapan yang telah diundangkan kepada masyarakat pemakai aturan-aturan tersebut. Kewajiban yang demikian itu tidak terbatas pada segi pengawasan, akan tetapi lebih daripada itu mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap mereka yang sengaja melanggar atau melawan ketetapan itu, seperti dalam bentuk memperingatkan, menegur, atau memberi hukuman yang sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.

Sesuai dengan kedudukan mereka yang menempati lapisan teratas, baik secara perorangan, maupun secara bersama-sama, mempunyai peranan amat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Sikap dan perbuatan mereka selalu dijadikan suri teladan bagi anggota masyarakat. Perkataan dinilai sebagai suatu *sabda*. Bila mereka mengatakan tentang sesuatu itu tidak baik, masyarakat akan ikut latah mengatakan itu tidak baik, bahkan kadang-kadang sampai ada yang mengatakan sangat buruk, sangat jahat dan sebagainya. Banyak hal-hal baru yang ditolak atau diragukan masyarakat untuk memakai atau menerimanya, sebelum hal itu diperjelas oleh kelompok lapisan ini, meskipun hal tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan masyarakat.

Dalam pada itu banyak pula sesuatu yang berlawanan dengan keinginan pribadi seseorang atau sekelompok lapisan yang berada di bawah, menjadi tersingkir, bilamana pihak lapisan atas menghendaknya. Umpamanya di dalam sesuatu rapat (musyawarah) tidak jarang terjadi bahwa pendapat yang benar yang dikeluarkan dari mulut seseorang dari lapisan bawah, ditolak begitu saja, jika hal tersebut dinilai merugikan lapisan atas. Pendapat tersebut diganti dengan pendapat yang disampaikan oleh lapisan atas, meskipun tidak jarang pula bahwa pendapat tersebut sebenarnya keliru.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Dari segi *hubungan kekerabatan* antara anggota masyarakat yang berbeda lapisannya itu, ada juga yang terjalin melalui perkawinan, akan tetapi tidaklah sebanyak yang terjadi sebagaimana halnya antara mereka yang berada pada lapisan sosial yang sama. Terjadinya kelangkaan seperti itu cukup beralasan, karena pada umumnya pribadi-pribadi yang sadar akan kedudukan sosialnya jarang bahkan menganggap tabu untuk mengikat hubungan perkawinan dengan lapisan sosial yang lebih tinggi dari lapisannya sendiri. Mereka merasa malu dan takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Rasa takut dan malu ini diungkapkan dalam bentuk pepatah yang berbunyi "Idak tetepik mato pedang, idak tetentang matoari".

Artinya: tidak berani melurut mato pedang, tidak sanggup menyorot pandangan matohari. Maknanya orang miskin, bodoh dan hina bukan layaknya untuk melakukan hubungan kekerabatan dengan orang-orang ternama dan berkedudukan tinggi. Walaupun terjadi hal yang berlainan daripada pendapat ataupun pandangan yang umum ini, adalah suatu keberanian yang luar biasa, dan melalui proses yang agak lain pula. Umpamanya karena terjadinya hubungan percintaan antara pemuda dan pemudi yang tidak mungkin dipisahkan lagi.

Ditinjau dari sudut hubungan bertetangga, pada lahiriahnya cukup banyak, akan tetapi secara batiniah, sedikit sekali, karena ada jurang pemisah yang cukup lebar antara mereka yang berbeda lapisan sosialnya. Jurang pemisah yang dimaksud ialah menyangkut segi lapangan kehidupan atau mata pencaharian. Mereka yang menduduki lapisan atas, pengaruh, dan kekuasaan. Sedangkan mereka yang berada pada lapisan bawah, hidup dari memeras keringat dan membanting tulang. Dengan demikian berdampingan rumah antara mereka yang berlainan kedudukan sosial ini mungkin banyak terjadi. Akan tetapi berdampingan hati atau bergaul secara intim tidak mungkin atau jarang sekali terjadi. Hal ini dilukiskan dalam pepatah atau selogan daerah: "Tidur sebantal berlainan mimpi". Hubungan pekerjaan antara lapisan atas dengan lapisan menengah seringkali terjadi, sedangkan antara lapisan atas dengan lapisan bawah hampir-hampir tidak ada. Akan tetapi hubungan antara lapisan bawah dengan lapisan menengah cukup simpatik pula. Hubungan pekerjaan antara lapisan atas dengan lapisan menengah seringkali terwujud dalam bidang perencanaan sesuatu, umpamanya rencana pembangunan atau peningkatan pendidikan, pertanian, keamanan, keagamaan dan sejenisnya. Hubungan pekerjaan antara lapisan menengah dengan lapisan bawah terwujud dalam kegiatan-kegiatan gotong royong, tolong menolong seperti dalam hal kematian, pesta kawin, khitanan, khatam Qur'an, pencukuran rambut bayi dan sebagainya. Sebuah keluarga dari lapisan bawah, bilamana ia memerlukan seseorang atau lebih untuk memimpin upacara pesta perkawinan atau upacara pemakaman, ia akan meminta bantuan kepada guru agama, cerdik pandai, tua tuo tengganai untuk memimpin upacara, baik memberikan kata sambutan, tegur sapa, baca doa dan lain-lain.

Hubungan kemasyarakatan, juga nampak lebih intim antara lapisan menengah dengan lapisan bawah, jika dibandingkan antara lapisan atas dengan lapisan menengah, apalagi golongan atas dengan golongan bawah. Masalahnya kebutuhan timbal balik lebih banyak terdapat antara dua kelompok yang berdekatan lapisan sosialnya. Bilamana warga lapisan bawah memerlukan ketrampilan dari warga lapisan menengah, seperti pandai mengaji, dan membaca doa, maka selalu meminta kesediaan orang-orang lapisan menengah, untuk "memikul yang berat menjemput yang jauh" dan sebagainya.

PERUBAHAN LAPISAN

Sebab-sebab dari perubahan lapisan sosial orang Kerinci ada bermacam-macam. Namun demikian sebab-sebab tersebut jarang merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Ada yang disebabkan kemajuan dunia pendidikan, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta lancarnya arus komunikasi.

Dunia pendidikan yang semakin berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, untuk belajar atau mempelajari sesuatu yang berdiri sendiri. Ada yang disebabkan kemajuan dunia pendidikan formal dan non formal. Melalui pendidikan banyak mengantar seseorang kepada kedudukan yang menyenangkan, seperti menjadi pemimpin instansi Pemerintah dan swasta.

Dunia pengetahuan dan teknologi berhasil menciptakan alat-alat teknologi serta kelengkapan hidup yang lebih maju dan serasi, seperti mobil, sepeda motor, listrik dan sebagainya. Dengan alat-alat itu sempat membuat orang tenggelam dalam kemewahan serta penuh harga diri. Begitu pula dengan pengetahuan yang luas, orang sudah mengenal dunia peradaban internasional. Sedikit banyaknya pergaulan ini akan mengilhami pemikiran baru bagi seseorang yang sudah mulai bertambah luas pengetahuannya. Mereka mulai mengenal tata pergaulan yang tidak kaku dan tanpa basa-basi, di samping mengenal identitas pribadi dan golongannya. Hal ini dapat menjadikan seseorang untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap tradisi yang merupakan warisan kebudayaan masa lalu.

Arus komunikasi yang bertambah lancar melalui berbagai jalur dan jaringan seperti Radio, Televisi, surat-surat kabar, majalah, alat-alat angkutan dan perhubungan yang serba cepat menambah nyaman enaknyanya hidup di dunia. Melalui pesawat-pesawat elektronik dan bahan-bahan bacaan yang serba cepat, orang mulai meninggalkan alat-alat yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman.

Dengan tumbangnyanya penjajahan Belanda dan Jepang dari bumi Indonesia, pada umumnya, Daerah Kerinci pada khususnya membuat kesempatan bagi warga masyarakat setempat untuk mengatur suatu sistem Pemerintahan yang berlaku sekarang, di mana setiap pribadi bangsa Indonesia baik pria maupun wanita dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Keadaan ini telah membuka kesempatan bagi putra-putri Kerinci menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Seperti menjadi guru, menjadi pamong dan sebagainya. Proses perubahan lapisan itu selalu diawali oleh bertambah majunya dunia pendidikan dan secara susul menyusul diikuti oleh kemajuan ilmu teknologi dan kelancaran arus komunikasi.

Di muka sudah disinggung bahwa melalui pendidikan orang peka sekali akan ilmu. Seseorang lulusan Sekolah Menengah Atas sudah memiliki seperangkat pengetahuan untuk menjadi pemimpin satu Unit kerja, pada diri mereka tumbuh suatu perasaan bahwa dirinya sudah cukup dewasa. Mereka

juga dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya, jika perlu dalam waktu tertentu siap untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Mereka yang beruntung dapat menduduki jabatan pimpinan dengan bekal ilmu yang cukup, mereka jelas tidak mau lagi menerima pikiran-pikiran yang tidak rasional. Konsep-konsepnya diukur dengan ukuran kemajuan ilmu teknologi dunia. Lingkungan masyarakatnya haruslah sesuai dengan konsep-konsep mereka. Pada tingkat ini biasanya pribadi yang bersangkutan akan memilih hijrah dari lingkungan keluarga atau masyarakat yang mengasuhnya semula, karena tidak mungkin ia akan mampu merubah kebiasaan orang-orang dusun yang sudah internalized itu secara spontan.

Pilihan terakhir mereka mencari kehidupan dan memilih tempat tinggal baru di kota-kota yang sesuai dengan pola kehidupan dunia modern, membuat lingkungan tersendiri yang sesuai dengan konsep-konsep mereka selama ini. Di tempat baru itu mereka jarang sekali bergaul dengan orang-orang yang merupakan masyarakatnya semula.

Pada sudut lain, kemajuan teknologi yang makin lama makin meningkat dan berkembang luas, sempat pula menyentuh kehidupan mereka yang memang sudah beranjak dari kebiasaan lama. Lampu damar dan minyak tanah diganti listrik. Sepeda diganti dengan sepeda motor atau mobil, kayu api diganti dengan kompor atau gas. Surat-surat kabar, majalah, radio dan televisi sudah menjadi kebutuhan pokok pada kehidupan mereka. Dengan demikian semakin sempitlah waktu bagi mereka untuk mengadakan tukar menukar pendapat dengan keluarga atau masyarakat lingkungan yang kedudukan sosial ekonominya jauh berada di bawah mereka. Belum lagi bertambah lancarnya hubungan angkutan antar kota dan antar pulau yang turut pula menyibukkan mereka.

Dengan terjadinya proses yang sedemikian itu di dalam pergaulan hidup masyarakat, maka di kota-kota, sekalipun kecil kita saksikan para pejabat dan orang-orang kaya yang sudah punya kendaraan seperti sepeda motor, punya kebun, kebun luas, punya gedung-gedung indah dan perabotan yang mahal-mahal. Mereka pada waktu-waktu tertentu saja sempat berkumpul dengan sanak saudaranya yang tinggal di dusun-dusun. Itupun harus dengan kendaraan dinas atau pribadi, seperti menjenguk kematian atau musibah, menghadiri pesta kawin dan lain-lain. Kelompok orang-orang seperti itulah yang merupakan lapisan sosial baru yang lahir pada situasi dunia yang bertambah maju. Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa pelapisan masyarakat Kerinci pada masa kini didasarkan kepada kekuasaan, kepandaian dan kekayaan. Kekuasaan yang besar seperti para pejabat yang menjadi pimpinan dari suatu kantor atau perusahaan biasanya menempati rumah-rumah mewah yang dibangun pada lokasi yang terpisah dari kumpulan rumah-rumah penduduk biasa atau pegawai rendah. Kepandaian seseorang seringkali membuat orang itu menjadi tenar dan dihormati, seperti para sarjana berbagai cabang ilmu pengetahu-

an dan teknologi. Dengan mempraktekkan ilmu kedokteran misalnya ia tidak akan punya kesempatan bergaul dengan bapak-bapak atau ibu-ibu tani yang menebang kayu di hutan atau mencangkul tanah di sawah. Ia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan sawah atau ladang bersama-sama dengan penduduk dusun yang memenuhi keperluan hidupnya dengan mata pencaharian tersebut. Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak jarang pula untuk menjauhkan pergaulannya dari lapisan masyarakatnya semula. Kekayaan memaksa orang untuk hidup penuh perhitungan. Ia sibuk mengurus berbagai macam usaha dan perusahaannya yang tidak dimiliki oleh lapisan masyarakat banyak.

BAGIAN IV

PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan masyarakat adalah salah satu unsur dalam *komunitas kecil*, seperti dusun atau Kemendapoan dalam daerah orang Kerinci. Pimpinan masyarakat tersebut ada yang berwujud formal dan ada pula yang berwujud informal. Pimpinan formal adalah pemimpin yang mempunyai legitimasi, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan yang resmi sesuai dengan ketentuan adat istiadat atau hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu jenis pimpinan ini memegang wewenang untuk memimpin secara resmi. Selain dari itu ada pula *pemimpin informal*, yang mempunyai keahlian yang diperlukan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Pemimpin serupa itu terlihat pada diri para alim ulama dan tuo tengganai dalam masyarakat Kerinci. Orang banyak akan taat karena wibawa, kepercayaan, serta pengetahuan yang dimilikinya. Maka dari itu di atas pundak pemimpin tersebut terletak kekuasaan dan kewibawaan untuk mempengaruhi sehingga kehendaknya selalu diikuti orang lain.

Adapun pengaruh dari kedua macam wujud pemimpin tersebut di atas boleh dikatakan sama besar dan sama kuatnya. Oleh sebab itu segala sesuatu yang diputuskan dalam rangka menjalankan kebijaksanaan pemerintahan dalam suatu komunitas seringkali didahului oleh kesepakatan antara kedua macam pemimpin itu. Besarnya pengaruh pemimpin itu dilatarbelakangi oleh pengesahan resmi menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat yang bersangkutan dan di lain pihak adanya keahlian yang diperlukan serta diakui oleh warga masyarakat setempat. Dan sekaligus para pemimpin yang demikian itu mempunyai sifat-sifat yang menjadi cita-cita dari warga masyarakat. Sikap dan tingkah laku mereka selalu ditiru. Bagaimana pengaruh dan peranan masing-masing pimpinan masyarakat tersebut akan terlihat pada uraian berikut ini.

PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan formal. Pimpinan masyarakat dusun yang formal terdiri dari Kepala-kepala Kemendapoan. Di bawah Kepala dusun ada lagi yang bertugas sebagai Mangku, Kadi, Alingan dan Debalang.

Sebagai kepala dusun, padanya terletak hak dan tanggung jawab untuk memelihara keutuhan wilayah dengan menjaga batas-batas wilayah dan tegaknya hukum yang menjadi pegangan bersama keamanan dari bahaya yang bersumber daripada kejahatan manusia, gangguan binatang buas, bencana alam dan lain-lain di samping menjalankan kewajiban yang diturunkan dari pihak pemerintah lebih atas (Kemendapoan).

Di pihak lain *Mendapo*, yang menjadi atasan daripada Kepala-kepala dusun memegang tanggung jawab yang lebih luas. Di samping wilayahnya yang memang jauh lebih luas daripada sebuah dusun, yaitu dari berpuluh-puluh dusun juga masalah yang dihadapinya jauh lebih banyak dan kompleks.

Perkara-perkara atau hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat dusun, harus diselesaikan olehnya, atau meneruskannya kepada tingkat yang lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mendukung kepemimpinannya antara lain :

1. Surat keputusan tentang pengangkatannya yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah.
2. Kepercayaan masyarakat.
3. Kesanggupan atau kemampuannya dalam menjaikan atau mengemban tugas tersebut, seperti menguasai hukum adat dan lain sebagainya.

Oleh karena itu mereka yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin adat di sini harus memenuhi persyaratan khusus dan persyaratan umum. Kesehatan jasmani dan rohani, kemandirian ekonomi pribadi, keluhuran budi, keberanian, serta umur yang tidak terlalu tua ataupun muda, merupakan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi. Sedangkan salah satu syarat khusus ialah agar kepala dusun itu seorang penduduk asli.

Sebagai seorang kepala dusun ia diberikan hak sebagai berikut :

1. menyanggah gelar *Kepala Dusun*,
2. mewarisi seperangkatan benda-benda pusaka berupa pakaian adat, senjata, alat kesenian dan sejenisnya,
3. memimpin/mengetuai persidangan adat,
4. menyimpan piagam dan lain-lain.

Di samping hak-hak tersebut kepadanya dibebankan beberapa kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban tersebut antara lain :

1. Menjaga kerukunan anggota masyarakat yang berlainan *perut* dan kalbunya itu.
2. Menyelesaikan semua pekerjaan yang dibebankan oleh pihak Mendapo, qtau yang lebih tinggi lagi, secara rutin maupun temporer.
3. Mendamaikan perkara antara dua pihak yang bersengketa.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara dan usaha, seperti menetapkan waktu turun ke sawah, memimpin penyelenggaraan rumah-rumah ibadat, tempat-tempat pengajian dan sebagainya.

Pengangkatan seseorang menjadi kepala dusun melalui proses yang cukup panjang dan meminta waktu yang banyak. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatunya itu harus berjalan di atas ketentuan yang sudah membudaya dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh untuk mengangkat Depati baru sebagai pengganti Depati yang diberhentikan karena sesuatu sebab, harus ditempuh *sistem gilir ganti*, artinya jabatan Depati tersebut tidak boleh diwariskan kepada anak atau saudara dari Depati yang diberhentikan atau mengundurkan diri, akan tetapi harus digantikan oleh salah seorang di antara kalbu yang lain yang harus menerima giliran itu. Untuk menentukan giliran kalbu mana yang akan mendapat giliran, diadakan rapat ninik mamak. Keputusan rapat ninik mamak itulah yang menetapkan kalbu yang mana yang akan dipilih menjadi Depati.

Begitu rapat ninik mamak menetapkan kalbu yang mendapat giliran menjadi depati, maka anggota kalbu yang bersangkutan mengadakan rapat kalbu untuk memilih di antara mereka yang patut dijadikan calon. Para calon itu terdiri dari para tengganai dari masing-masing perut. Calon terpilih itu diserahkan kepada ketua kalbu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya kalbu meneruskan kepada lurahnya masing-masing untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahannya.

Hubungan *Depati* (Kepala Dusun) dengan unsur pimpinan lainnya berlaku hubungan formal, di mana segala sesuatunya itu didasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Umumnya para Depati memiliki tanda pengenal yang membedakan dirinya dari anggota masyarakatnya. Tanda pengenal itu seringkali tampak dalam wujud yang konkrit dan tidak konkrit. Tanda pengenal konkrit adalah berupa rumah tempat tinggal/kediaman yang lebih besar dan lebih bagus teknologinya jika dibandingkan dengan rumah-rumah anggota masyarakat biasa, atau pakaian yang dipakainya, seperti kancing baju, kopiah atau topi. Pada masa pemerintahan Belanda, kancing baju para Mendapo atau para Depati diberi lambang dengan huruf "W" sebagai singkatan dari nama ratu Belanda Welhelmina. Begitu pula pada kepala tongkat dan hulu pedang yang membedakan antara Mendapo dengan Depati terletak pada warnanya. Mendapo berwarna kuning emas, sedangkan Kepala Dusun (Depati) putih perak.

Tanda pengenal yang tidak konkrit terletak pada gaya atau sikap orang terhadapnya, baik dalam pertemuan resmi atau dalam pertemuan biasa, di mana orang bersikap merendahkan diri terhadapnya seperti memberi hormat, menundukkan kepala, menyapanya dengan tutur kata yang lemah lembut dan penuh sopan santun.

Adapun hubungan pimpinan masyarakat tersebut di atas dengan warganya selalu dimanifestasikannya dalam bentuk instruksi dan perintah, atau sebaliknya hubungan antara warga masyarakat dengan pemimpin itu selalu bersifat memohon dan mengharap. Setiap perkataan yang ditujukan kepada warga masyarakat, hampir semuanya berwujud perintah, misalnya perintah untuk membersihkan pekarangan rumah, mengalirkan air-air yang tergenang, membuang dan membakar sampah. Bahkan tidak jarang pihak pemimpin itu menjatuhkan denda terhadap mereka yang tidak mematuhi perintahnya. Bagi masyarakat, sesuatu yang diperintahkan itu wajib dilaksanakan karena akibatnya akan fatal bilamana tidak ditaati. Sesuatu yang ingin mereka sampaikan haruslah melalui suatu permohonan yang bersifat pengharapan.

Pengaruh pimpinan dalam masyarakat amat kuat, oleh karena jabatan yang dipikulnya itu sebagian besar bersumber dari Pemerintah atau penguasa yang tertinggi di daerah yang bersangkutan. Ia sangat disegani oleh anggota masyarakat. Kata-katanya tiada orang yang berani membantahnya. Semua perintahnya berjalan dengan semua larangannya dijauhi orang. Dengan demikian semua pekerjaan berjalan dengan lancar.

Pimpinan tradisional yang berfungsi sebagai partner dari pimpinan formal, dalam memimpin masyarakat pada umumnya cukup banyak jumlahnya pada setiap dusun. Mereka itu terdiri dari para alim ulama, cerdik pandai, ninik mamak dan tuo tengganai. Lapangan kepemimpinan mereka satu dan lain tidak sama. Para alim ulama yang kebanyakan telah lulus dari berbagai macam adrasah, pesantren, surau dan perguruan tinggi Islam bergerak pada bidang Dakwah Islam. Mereka menganjurkan dan mendorong orang untuk menjalankan perintah agama Islam dengan baik dan patuh. Kaum cerdik pandai yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang banyak dan luas pengetahuannya, selalu bertindak mengarahkan masyarakat kepada cara-cara hidup yang lebih baik, serta mengajak dan memberi teladan yang bisa ditiru.

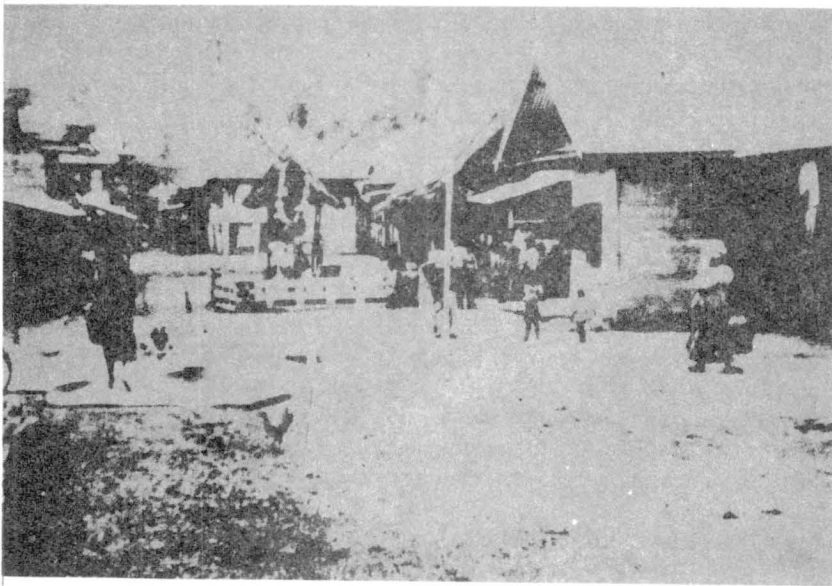
Lain pula halnya dengan ninik mamak dan tuo tengganai. Mereka itu senantiasa menjadi suri teladan bagi anak buah dan anak kemenakannya. Silang sengketa yang timbul antara mereka yang satu atau berlainan kalbu diusahakan atau diselesaikan menurut cara-cara perdamaian.

Adapun faktor yang mendukung kepemimpinan mereka itu ada berbagai macam bentuk dan sifatnya. Kebanyakan karena kemampuan mereka dalam meyakinkan masyarakat akan kebenaran sesuatu yang mereka anjurkan, seperti menyuruh anak-anak supaya belajar dengan tekun dan jangan berahlak atau berperangai jahat. Oleh karena itu ilmu pengetahuan, pengalaman, budi baik serta usia yang relatif tua, adalah faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan mereka.

Hubungan antara pimpinan informal dengan pimpinan formal seperti antara ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dengan Depati atau Mendapo terwujud dalam bentuk hubungan horizontal, dan diikat secara persahabatan, tolong-menolong dan saling melengkapi akan kekurangan masing-masing.

Beberapa masalah yang menyangkut tugas pemerintahan, dipecahkan dengan mencari titik temu pendapat antara kedua jenis pimpinan ini. Setelah itu tercapai baru kemudian dijalankan atau dipelajari sebab-sebab terjadinya sesuatu kegagalan pada hal-hal yang pernah dilaksanakan.

Hubungan antara pimpinan informal dengan masyarakat tidak banyak berbeda dengan hubungan masyarakat dengan pimpinan formal sebagaimana layaknya hubungan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Masyarakat menganggap para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai itu sebagai juru selamat. Mereka merasa kehadiran para pemimpin-pemimpin itu sebagai sesuatu kebutuhan pokok. Sebaliknya para pemimpin juga berpandangan sama. Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas itu tidak akan ada faedahnya kalau tidak ada wadah yang menampungnya. Hidup mereka akan menjadi hambar tanpa membawa manfaat yang berarti. Adanya perasaan saling memerlukan itu, menyebabkan hubungan mereka bagaikan aur dengan tebing, artinya satu dan lain saling membutuhkan, saling memperkuat kedudukan satu sama lain.



Gambar 14 :

Lapangan upacara tempat berlangsungnya penobatan Dépati atau Mendapo

Pengaruhnya pimpinan itu dalam masyarakat dapat memberi warna terhadap kehidupan masyarakat. Pada waktu dan tempat tertentu pengaruh pimpinan informal itu adakalanya melebihi pengaruh pemimpin formal. Banyak fatwa-fatwa ulama atau wejangan-wejangan para cerdik pandai yang

dijadikan pegangan warga masyarakat, selalu dipertaruhkan dengan jiwa raganya. Dalam masa gawat atau pada masa akan menolak sesuatu kejahatan, maka peranan dan pengaruh mereka amat menentukan bagi berhasil atau tidaknya pekerjaan itu. Pada waktu perang melawan penjajahan Belanda dahulu, atau pada waktu akan mencegah berbagai kelakuan yang tidak disenangi masyarakat, seperti perbuatan maksiat, mereka selalu nampak sebagai pemimpin atau promotor untuk menanggulangi keadaan tersebut.

PIMPINAN MASA KINI

Antara pimpinan formal masa kini dengan pimpinan formal tradisional, hampir-hampir tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Hingga saat sekarang mereka masih saja memakai gelar *Depati* untuk seorang Kepala Dusun dan gelar *Mendapo* untuk Kepala Kemendapoan. Gelar-gelar tersebut senantiasa diberikan melalui suatu upacara tradisional di lapangan terbuka, serta dihadiri oleh ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, dan seluruh lapisan masyarakat dusun.

Memang kenyataannya belum ada istilah baru untuk mengganti sebutan tersebut. Jabatan atau yang menjadi lapangan kepemimpinan mereka juga belum nampak meluas. Begitu pula daerah kerja mereka tidak pernah mengalami perubahan yang berarti.

BAGIAN V SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Dalam usaha mengendalikan masyarakat agar dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai yang ada dalam sebuah dusun, atau suatu wilayah yang lebih luas meliputi alam Kerinci, maka ditempuh usaha-usaha seperti mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, mengembangkan rasa takut. Melalui cara-cara tersebut diharapkan setiap anggota suatu masyarakat berfikir, dan bertindak laku sesuai dengan hal yang menjadi kebudayaan suku bangsa itu.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Salah satu cara untuk mempertebal keyakinan masyarakat, ialah melalui pendidikan. Bagi orang Kerinci ada tiga macam jalur yang dipergunakan dalam memberikan pendidikan kepada warga masyarakat, yaitu apa yang dikenal dengan istilah pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal.

Pada saat ini melalui pendidikan formal, warga masyarakat dapat belajar pada Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama atau Sekolah Lanjutan Atas. Dengan adanya sarana pendidikan semacam itu anak-anak akan dapat menge-

tahui beberapa bidang ilmu pengetahuan yang amat berguna dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat, seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa dan lain-lain. Di samping itu ada pula pendidikan formal lain, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pendidikan jenis terakhir ini yang telah berjalan semenjak waktu dahulu dalam bentuknya yang sederhana pada dasarnya bermaksud untuk memberi bekal kepada anak didik tentang pengetahuan agama yang didasarkan pada ajaran Islam. Pengetahuan agama tersebut akan mengarahkan setiap orang untuk berfikir dan bertingkah laku, yang didasarkan kepada keyakinan yang kuat akan kebenarannya. Atas dasar keyakinan itulah setiap anggota dusun, mendapo ataupun alam Kerinci, mengukur dan menilai setiap tingkah laku orang lain ataupun dirinya sendiri. Selain pengetahuan agama yang mengajarkan dan meyakinkan seseorang tentang hubungan manusia dengan penciptanya, sarana pendidikan ini mendidik pula setiap anak didiknya agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Antara lain daripadanya ialah pendidikan budi pekerti, yang tidak lain menanamkan norma-norma, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu.

Pendidikan non-formal masa kini berwujud pemberian bekal pengetahuan ketrampilan khusus, misalnya latihan kepramukaan. Kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kursus memasak, Kelompok Belajar Pengetahuan Dasar dan sebagainya. Sedangkan yang berada dalam bentuk informal, ialah pendidikan yang terlaksana di dalam lingkungan keluarga, agar supaya para anggota keluarga dapat bersikap dan berbuat menurut nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Misalnya saja orang tua sering mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kalau menyebut harimau tidak boleh memakai sebutan "harimau", sebab dipandang terlalu kasar dan bahkan dapat mendatangkan kemarahan harimau-harimau yang berada di dalam hutan, sehingga akan mendatangkan mala petaka bagi seseorang atau sekelompok orang. Untuk itu orang harus menyebutnya dengan memakai istilah "ninek". Anak-anak tidak dibolehkan menyapa orang yang lebih tua umur daripadanya dengan istilah "empo" (engkau), akan tetapi harus memakai istilah yang lunak, yaitu "kayo".

Banyak lagi kegiatan pendidikan informal ini yang menanamkan keyakinan kepada setiap anak didik yang nantinya akan menjadi warga dusun ataupun Kemendapoan itu. Antara lain mengenai sopan santun, kebersihan, kesehatan, tata cara dan hubungan kekeluargaan, dan lain-lain.

Di samping usaha-usaha yang berwujud pendidikan, ada pula yang berwujud Sugesti Sosial. Sugesti Sosial itu juga menjelma dalam berbagai bentuk dan caranya. Ada yang disebut dongeng, tapi ada pula yang disebut pepatah-pepatah. Suatu contoh dongeng yang populer di kalangan masyarakat Kerinci ialah apa yang disebut *Dongeng Hantu Gedang*, yang dilukiskan sebagai berikut :

Di dalam sebuah dusun hiduplah sepasang suami istri dan seorang anak perempuannya yang amat cantik. Kecantikan anak perempuan itu ada yang mengumpamakan pipinya bak pauh dilayang, rambutnya ikal bak mayang mengurai, bibirnya bak delima merkah, betisnya bak perut padi, alis bak semut beriring dan sebagainya. Pada suatu hari sepasang suami-istri itu menangis dan meratap serta meraung-raung sambil menyeru nama anaknya di sepanjang sungai tepian mandi yang kebetulan terletak cukup jauh dari rumah mereka. Mendengar ratap tangis yang demikian itu maka seisi dusun pun berdatangan ke tempat itu. Setelah mendengar penuturan suami istri tersebut, maka dibunyikanlah *tabuh larang* sebagai pertanda dusun dilanda kerusuhan. Sebentar saja ramailah tempat tersebut oleh mereka yang berdatangan dari sawah dan dari dusun-dusun lain. Dengan petunjuk serta komando dari Kepala Dusun mereka segera mencari, masuk ke dalam hutan belukar, terjun menyusur tebing, sungai, teluk dan rantau, namun gadis yang dicari tetap saja tidak dijumpai.

Melalui penglihatan tukang nujum diketahui bahwa sang gadis telah diculik oleh Hantu Gedang, sewaktu ia sedang mandi di sungai.

Dongeng seperti dilukiskan di atas berfungsi untuk menakuti anak-anak agar jangan berani pergi mandi sendirian ke sungai atau memasuki hutan, karena bahayanya banyak sekali. Demikian dongeng tersebut sering diceritakan kepada anak cucu ketika mengantarkan mereka tidur pada malam hari.

Perwujudan sugesti sosial ada pula melalui pepatah-pepatah. Sama halnya dengan orang Melayu Jambi, maka orang Kerinci juga menggunakan pepatah-pepatah dalam usaha memberikan sugesti sosial kepada anggota masyarakat. Pada masa lampau, di mana pendidikan formal dan non-formal seperti sekarang belum dikenal orang di wilayah ini, pepatah-pepatah, pantun-pantun dan kata-kata kiasan, banyak yang berfungsi membina akhlak dan tingkah laku masyarakat. Dengan pepatah, pantun dan sebagainya itu seseorang bisa menjadi lebih baik kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Seseorang yang menguasai berbagai bentuk pepatah, biasanya berperangai baik, berbudi luhur, tidak mudah panik, suka menolong, dan suka menerima tunjuk ajar dan tegur sapa dari pihak mana pun juga.

Pada upacara perkawinan misalnya, sejak dari masa bertunangan, masa pesta kawin, bahkan sampai pada masa perceraian dan sebagainya, kedudukan pepatah atau kedudukan orang yang mahir dalam menggunakan pepatah sangat penting.

Banyak pula pepatah yang dipakai untuk menyindir tingkah laku seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma sopan santun yang menjadi pegangan hidup mereka yang sedusun. Misalnya demikian: "Orang perajuk ilang seorang, orang pemegih gedang tekeno". Artinya, seseorang yang mudah merajuk, alamat akan tersisih dari pergaulan masyarakat dusunnya, orang yang tidak pandai menahan rasa marah, alamat akan menemui berbagai kesusahan atau penyesalan yang berkepanjangan. Contoh lain adalah: "Sealun

Subak, seletuik bedei". Artinya, seirama soraknya serempak meletuskan bedil (melepaskan tembakan). Ungkapan ini mengandung makna jangan ada di antara mereka yang tergabung dalam satu kesatuan, seperti satu Lurah, satu Kalbu, satu perut, ataupun yang lebih luas lagi, seperti satu dusun atau kemandapaoan yang berpandangan lain daripada pandangan bersama, dan jangan pula ada di antara mereka yang bertindak terlalu jauh atau terlampau lamban daripada jadwal yang telah disepakati secara bersama.

Kesimpulan dari pepatah-pepatah tersebut di atas adalah bertujuan untuk memelihara agar adat istiadat yang telah mereka warisi dari angkatan terdahulu tetap lestari dan berkelanjutan sampai ke anak cucu.

Selain daripada pendidikan, dan seperti sosial, masih ada lagi cara yang digunakan orang untuk mengedalikan sosial di daerah ini. Cara tersebut dikenal dengan istilah "*mecah unding*", yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah berunding memecahkan sesuatu masalah, atau penyampaian pendapat. Pada upacara mecah uning itu pokok permasalahan adalah masalah keperdataan seperti membagi harta warisan, penetapan penjadohan, penetapan penggiliran pemakaian tanah, sawah dan lain-lain.

Biasanya yang menjadi pimpinan pertemuan adalah mereka yang paling disegani di dalam kelompok itu, seperti: Tenganai, Tuo, atau ninik mamak. Hal itu disebabkan karena pada tangan merekalah terletak wewenang dan amanah dari semua anggota kesukuan atau kekalbuan dari masing-masing kelompok. Melalui pertemuan mecah undingitu para tengganai tuo, selalu mengarahkan pembicaraannya kepada tujuan untuk menjunjung tinggi adat lama pusaka usang. Adat nan tidak lapuk di hujan, tidak lekang di paneh (panas), titin tareh tangga batu, diasaknyo layu, diangurnyo mati. Itu semua bermakna bahwa jika mau menghukum, gunakanlah keadilan sebagaimana yang telah menjadi pegangan bersama yang telah diwarisi dari generasi masa lampau. Jangan membuat keadilan yang tidak ada pegangan atau pedoman yang telah diuji kebenarannya.

Agama dan adat bagi orang Kerinci seolah-olah menjadi satu, sehingga hampir-hampir tidak ada garis pemisah yang tegas antara keduanya. Akan tetapi walaupun demikian kedudukan agama lebih penting dan diutamakan, banyak nilai-nilai agama dijadikan alat untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan warga masyarakat, di antaranya musyawarah, mupakat, berperangai baik, dan sebagainya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Islam dengan tegas mengajarkan perzinahan itu perbuatan terlarang dan dimurkai Tuhan.

Dengan bermusyawarah banyak urusan sulit dapat dipecahkan. Keretakan dalam keluarga, cekcok antar mereka yang bertetangga, semuanya itu dapat diselesaikan melalui musyawarah atau perundingan antar wakil-wakil mereka yang bersengketa.

Keruntuhan akhlak dan kejahatan moral dapat dibendung dengan menggunakan pengaruh agama. Umpamanya menasehati masyarakat, ancaman

hukuman dari Tuhan yang dimuat dalam kitab-kitab agama, seperti Al Qur'an dan hadis-hadis nabi serta fatwa-fatwa dari para ulama.

Ada suatu sistem yang dipraktekkan oleh masyarakat Kerinci dalam memelihara keyakinan masyarakat melalui agama, yaitu *sistem gilir ganti* dalam memikul tanggung jawab memelihara kemajuan mesjid/surau. Antara beberapa kalbu atau lurah-lurah daripada sebuah dusun, digilir gantikan menjadi *pegawai mesjid*, seperti Imam, khatib dan bilal, dengan menetapkan masa duduk (*priode*) daripada setiap kepengurusan.

MEMBERI IMBALAN

Memberi imbalan termasuk usaha untuk pengendalian sosial. Imbalan yang diberikan itu dapat menjelma dalam bentuk yang nyata mau pun yang tidak nyata, serta imbalan dalam agama. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat daerah ini bahwa memberikan sesuatu penghargaan atau balas jasa bagi anggota masyarakat yang menunjukkan kebaikan dalam sesuatu perbuatan kepada sesama mereka. Seseorang yang senantiasa mengajak orang banyak sambil diri pribadi mempraktekkan berbagai kebaikan atau menolak berbagai kejahatan seperti guru-guru, para budayawan dan budiman selalu diberi imbalan yang konkrit. Imbalan tersebut sering berupa kedudukan dalam masyarakat, umpamanya menjadi lurah, ninik mamak, jadi *Depati* atau jadi *Mendapo*. Bila sudah sampai pada taraf ini, maka imbalan-imbalan yang diperoleh seseorang itu akan lebih banyak lagi. Pekerjaan rumah tangganya akan dibantu oleh masyarakat, dan orang akan menempatkannya pada kedudukan sebagai pemimpin, dihormati di samping dan bahkan adakalanya dikultuskan secara berlebih-lebihan.

Dalam pada itu imbalan yang tidak konkrit sering juga diwujudkan dalam bentuk piagam yang tidak tertulis, akan tetapi abadi dalam kenangan masyarakat, diwariskan pula kepada generasi demi generasi sebagai penerus dari kebudayaan setempat. Sebagai contoh banyak rumah panjang yang diberi nama orang yang berjasa dalam membangun dan membina lingkungan tersebut. Hal itu diberikan sebagai menghormati atau mengenang kebaikan yang pernah disumpangkan seseorang kepada warga masyarakatnya. Adapun makna dari pemberian imbalan serupa itu antara lain :

1. Untuk menggelorakan semangat massa terhadap peristiwa yang bersejarah itu.
2. Agar peristiwa atau kenang-kenangan itu tetap abadi sepanjang sejarah.
3. Sebagai cermin perbandingan atau suri teladan bagi generasi mendatang.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya pemberian imbalan seperti tersebut di atas cukup besar, baik ke dalam maupun ke luar. Dalam lingkungan masyarakatnya pihak yang bersangkutan atau keluarganya merasa pengorbanannya tidak sia-sia, dan mendorong maksud untuk memperlipatgandakan jasanya. Ke luar, pihak lain akan memandang dan menilai bahwa peradaban

Di dalam agama Islam diajarkan bahwa jasa yang diberikan oleh seseorang itu jika disertai dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah, akan menerima pahala (ganjaran) dari Allah Subhanahuwataala. Masyarakat dusun di dalam alam Kerinci yang 100% menganut agama Islam itu, yakin betul bahwa sesuatu perbuatan yang baik itu akan berpahala besar.

Berdasarkan pada keyakinan tersebut banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan jasa-jasa baiknya. Jasa-jasa itu sering berbentuk pemberian sedekah kepada yatim piatu, pembangunan rumah-rumah ibadat, tempat-tempat pendidikan, perawatan kesehatan dan sebagainya.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Salah satu cara yang dapat membendung seseorang atau sekelompok orang untuk bertingkah laku yang berlainan dengan kebiasaan lingkungannya adalah mengembangkan rasa malu. Dengan memiliki rasa malu berarti dapat pula mencegah seseorang atau kelompok untuk melakukan perbuatan terlarang.

Ada beberapa peranan yang dapat mempertebal rasa malu pada seseorang atau sekelompok orang. Peranan tersebut masing-masing adalah: peranan gunjing dan peranan agama.

Gunjing, atau pergunjungan biasanya muncul pada saat-saat atau pada tempat-tempat tertentu. Bagi masyarakat Kerinci, gunjing itu muncul ketika orang berkumpul pada bangku-bangku atau pelataran yang terdapat di muka mesjid, di pekarangan rumah orang, di tepian mandi dan tempat-tempat lainnya.

Waktu pergunjungan yang paling tepat ialah pada saat-saat orang akan melakukan sembahyang berjemaah seperti sembahyang magrib, isya, sembahyang Jum'at atau pada suatu upacara peringatan di mesjid dan di rumah seseorang. Biasanya yang dipergunjingkan itu adalah soal tingkah laku seseorang di antara warga dusun mereka. Umpamanya memperkatakan bahwa si anu pada hari Jumat kemarin tidak dapat mengerjakan sembahyang Jumat disebabkan asyik menuai padi di sawah. Waktu ia sampai di tangga mesjid, orang keluar dari mesjid karena sembahyang sudah usai. Pada tempat dan waktu yang bersamaan atau berlainan sekelompok orang menggunjingkan tentang si Rijal yang sok alim, akan tetapi anak-anaknya seorang pun tidak ada yang diajar mengaji atau sekolah agama.

Pengaruh daripada gunjing ini nampaknya cukup berkesan, tetapi salah satu hal tersebut jadi bumerang, di mana mereka yang senang bergunjing itu sesama mereka ada pula yang merasa disinggung atau direndahkan, lalu terbit emosi dan hilang kesabaran, akhirnya pertemuan yang serasi itu lalu berubah menjadi arena perbantahan atau perang mulut.

Berdasarkan pada kenyataan itu, maka pada beberapa tempat perbuatan gunjing itu dikategorikan sebagai suatu penyimpangan dari adat kebiasaan,

atau agama. Oleh karena pengaruhnya yang masih serba relatif itu maka peranan gunung tidak besar dibandingkan dengan peranan agama. Agama merupakan suatu kekuatan yang berwibawa dalam membentuk masyarakat dan kebudayaan. Pada hakikatnya, ajaran-ajaran agama merupakan motif utama yang menguasai kegiatan-kegiatan ke arah mempertinggi derajat kemajuan umat manusia. Orang Kerinci yang memang kuat agamanya, telah sejak semula mengambil alih petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al Qur'an dan hadist Nabi, serta ijmak ulama.

Untuk memelihara kebudayaan yang telah menjadi pusaka mereka turun temurun yang disebut adat istiadat, kepada mereka ditanamkan perasaan malu untuk melakukan perbuatan tertentu, seperti: pembohong, pemalas, penjudi, pemabuk, kikir, sombong, penakut, dan peminta-minta. Jadi bila mana ada di antara warga masyarakat, pendukung kebudayaan ini tidak sengaja melakukan sesuatu yang merusak nilai-nilai budaya masyarakat setempat maka pelaku pelanggaran tersebut segera ditindak. Tindakan tersebut ada yang berbentuk hukuman dan ada pula yang berbentuk peringatan dan nasehat. Akan tetapi yang terbanyak dilakukan adalah dalam bentuk nasihat. Dengan nasihat yang terarah serta disampaikan dengan metoda yang meyakinkan, mereka yang diberi nasihat segera sadar, akan kekeliruannya. Nasihat-nasihat tersebut biasanya berintikan pelajaran agama, dengan mengetengahkan ancaman hukuman yang dijanjikan Allah Subhanahu wata'ala, dalam kitab sucinya Al Qur'an, dan pengetahuan tentang adat istiadat setempat, sambil mengatakan baik buruknya bagi seseorang yang melakukan ataupun menjauhkan perbuatan itu, di dalam pergaulan masyarakat mereka.

Pengaruh daripada kepercayaan tersebut dapat menjadikan masyarakat hidup dalam suasana aman, penuh kepercayaan kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain serta rencana dan pekerjaan yang bagaimana pun berat dan sulitnya akan dapat diselesaikan. Selain daripada itu pihak luar pun akan merasa hormat dan segan dengan lingkungan dimaksud.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Di dalam ajaran Islam ada beberapa perbuatan yang dilarang dan diharuskan bagi pemeluknya. Untuk melakukannya ada berbagai macam perbuatan yang oleh agama Islam dilarang untuk diperbuat, akan tetapi di dalam naskah ini hanya dicantumkan beberapa macam saja.

Perbuatan-perbuatan terlarang tersebut antara lain seperti :

1. *Dago-dagi*, yaitu memberontak melawan Pemerintahan yang syah.
2. *Samun -Sakai*, yaitu membunuh dan mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.
3. *Lepeh-Racun*, yaitu melakukan penganiayaan dengan jalan memasukkan bahan pembunuh atau racun ke dalam bahan makanan atau minuman.

4. Menghina orang lain.
5. Mencuri.
6. Berzinah.
7. Menipu/mengicuh.
8. Durhaka.

Di samping perbuatan yang dilarang, ada lagi perbuatan yang harus dilakukan oleh penganut agama Islam, di antaranya ialah :

1. Berperangai baik.
2. Memegang amanah.
3. Cerdik dan pandai.
4. Berjiwa sosial.
5. Rendah hati.
6. Pemurah, dan lain-lain.

Sudah lumrah atau menjadi ketetapan bahwa setiap ketentuan maupun peraturan selalu diikuti dengan ancaman hukuman bagi individu atau masyarakat yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Ada berbagai sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, di antara lain diancam hukuman berupa siksaan diakhirat. Ada juga yang diancam hukuman pada masa hidup, seperti hukuman *memapas dan membangun*, membayar denda, didamaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Di atas sudah diutarakan bahwa sanksi hukuman itu ada bermacam-macam. Sekarang kita lihat sanksi hukum pada masa masih hidup. Pada masa masih hidup pun harus terbagi lagi pada tiga macam hukuman yaitu hukuman negara, hukum adat dan hukum masyarakat. Sebagai bukti dapat dibaca pada contoh-contoh di bawah ini. Seorang (pemuda) menangkap gadis di jalan harus gadis itu mengadu dengan menunjukkan buktinya. Barang-barang pemuda itu dipegang oleh sang gadis, kemudian haruslah diperiksa oleh Kepala Kampung/Dusun. Jikalau pemuda itu mengaku kesalahannya karena ada bukti, maka ia didenda ayam satu ekor, beras segantang dan sirih pinang. Bilamana denda tersebut sudah diterima, barulah pemuda dan gadis itu dikawinkan (ketentuan ini termuat pada pasal 18 dan pasal 19 dari hukum Adat Kerinci). Jika ada pemuda (jejaka) atau punya istri memegang susu istri orang dengan maksud hendak zinah, perempuan tersebut tiada mau, serta mengadu kepada kepala dusunnya, maka kepala dusunnya itu harus memeriksa laki-laki itu. Dan apabila ternyata salahnya, maka dendanya bagi laki-laki yang memegang istri orang tersebut 10 emas, dibayar dengan kain hitam atau kain putih satu kayu, dan kain yang satu kayu itu enam kabung, jumlah dua belas Ela (Ketentuan ini termuat dalam pasal 22 dari Hukum Adat Kerinci).

Bilamana hukuman tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan maka perkaranya diteruskan kepada Negara. Maka negaralah yang menentukan bagaimana pelaksanaan selanjutnya. Akan tetapi terhadap kesalahan yang kecil-kecil, karena tidak cukup alasan untuk membawanya ke persidangan adat, biasanya masyarakat dusunlah yang memberi hukuman terhadap pelaku

kesalahan dimaksud. Hukuman tersebut biasanya berupa pemencilan yang bersangkutan dari pergaulan orang banyak. Tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dusun mereka. Bila dia ke hilir, orang banyak ke hulu, bila dia ke hulu, orang ke hilir. Demikian bunyi kiasannya. Bahkan adakalanya lebih tragis lagi ialah dirinya akan dijadikan bahan pergunjangan masyarakat setiap waktu.

BAGIAN VI BEBERAPA ANALISA

Bentuk kesatuan hidup orang Kerinci saat ini boleh dikatakan telah berada dalam masa peralihan ke taraf yang lebih kompleks sifatnya. Hal ini dapat kita lihat pada bentuk bangunan yang disebut rumah panjang. Pada masa lampau orang merasa berkewajiban untuk menetap di rumah-rumah panjang yang menjadi lambang dari suatu keluarga batih (tumbi). Kenyataan pada akhir-akhir ini orang lebih cenderung untuk hidup terpisah dari keluarga induk mereka. Hal ini disebabkan karena mereka bermaksud untuk menghindari ocehan orang, seakan-akan mereka tidak mampu hidup berdiri sendiri.

Hukum adat yang mengatur bagaimana status kepemimpinan adat, tata cara perkawinan, tentang menambang emas, membuka hutan, tentang bagi hasil, tentang kemasyarakatan nampak bagai sesuatu yang bernilai tinggi, karena sampai sekarang senantiasa dijadikan pedoman dalam menetapkan sesuatu keputusan adat. Untuk memilih seorang Depati yang memerintah atau Depati tunggul waris, *sistem gilir ganti* masih tetap dipakai orang. Dalam pemilihan jodoh, orang masih belum mau menjodohkan antara sepasang pria dan wanita yang masih bersaudara ibu. Tentang membuka hutan dan bagi hasil menanam padi, orang masih tetap berpegang kepada peraturan lama. Hanya pada hal-hal yang luar biasa sajalah orang baru meminta campur tangan pihak pemerintah, terutama tentang terjadinya peristiwa kriminal, seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Sistem kepemimpinan adat dari seorang Depati Kepala Dusun, hingga sekarang masih dipertahankan, meskipun diakui masih ada beberapa cara baru untuk memimpin masyarakat dengan mempergunakan sistem yang lebih maju. Namun semuanya itu harus disejajarkan dengan tugas dan fungsi Kepala Dusun.

Sistem pelapiran sosial mengalami pergeseran yang cukup berarti, karena dewasa ini di dusun-dusun sudah banyak orang-orang muda yang memegang tampuk pimpinan adat menggantikan kedudukan Depati, Lurah dan ninik mamak. Demikian pula dengan pendatang baru yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Walaupun mereka itu tidak selalu dapat duduk sebagai anggota kerapatan adat, namun saran dan pendapat mereka sering pula di-

minta untuk memecahkan masalah yang timbul di dalam dusun. Jadi jelaslah di sini bahwa nilai budaya seperti pelapisan sosial itu kurang kuat kedudukannya di dalam masyarakat. Para pendukung dari kebudayaan tersebut satu per satu meninggalkan kebiasaannya. Timbulnya gejala serupa itu tidak dapat tidak adalah sebagai akibat daripada :

1. Bertambah majunya dunia pendidikan, di mana pelosok-pelosok dusun yang tadinya merupakan tempat yang terpencil di kaki bukit atau gunung, kini sudah menjadi tempat yang terbuka dan ramai semenjak telah didirikannya gedung-gedung sekolah, madrasah dan tempat-tempat kursus serta latihan-latihan.
2. Di pihak lain para pemuda-pemudi yang sempat bersekolah di kota-kota besar sudah banyak mengenal cara-cara hidup di tempat lain yang jauh lebih serasi dan tidak kaku seperti yang pernah dipraktikkan oleh angkatan sebelumnya.

Identitas kepemimpinan masyarakat juga sempat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Sebagaimana perwujudan tanda pengenal seseorang yang menyandang gelar pemimpin masyarakat. Pada waktu sekarang sukar sekali untuk mengenal mereka yang disebut pimpinan masyarakat. Mereka menjadi pemimpin itu kebanyakan masih berusia muda dan berpendidikan. Mereka kurang senang dengan cara-cara yang serba formal dan penuh basa-basi. Mereka tidak mau mengenakan pakaian adat jika tidak pada keadaan yang memaksa apalagi yang berwujud senjata tajam.

Suatu hal yang masih tetap dipegang teguh dan dijadikan pedoman dalam hal kepemimpinan adat, yaitu syarat-syarat bagi seseorang akan menjadi calon pemimpin itu haruslah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, kuat perekonomian rumah tangganya, berbudi luhur, berani dan lain sebagainya. Mengenai hak-haknya nampak gejala-gejala yang semakin merosot. Perkara-perkara adat yang seyogyanya dapat diselesaikan oleh pepatah adat, adakalanya diselesaikan lewat pengadilan Negeri baik itu perkara perdata, maupun perkara pidana. Dapat dimengerti di sini bahwa terjadinya pergeseran pada bidang tersebut, karena masyarakat sebagian sudah tidak menghayati lagi kaedah-kaedah hukum adat dusunnya secara baik, sebab mereka sudah terpukau oleh beberapa macam bentuk kebudayaan yang mereka terima melalui pendatang-pendatang baru ke tempat mereka, maupun yang mereka terima sebagai buah dari perjalanan atau petualangan mereka ke daerah lain, ataupun disebabkan pengaruh media massa yang semakin menjadi kebutuhan masyarakat.

Jika pada masa lampau masyarakat memberi hormat kepada pemimpin itu disertai oleh perasaan bahwa dirinya jauh lebih rendah dari mereka yang menduduki jabatan pemimpin, maka kini walaupun ada orang yang memberi hormat kepada pemimpin, maka itu tidak lebih daripada manifestasi kebudayaan timur yang sudah mendarah daging pada bangsa Indonesia pada umum-

nya. Jadi sama sekali tidak disertai dengan perasaan rendah diri. Sama halnya dengan yang lain-lain, karena sejak bangsa Indonesia merdeka, bangsa kita telah menemui kembali identitasnya yang selama ini telah hilang dari peradaban mereka. Wibawa dari seseorang pemimpin adat sebenarnya juga sudah sangat jauh berkurang. Jika dahulu setiap perintah yang datang dari atas, tanpa koreksi rakyat sudah terjun melaksanakannya. Tapi kini setiap perintah pihak atasan, sebelum disampaikan kepada masyarakat, para alat kekuasaan pemerintah dan pemuka masyarakat minta kesediaannya untuk mengamankan sesuatu yang diperintahkan itu. Di sini jelas bukan sifat musyawarahnya yang diutamakan, akan tetapi adalah disebabkan kewibawaan pemimpin adat sudah tidak seperti sediakala.

Pendidikan dalam kenyataannya sangat berperan di dalam mengendalikan masyarakat di samping bidang agama. Di dalam kesimpulan terdahulu telah diterangkan bagaimana besarnya pengaruh dan peranan pendidikan di dalam bidang-bidang tertentu, baik pendidikan yang bersifat formal, non formal maupun yang informal. Dunia pendidikan telah mengantr masyarakat sebagai gabungan dari beberapa individu, untuk mengenal berbagai pengetahuan dan teknologi modern. Pengetahuan yang bersifat sosial dapat mewarnai corak masyarakat. Anggota masyarakat dapat berpikir lebih realistis dengan menggunakan pikiran. Pendidikan mengubah cara berpikir masyarakat daripada kebiasaan lama yang senang "nrimo", kepada cara berpikir yang menggunakan akal dan pikiran, sehingga tidak mudah terbawa dan diombang-ambingkan oleh sesuatu yang belum dicoba atau belum diuji kebenarannya. Dengan bersekolah orang mampu baca tulis, berhitung dan sebagainya. Hal ini merupakan peluang untuk memetik beberapa bidang ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam buku-buku maupun mengenal dan menganalisa sesuatu kejadian, serta mampu memecahkan masalah-masalah yang berbagai macam corak dan ragamnya. Tidak heran kalau konsep-konsep atau cara-cara pengendalian sosial gaya lama melalui pendidikan akan lebih cepat proses serta pertumbuhannya. Bidang sugesti sosial melalui dongeng-dongeng, peranannya cukup penting, namun tidaklah sejauh yang dapat diantarkan oleh dunia pendidikan. Hal tersebut mudah dimengerti karena sering kita jumpai dalam pergaulan hidup masyarakat dari masa ke masa. Dongeng hanya dapat mengendalikan jalan pikiran anak-anak, atau orang dewasa yang tingkat pengetahuannya tidak seberapa, terutama yang masih buta aksara dan angka, buta bahasa dan sebagainya. Anak-anak bilamana sudah pandai membaca, sudah tidak dapat lagi dikendalikan cara berpikirnya melalui sugesti seperti dongeng, cerita dan propaganda. Dengan demikian jelas peranan dongeng mulai bergeser ke belakang. Memang masih diakui bahwa sampai saat ini hal tersebut masih ada pendkungnya, akan tetapi para pendukung tersebut hanya bersifat sementara, menjelang mereka menyadari akan keterbelakangannya.

Akhir-akhir ini peranan agama sangat ditingkatkan, bahkan orang yang tidak menganut sesuatu agama tidak diberi kesempatan untuk memperoleh

sesuatu pekerjaan. Di berbagai penjuru dan pelosok, kian hari bertambah banyak jumlah mesjid, langgar, madrasah atau pondok-pondok pengajian yang dibangun masyarakat dan pemerintah. Anak-anak sekolah umum diberi pelajaran agama. Pada tiap-tiap hari besar Islam, sekolah, kantor-kantor, madrasah-madrasah merayakan dan memberikan ceramah-ceramah agama, yang kesemuanya itu diarahkan kepada usaha mempertebal keyakinan masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Kenyataan tersebut menjadi pertanda bahwa nilai agama semakin lama semakin tinggi dan disanjung orang. Para pemeluk agama Islam di Kerinci lebih rela mati daripada melihat agamanya dihina orang.

KEPUSTAKAAN

1. Idris Djakfar, *Faktor Territorial Genealogish Dusun di Kerinci*, Fakultas 1976 Hukum Universitas Negeri Jambi, Jambi.
2. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Anstropologi Sosial*. Dian Rakyat, 1977 Jakarta.
3. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia, 1976 Jakarta.
4. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, 1971 Jakarta.
5. Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Yayasan Ba- 1964 dan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
6. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta. 1979
7. Morison H.H., *De Mendapo Hiang in het District Kerinci*, Adatrechte- 1940 lijke verhandelingen, Batavia.
8. RI Departemen P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Adat 1978 Istiadat Daerah Jambi*, (Naskah Laporan), Proyek Rehabi- litasi dan Perluasan Museum Jambi, Jambi.
9. RI Departemen P dan K, *Menyeluk Daerah Propinsi Jambi* (Naskah 1977 Laporan), Team Survey/Perencanaan, Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Jambi, Jambi.
10. RI Departemen P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Pengaruh 1979 Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Jambi* (Naskah Laporan), Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, Jambi.
11. RI Departemen P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sistem 1979 Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jambi*, (Naskah Laporan); Proyek Inpentarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, Jambi.
12. Soekanto, Surjono, *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Yayasan Penerbit Uni- 1975 versitas Indonesia, Jakarta.
13. Sumber Saparin, *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. 1976 Bidang Publikasi & Perpustakaan Departemen Dalam Ne- geri, Jakarta.
14. Susanto, Astrid, S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina 1979 Cipta, Bandung.
15. Ter Haar. B. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*; Terjemahan K.Ng. Soe- 1960 bakti Poesponoto; Pradnya Paramita, Jakarta.

I N D E K

- akulturasi kebudayaan
alat angkutan
adat distrik
batanghari
batangtembesi
batangtebo
banir
baruh
balai sanggaran agung
cahak
cabik
chauvinisme
da'i
datuk
dago-dagi
depati
debalang
distrik
dongeng hantu gedang
dusun
ethnocentrisme
formatur
gambaran umum
gunjing
hari baik
hukum adat
hutan lindung
hubungan kekerabatan
indogami desa
jamban kayu
jamban
jalan larik
kalbu
kawin lari
kayo
keturunan asing
kegiatan sosial
kemas
kelebu
kerapatan
kepala dusun
khadi
komunitas
komunitas kecil
lasar
lapisan sosial
larik
leed
leed adat
lepeh racun
letak dan keadaan geografis
lurah
marga
maro sebo
mendapo
memulut
memampas
melantak tajuk ilir ke jambi
mecah unding
memampas dan membangun
mobilitas
monogami
orang kecil
parit-parit
pasar los
pasirah
penduduk pendatang
pantun nasehat
pelapisan sosial resmi
pelapisan sosial samar
penghulu
perahu
pemayung
pemimpin pucuk
pegawai syarak
perut

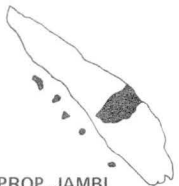
pemimpin informal
pegawai mesjid
pimpinan tradisional
pimpinan mencakup
pimpinan formal
pondok
pola perkampungan
pucuk jambi sembilan lurah

rantai sekilan
raden
rangkayo itam
rencong kerinci
rumah berjagan
rumah panjang
rumah luar
rumah dalam

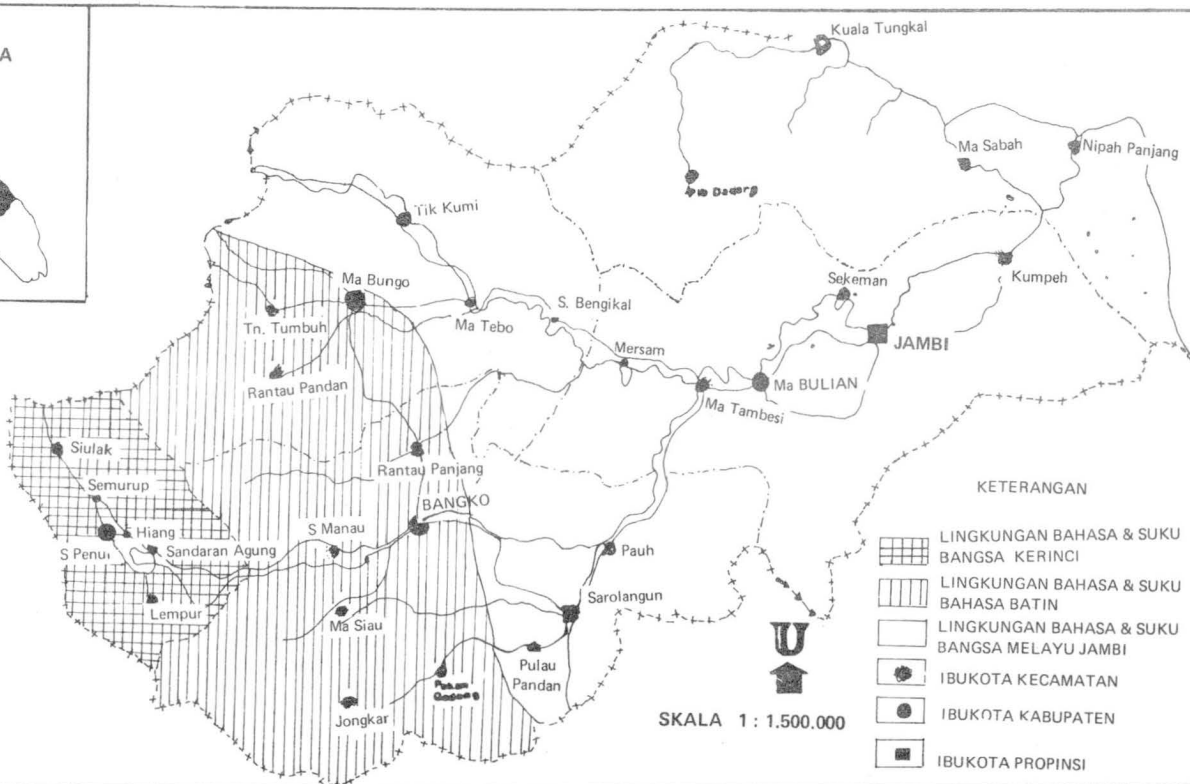
sudagar kitab
sayid
sabda
samun sakai
senjata perang
sedencing bak besi
seciap bak ayam
sistem gilir ganti
sumber hukum

tabuh larang
teh kayu aro
tepiian
tobo
tukang bangunan
tuo-tuo kampung
tumbi
umah gedea
wak syawal

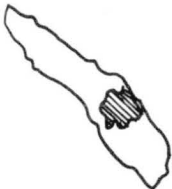
SUMATERA



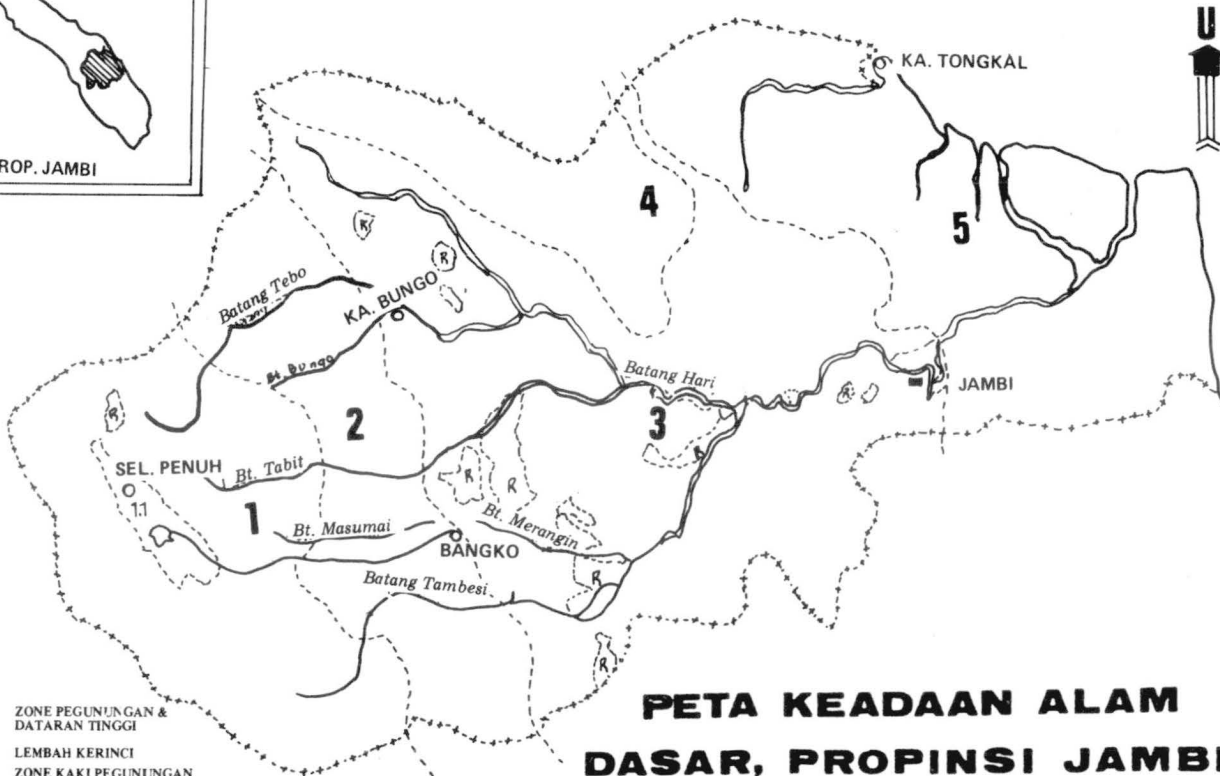
PROP. JAMBI



**PETA : LINGKUNGAN BAHASA & SUKU BANGSA
DI PROPINSI JAMBI**



PROP. JAMBI



- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | ZONE PEGUNUNGAN & DATARAN TINGGI |
| 1.1 | LEMBAH KERINCI |
| 2 | ZONE KAKI PEGUNUNGAN DATARAN RENDAH |
| 3 | DATARAN RENDAH |
| 4 | ZONE DATARAN TINGGI TIGA PULUH |
| 5 | ZONE RAWA-RAWA |
| R | RAWA-RAWA |

SKALA: 1: 15.000.000

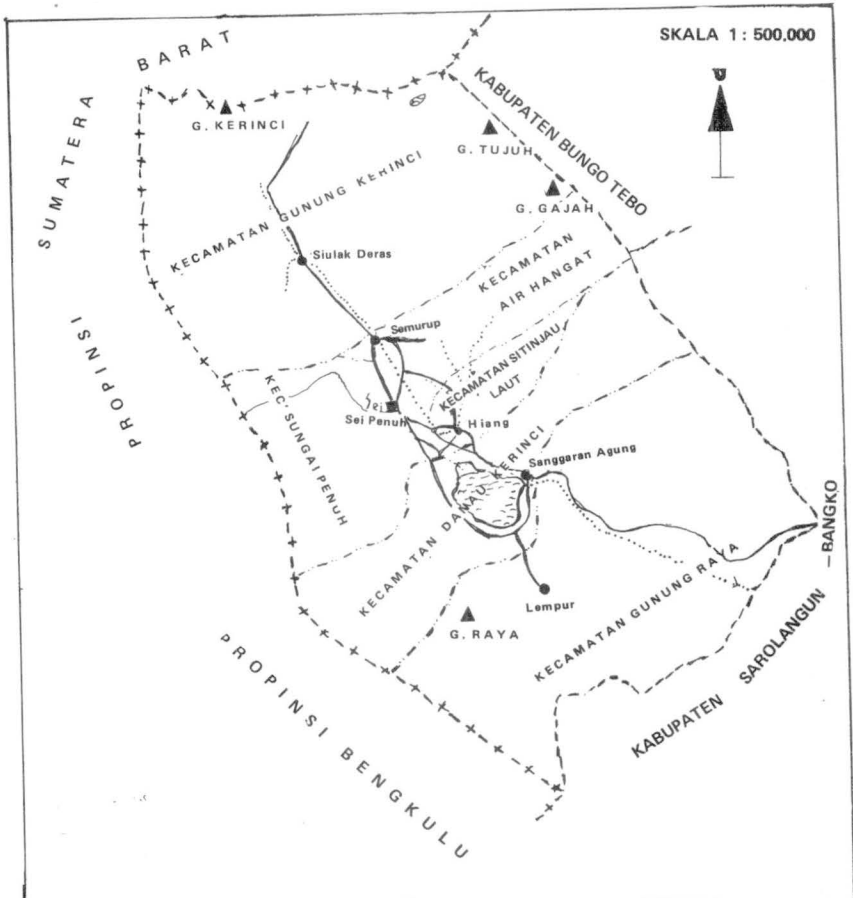


PETA KEADAAN ALAM DASAR, PROPINSI JAMBI

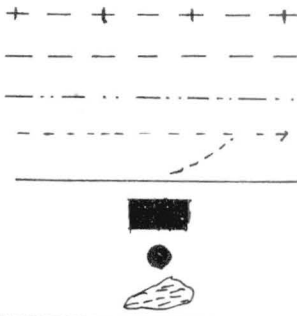
SUMBER : BAPPEDA TINGKAT I PROPINSI JAMBI

KABUPATEN KERINCI

SKALA 1 : 500,000



KETERANGAN :



- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Jalan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Danau

Perpus
Jende